



SISTEM KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DAERAH JAWA BARAT



340
DI
S
stakaan
& Pariwisata

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SISTEM KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN D A E R A H J A W A B A R A T

Peneliti/Penulis :

1. Drs. Kusnaka Adimihardja M.A.
2. Drs. Wahyu Wibisana.
3. Drs. Dasum Muanas.
4. Drs. Sjamsudin.

Penyempurna/Editor :

1. Drs. Sugiarto Dakung.



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI
KEBUDAYAAN DAERAH
JAKARTA 1986**

PERPUSTAKAAN KEBUDAYAAN DITJEN KEBUDAYAAN	
TGL. TERIMA	29-12-99
TGL. CATAT	29-12-99
NO. INDUK	659 /99
NO. CLASS	
KOPI KE :	1

PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menghasilkan beberapa macam naskah Kebudayaan Daerah diantaranya ialah naskah Sistem Kepemimpinan Dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Jawa Barat Tahun 1983/1984.

Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tahap pencatatan, yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu selanjutnya.

Berhasilnya usaha ini berkat kerjasama yang baik antara Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan Pimpinan dan Staf Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Tenaga Ahli perorangan, dan para peneliti/penulis.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini, maka kepada semua pihak yang tersebut di atas kami menyampaikan penghargaan dan terimakasih.

Harapan kami, terbitan ini ada manfaatnya.

Jakarta, Juni 1986
Pemimpin Proyek,



Drs. H. Ahmad Yunus
NIP. 130.146.112

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam tahun anggaran 1983/1984 telah berhasil menyusun naskah Sistem Kepemimpinan Dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Jawa Barat.

Selesaiannya naskah ini disebabkan adanya kerjasama yang baik dari semua pihak baik di pusat maupun di daerah, terutama dari pihak Perguruan Tinggi, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah serta Lembaga Pemerintah/Swasta yang ada hubungannya.

Naskah ini adalah suatu usaha permulaan dan masih merupakan tahap pencatatan, yang dapat disempurnakan pada waktu yang akan datang.

Usaha menggali, menyelamatkan, memelihara serta mengembangkan warisan budaya bangsa seperti yang disusun dalam naskah ini masih dirasakan sangat kurang, terutama dalam penerbitan.

Oleh karena itu saya mengharapkan bahwa dengan terbitan naskah ini akan merupakan sarana penelitian dan kepustakaan yang tidak sedikit artinya bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu suksesnya proyek pembangunan ini.

Jakarta, Juni 1986

Direktur Jenderal Kebudayaan,



(Prof. Dr. Haryati Soebadio)

NIP. 130.119.123.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
KATA SAMBUTAN	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR PETA	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Masalah Penelitian	1
1.2 Tujuan Penelitian	3
1.3 Ruanglingkup Penelitian	3
1.4 Pertanggungjawaban Ilmiah	6
BAB II. IDENTIFIKASI	11
2.1 Lokasi Penelitian	11
2.2 Keadaan Penduduk	16
2.3 Sejarah Pemerintahan Desa	23
2.4 Latar Belakang Sosial Desa	29
BAB III. GAMBARAN UMUM KEPEMIMPINAN DA- LAM MASYARAKAT PEDESAAN	40
3.1 Organisasi Pemerintahan Desa	40
3.2 Sistem Kepemimpinan	50
BAB IV. POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYA- RAKAT PEDESAAN DI BIDANG SOSIAL	64
4.1 Organisasi Dalam Kegiatan Sosial	64
4.2 Sistem Kepemimpinan	72
4.3 Pengaruh Dan Fungsi Kepemimpinan Bidang Sosial Dalam Masyarakat	75
BAB V. POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYA- RAKAT PEDESAAN DI BIDANG EKO- NOMI	79
5.1 Organisasi Dalam Kegiatan Ekonomi	79
5.2 Sistem Kepemimpinan	86

	5.3	Pengaruh Dan Fungsi Kepemimpinan Bidang Ekonomi Dalam Masyarakat . .	89
BAB VI.		POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYA- RAKAT PEDESAAN DI BIDANG AGAMA .	91
	6.1	Organisasi Dalam Kegiatan Keagamaan	91
	6.2	Sistem Kepemimpinan.	95
	6.3	Pengaruh Dan Fungsi Kepemimpinan Bidang Agama Dalam Masyarakat	97
BAB VII.		POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYA- RAKAT PEDESAAN DI BIDANG PEN- DIDIKAN	100
	7.1	Organisasi Dalam Kegiatan Pendidikan	100
	7.2	Sistem Kepemimpinan.	106
	7.3	Pengaruh Dan Fungsi Kepemimpinan Bidang Pendidikan Dalam Masyarakat.	109
BAB VIII.		BEBERAPA ANALISA.	111
	8.1	Pengaruh Kebudayaan Terhadap Sis- tem Kepemimpinan Di Pedesaan	111
	8.2	Sistem Kepemimpinan Pedesaan Se- hubungan Dengan Sistem Administrasi Nasional	114
	8.3	Sistem Kepemimpinan Pedesaan Da- lam Pembangunan Nasional.	115
		DAFTAR KEPUSTAKAAN	118
		LAMPIRAN I.	121
		LAMPIRAN II.	124
		INDEKS	125

DAFTAR PETA

	Halaman
1. Peta Kecamatan Pabuaran	12
2. Peta Desa Kadubeureum	15
3. Peta Desa Pasanggrahan	17
4. Peta Desa Tanjungsari	19

DAFTAR TABEL

Tabel :	Halaman
1. Perincian Areal Desa Kadubeureum (termasuk wilayah Desa Pasanggrahan)	14
2. Perincian Penduduk Di Desa Kadubeureum (termasuk Desa Pasanggrahan) dan Desa Tanjungsari	20
3. Jumlah Anak Yang Dimiliki Sampel Di Desa Pasanggrahan Dan Desa Tanjungsari (Masing-masing Desa : N = 100)	21
4. Syarat-syarat Yang Perlu Dimiliki Seorang Kepala Desa (Masing-masing Desa : N = 100)	29
5. Perincian Pekerjaan Pokok Penduduk Desa Kadubeureum	30
6. Orang-Orang Yang Dipertua Di Desa Pasanggrahan dan Desa Tanjungsari (masing-masing Desa : N = 100).	59
7. Tanggapan Dan Pengakuan Masyarakat terhadap <i>Kokolot</i> Desa Di Desa Pasanggrahan dan Desa Tanjungsari (Masing-masing Desa : N = 100)	63
8. Penengah Perselisihan Di Antara Warga Desa Di Desa Pasanggrahan Dan Desa Tanjungsari (Masing-masing Desa : N = 100).	70
9. Perincian Murid Di SD Pasanggrahan	100
10. Perincian Guru Di SD Pasanggrahan	101

BAB I.

PENDAHULUAN

1. Masalah Penelitian

Salah satu tema kegiatan inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan daerah, yang ditetapkan oleh Direktorat Sejarah dan Nilai Traditional, Direktorat Jendral Kebudayaan, Departemen DIKBUD dalam tahun anggaran 1983–1984 adalah penelitian sistem kepemimpinan di dalam masyarakat pedesaan. Kegiatan tersebut di atas dilaksanakan karena adanya kenyataan tentang terdapatnya keanekaragaman corak dari sistem kepemimpinan di dalam masyarakat pedesaan Indonesia yang tercermin dalam keanekaragaman sistem sosial dan politik yang berlaku di masing-masing lingkungan dari masyarakat yang bersangkutan. Keadaan ini sesungguhnya merupakan pencerminan dari keanekaragaman corak kebudayaan Indonesia (Geertz, 1967; Kuntjaraningrat, 1967; Suparlan, 1978). Keanekaragaman corak kebudayaan Indonesia tersebut, antara lain terwujud dalam (1) bentuk yang kontras antara kehidupan masyarakat di daerah pedesaan dan perkotaan; (2) sistem ekonomi yang dianut masyarakat masih beranekaragam, dari bentuk-bentuk kehidupan ekonomi ladang yang berpindah-pindah sampai pada sistem ekonomi sawah yang bersifat menetap dengan sistem irigasi yang rumit dan mahal, di samping sebagian masyarakat di berbagai kota dan daerah tertentu telah hidup dalam lingkungan kebudayaan industri; (3) kesukubangsaan, yaitu dari yang bercorak tunggal dan bersifat tertutup (clan dan lineage) sampai pada yang bercorak majemuk dan bersifat terbuka; dan (4) keanekaragaman sistem sosial yang dilandasi oleh berbagai macam hukum adat yang berlaku yang berlandaskan pada ikatan kekerabatan, teritorial dan kombinasi keduanya.

Keanekaragaman kebudayaan sebagaimana dikemukakan di atas, secara sosial dan politik telah menjadi sederhana, karena pengaruh dari sistem administrasi nasional terhadap sistem administrasi lokal (desa) yang diatur oleh Undang-Undang Pemerintah Desa no. 5/1979. Akan tetapi dalam kenyataan hidup masyarakat sehari-hari tampaknya keanekaragaman sistem sosial dan politik dari kehidupan masyarakat desa itu akan tetap ada, karena; (1) perkembangan sejarah desa di Indonesia yang beranekaragam, sehingga keadaan ini akan mem-

bawa pula pengaruh terhadap corak kekuatan dan sistem politik yang hidup di daerah pedesaan Indonesia; (2) orientasi dan kekuatan politik yang ada di masing-masing daerah pedesaan akan memberikan warna dan pengaruh terhadap sistem kepemimpinan di masing-masing daerah pedesaan yang bersangkutan; (3) besarnya pengaruh dan kekuatan adat tradisi setempat yang tercermin dalam struktur politik masyarakat bersangkutan dalam menghadapi masuknya pengaruh dan kekuatan dari sistem administrasi nasional.

Berdasarkan ilustrasi di atas, maka secara hipotetis agaknya terdapat tiga corak dari sistem kepemimpinan di daerah pedesaan Indonesia, yaitu :

- (1) Sistem kepemimpinan tradisional yang mendominasi berbagai struktur dan kegiatan politik yang berlaku di daerah pedesaan.
- (2) Sistem kepemimpinan tradisional dan kepemimpinan yang berasal dari sistem administrasi nasional. Keduanya sama kuat dan mendominasi bidang kegiatan politik, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu secara bersama-sama merupakan suatu satuan yang mengatur tata kehidupan masyarakat desa.
- (3) Sistem kepemimpinan yang bersumber pada sistem administrasi nasional yang mendominasi bidang kehidupan politik, ekonomi, dan sosial dalam kehidupan masyarakat desa, sehingga dengan demikian maka kepemimpinan tradisional terkesampingkan dan tidak berfungsi sama sekali. Di antara ketiga corak kepemimpinan tersebut tentu ada variasi yang muncul yang berdasarkan kombinasi ketiga corak tersebut di atas.

Berdasarkan berbagai ilustrasi tersebut, maka yang menjadi masalah utama dalam penelitian ini adalah :

(1) Masalah Umum

Hingga kini Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional belum dapat melayani permintaan data yang terjalinkan dalam bahan kesejarahan nilai budaya, lingkungan budaya, sistem budaya untuk kepentingan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan, pendidikan, dan kepentingan masyarakat.

(2) Masalah Khusus

Bentuk sistem kepemimpinan yang berlaku dan dianut masyarakat pedesaan hingga saat ini dalam suatu jaringan sosial dan kebudayaan masyarakat tersebut. Dalam penelitian ini desa akan

dilihat sebagai suatu sistem sosial yang merupakan satuan kebudayaan dalam jangkauan jaringan administrasi nasional yang pusat terdekatnya adalah ibukota kecamatan.

2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

- (1) Secara umum, bertujuan melakukan inventarisasi dan dokumentasi terhadap sistem kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan, yang dalam penelitian ini akan diungkapkan sistem kepemimpinan dalam kaitan dengan bidang-bidang sosial, ekonomi, agama, dan pendidikan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam usaha menyediakan data dan informasi kebudayaan daerah dari Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional untuk keperluan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan, pendidikan, dan masyarakat.
- (2) Secara khusus, dalam penelitian ini akan dilakukan deskripsi dan analisa mengenai sistem kepemimpinan di dalam masyarakat pedesaan yang mencakup bidang sosial, ekonomi, agama, dan pendidikan dalam rangkaian inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan daerah. Melalui deskripsi dan analisa sebagaimana dikehendaki di atas, diharapkan penelitian ini mampu mengungkapkan sebab-akibat dari perkembangan kebudayaan yang terjadi di daerah, sehingga kalau perlu pihak Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dapat mengambil langkah yang tepat.
- (3) Penelitian ini bertujuan pula memahami dan mengetahui bagaimana arah dan perkembangan (dinamika) dari sistem kepemimpinan di dalam masyarakat pedesaan sebagai salah satu perwujudan dari sistem politik yang berlaku di masing-masing daerah pedesaan tersebut.

3. Ruanglingkup Penelitian

Dalam usaha melaksanakan tujuan penelitian sebagaimana dijelaskan terdahulu, maka dalam penelitian itu kepemimpinan akan dilihat sebagai suatu perwujudan dari pelaksanaan sistem politik yang berlaku dalam kehidupan masyarakat desa. Sedangkan sistem politik dilihat sebagai hasil perwujudan atau perangkat model pengetahuan yang digunakan untuk menanggapi berbagai masalah dan gejala yang berkaitan dengan pengaturan tata kehidupan manusia dari kelompok masyarakat tersebut. Dengan demikian maka corak dari sistem ke-

pemimpinan di daerah pedesaan itu dilihat sebagai hasil perwujudan interaksi dari unsur-unsur yang menjadi landasan kekuatan sosial, ekonomi, politik, dan juga fisik dari seorang pemimpin dalam mengatur tata kehidupan masyarakat.

Perwujudan interaksi tersebut baik bersumber dari dalam desa itu sendiri atau bersumber dari luar. Dalam kaitan ini maka hubungan (interaksi) antara desa dengan luar desa sebagai suatu hubungan dari dua macam struktur sosial yang prosesnya berjalan terus-menerus.

Sebagai landasan dalam penelitian ini akan digunakan dua konsep kepemimpinan yang sudah lajim digunakan dalam ilmu-ilmu sosial, yaitu dasar-dasar kepemimpinan yang bersifat formal dan informal. Dalam buku Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya (Prasadj, 1980: 7) digunakan istilah legal untuk bentuk kepemimpinan yang bersifat informal.

Dalam sistem kepemimpinan yang bersifat formal dasar kewenangan kekuasaannya memiliki sanksi yang nyata. Dalam penelitian ini akan difokuskan pada tokoh-tokoh pimpinan yang memiliki status formal seperti Kepala Desa. Tokoh ini karena kewenangannya menguasai banyak aktivitas dalam melaksanakan pembangunan desa. Tokoh pimpinan formal lainnya dalam lingkungan pedesaan adalah tokoh-tokoh yang menjabat pimpinan berbagai organisasi sosial, seperti pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang di dalamnya mencakup berbagai macam kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tingkat desa.

Selanjutnya, dalam bentuk kepemimpinan yang bersifat informal, di mana bentuk kepemimpinan demikian itu diterima masyarakat berdasarkan nilai-nilai sosial yang mendalam, akan diamati melalui tokoh-tokoh agama dan adat, seperti peranan seorang kiyai atau *kokolot* (sesepuh di daerah Priangan) dalam kehidupan masyarakat desa. Dalam penelitian ini maka faktor kekayaan perlu diperhitungkan sebagai sarana penunjang legitimasi di kalangan para pemimpin masyarakat desa, di samping faktor keturunan dan hubungan perkawinan.

Di daerah Jawa Barat penelitian akan dilakukan di sekitar daerah Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang. Secara kultural kehidupan sosial-budaya masyarakat di sekitar daerah tersebut masih termasuk wilayah kebudayaan *Banten Girang* (*Banten Selatan*). Apabila kita bandingkan dengan bagian utara Banten secara keseluruhan, penduduk wilayah Banten Selatan lebih banyak menyimpan sisa-sisa tra-

disi Sunda abad ke 16. Hal ini dapat kita amati dalam dialek yang mereka gunakan hampir tidak mengenal *undak-unduk basa* (tingkat-tingkat dalam menggunakan bahasa sebagaimana umumnya di daerah Priangan). Mereka juga masih melakukan kebiasaan Sunda kuno, seperti kebiasaan berladang (tetapi karena faktor keterbatasan tanah tidak berpindah-pindah), tetapi kalau terpaksa mereka harus ber-sawah, ritus pertaniannya tetap mengikuti ritus pertanian ladang.

Secara administratif pada masa pemerintahan Hindia Belanda dulu, wilayah kecamatan Pabuaran sekarang termasuk dalam wilayah Ciomas. Menurut anggapan dan kepercayaan masyarakat setempat wilayah Ciomas itu merupakan *huluna* (intinya) Banten. Dimaksudkan dengan ungkapan tersebut adalah wilayah Ciomas itu merupakan "pusat kebudayaan" dari masyarakat Banten. Di sekitar daerah Pabuaran sekarang masih mengalir sebuah sungai yang merupakan sumber air bagi kehidupan masyarakat Pabuaran. Sungai tersebut bernama Cibanten (air Banten) yang berasal dari gunung Karang (1778 M). Pada masa kekuasaan Sultan Hasanuddin sungai ini digunakan pula sebagai lalu-lintas niaga (perdagangan). Di sekitar daerah Kecamatan Pabuaran, kini banyak ditemukan *makam* (kuburan) keramat. Menurut kepercayaan penduduk makam tersebut adalah makam para pengikut dan tentara Sultan Ageng Tirtayasa yang menyingkir ke daerah selatan untuk menghindari kepungan tentara Belanda.

Sesuai dengan petunjuk (*term of reference*) yang diberikan oleh tim pusat, maka hanya dua desa saja yang akan menjadi obyek penelitian inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan daerah. Maka berdasarkan survey pendahuluan (*prasurvey*) yang telah kami lakukan di Kecamatan Pabuaran pada bulan Juli 1983, ditentukan Desa Pasanggrahan yang merupakan desa ibukota kecamatan, dan desa Tanjung-sari yang merupakan desa pedalaman dari kecamatan dipilih sebagai lokasi penelitian.

Secara sederhana, corak atau sistem kepemimpinan yang berlaku di kedua desa dan juga merupakan tipologi kepemimpinan di daerah Banten adalah ditandai oleh adanya interaksi dan perpaduan antara **peranan-peranan** yang dimainkan oleh apa yang dinamakan masyarakat setempat dengan sebutan *umaroh* (unsur-unsur kepemimpinan formal); *ulama* (unsur-unsur kepemimpinan agama) dan *jawara* (unsur-unsur kepemimpinan adat). Ketiga unsur kekuatan tersebut memainkan peranan penting dalam membentuk sistem politik lokal

yang didukung oleh penguasaan atas sumber daya ekonomi, keturunan, dan jaringan dari hubungan kekerabatan yang meluas hingga ke luar batas desa. Maka sistem kepemimpinan yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat Pabuaran secara traditional muncul sebagai hasil interaksi dan perpaduan dari permainan antara unsur-unsur traditional atau informal (*ulama dan jawara*), dan unsur yang datang dari luar desa melalui tekanan jalur formal (*umaroh*).

Berdasarkan ilustrasi di atas, secara singkat dapat dikemukakan bahwa ruang lingkup penelitian ini akan mencakup sistem kepemimpinan di dalam masyarakat pedesaan Jawa Barat dalam jaringan sosial, ekonomi, agama, dan pendidikan dalam usaha inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan daerah.

4. Pertanggungjawaban Ilmiah

Tahap persiapan. Dalam tahap ini persiapan penelitian telah digarap oleh tim pusat. Hal ini mencakup tentang (1) rumusan pola penelitian; (2) rumusan petunjuk pelaksanaan penelitian; dan (3) kerangka laporan penelitian. Ke semua itu kemudian dikomunikasikan dan disempurnakan bersama antara tim pusat dengan daerah melalui suatu Pekan Pengarahan/Penataran Tenaga Peneliti/Penulis Kebudayaan Daerah Seluruh Indonesia di Puncak (Bogor) dari tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 4 Juni 1983.

Di daerah, tahap awal dalam persiapan penelitian ini adalah (1) menyusun tim peneliti sebanyak empat orang yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan dua orang anggota, (2) menyusun kerangka penelitian sesuai dengan kondisi daerah. Dalam melaksanakan seluruh tugas penelitian ini semua anggota tim peneliti terlibat dalam tahap persiapan, pengumpulan data di lapangan dan penulisan laporan. Seluruh tahap pekerjaan dikerjakan menurut jadwal yang disesuaikan dengan petunjuk pelaksanaan penelitian dari tim pusat di Jakarta.

Tahap penentuan lokasi penelitian. Dalam tahap ini tim peneliti melakukan pertemuan dan mendiskusikan untuk menentukan lokasi penelitian yang tepat sesuai dengan judul dan tujuan penelitian. Berdasarkan berbagai pertimbangan, baik teknis maupun akademis, maka tim peneliti sepakat menentukan Kecamatan Pabuaran di daerah Kabupaten Serang sebagai lokasi penelitian. Setelah lokasi ini ditentukan, maka kemudian salah seorang anggota tim melakukan penjajagan ke daerah tersebut untuk mempelajari kemungkinan-

kemungkinan penelitian itu dilaksanakan. Melalui studi penjajagan itu kemudian ditentukan pula desa Pasanggrahan yang merupakan desa ibukota kecamatan, dan desa Tanjungsari yang merupakan desa pedalaman sebagai lokasi penelitian. Dalam studi penjajagan itu dilakukan pula pengamatan selintas, dalam usaha memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun daftar pertanyaan (angket).

Tahap penyusunan daftar pertanyaan. Berdasarkan petunjuk (*term of reference*) tim pusat dan juga hasil studi penjajagan, maka disusunlah daftar pertanyaan (angket) yang akan disebarakan kepada masyarakat dalam usaha memperoleh gambaran kuantitatif dari berbagai kehidupan sosial dan budaya dari masyarakat Pabuaran. Di samping penyusunan daftar pertanyaan (angket), disusun pula daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara dengan para informan.

Tahap pengumpulan data. Dalam tahap ini mencakup dua hal pokok, yaitu: prosedur pengumpulan data dan metoda penelitian yang digunakan. Dalam prosedur pengumpulan data, pertama menentukan jumlah banyaknya angket yang akan disebarakan pada masyarakat di kedua desa lokasi penelitian. Berdasarkan laporan studi penjajagan, diperoleh data bahwa jumlah penduduk di desa Pasanggrahan ada sebanyak 2180 jiwa, dan di desa Tanjungsari ada sebanyak 2603 jiwa. Karena angket ini dibuat khusus ditujukan pada penduduk usia dewasa (20–60 tahun) maka diperoleh angka penduduk usia dewasa di desa Pasanggrahan ada sebanyak 1216 jiwa dan di desa Tanjungsari ada sebanyak 1228 jiwa. Sesuai dengan petunjuk tim peneliti pusat, maka pada jumlah penduduk lebih dari 1000 orang diambil responden sebanyak 10 persen dari jumlah penduduk. Maka diperoleh jumlah responden untuk desa Pasanggrahan sebanyak 121 responden, dan untuk desa Tanjungsari sebanyak 122 responden. Sekedar untuk memudahkan perhitungan dalam proses tabulasi, maka tim peneliti hanya menentukan 100 responden untuk tiap desa. Hal ini juga berdasarkan pertimbangan hasil studi penjajagan, bahwa penduduk desa di sekitar wilayah kecamatan Pabuaran, dalam pandangan dan tingkat pendidikan serta pengetahuan mereka, bersifat homogen. Rata-rata penduduk di kedua desa ini hanya tamatan kelas 3 SD atau keluaran pesantren, bahkan banyak di antara mereka yang masih buta aksara.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan penyebaran angket di kedua desa tersebut, tim peneliti dibantu oleh sekitar 10 orang guru SMP Negeri

Pabuaran dan SD Inpres desa Tanjungsari, di bawah koordinator Penilik Kebudayaan Departemen Dikbud Kecamatan Pabuaran. Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan psikologis bahwa melalui guru-guru yang telah mereka (masyarakat) kenal sehari-hari, faktor ketakutan dapat dihindarkan. Dengan demikian, diharapkan tim peneliti memperoleh data yang akurat sesuai dengan tujuan penelitian. Sebelum kesepuluh orang guru tersebut melakukan tugas lapangan, mereka memperoleh berbagai penjelasan dan latihan dari kedua dan sekretaris tim peneliti selama satu hari. Kegiatan ini dilakukan pada bulan Juli 1983, pada saat ketua dan sekretaris tim peneliti melakukan *pra-survey* dalam rangka mempersiapkan kedatangan seluruh anggota tim peneliti untuk mulai mengumpulkan data lapangan. Dalam *pra-survey* itu dilakukan pula pengumpulan data sekunder dan berbagai wawancara pendahuluan serta menemui berbagai pejabat, baik dalam tingkat desa, maupun kecamatan dan kabupaten. Pertemuan ini dilakukan untuk mempersiapkan kelancaran tugas-tugas lapangan dari seluruh anggota tim peneliti.

Dalam menentukan 100 responden pada tiap desa, ditempuh cara sebagai berikut: tiap responden harus mewakili tiap kampung dari kedua desa, dan ditentukan tiap 5–10 orang usia dewasa diambil satu orang sebagai responden. Dalam menentukan responden untuk tiap kampung, digunakan kriteria tokoh atau *kokolot (sesepuh)* kampung. Penentuan tokoh atau kokolot ini didasarkan pada penelitian masyarakat kampung yang bersangkutan. Dengan demikian diharapkan pendapat orang yang bersangkutan (responden) mencerminkan pendapat masyarakat kampung tersebut. Setelah dilakukan sensus terhadap tokoh pada semua kampung dari kedua desa tersebut, barulah dilakukan penyebaran daftar pertanyaan (angket) oleh para pembantu lapangan di kedua desa tersebut.

Selanjutnya, metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

(1) Metoda Observasi (Pengamatan)

Metoda observasi yang digunakan adalah jenis observasi partisipasi. Melalui pendekatan ini diharapkan agar data-data dari tangan pertama dapat diperoleh, dalam usaha mengetahui dan memahami tingkahlaku dan kebiasaan sosial masyarakat yang menjadi obyek penelitian.

(2) Metoda Wawancara

Dalam metoda ini digunakan dua macam cara, pertama, wawan-

cara bebas, bertujuan untuk memperoleh berbagai keterangan yang bersifat informal dalam bentuk percakapan (*ngobrol*) dalam suasana yang santai dengan para anggota masyarakat di sekitar desa tempat penelitian dilaksanakan. Kedua, wawancara berstruktur yang bertujuan untuk memperoleh keterangan khusus yang dikaitkan dengan masalah penelitian. Dalam pelaksanaan bentuk wawancara seperti ini telah dipersiapkan suatu pedoman wawancara (*interview guide*) dan daftar informan. Para informan yang telah ditentukan, sesuai dengan TOR, terdiri dari pimpinan formal dan informal di tingkat desa. Mereka antara lain terdiri dari Kepala Desa, tokoh agama, dan tokoh adat yang merupakan *kokolot* (*sesepuh*) desa. Daftar informan yang diwawancarai terlampir pada bagian akhir dalam laporan ini.

Dengan pendekatan yang bersifat kualitatif dari hasil wawancara yang kemudian didukung oleh data lapangan dari hasil angket yang merupakan pendapat masyarakat (data kuantitatif), diharapkan hasil penelitian yang bulat (*integrated*) dari tingkahlaku dan kebiasaan sosial-budaya masyarakat yang menjadi obyek penelitian akan diperoleh.

(3) Metoda Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan terutama untuk memperoleh dan memperlengkapi data-data historis, di samping sebagai bahan bacaan bagi pelukisan deskriptif dan analisa mengenai hal-hal yang pada saat ini tidak mungkin kami peroleh dengan metoda lain.

Tahap pengolahan data. Dalam tahap ini kegiatan yang paling penting adalah membandingkan dan menyeleksi data-data dengan mempertimbangkan tingkat reliabilitas dan validitas data tersebut. Kemudian mengintegrasikan data-data yang dikumpulkan, baik data sekunder maupun data yang bersifat primer. Dan akhirnya data-data tersebut diorganisasikan menurut kerangka laporan sesuai dengan petunjuk dari tim pusat sehingga siap untuk disajikan dalam bentuk laporan hasil penelitian.

Tahap penulisan laporan. Sebagaimana dikemukakan di atas, maka pedoman penulisan seluruh laporan ini didasarkan kepada sistematika dan sistem penulisan seperti yang termuat dalam buku petunjuk pelaksanaan penelitian yang telah disusun oleh tim pusat.

Naskah pertama dari hasil penulisan laporan penelitian ini merupakan *draft* I, dibahas dan didiskusikan oleh tim peneliti dalam usaha penyempurnaan naskah pertama tersebut. Selanjutnya, hasil penyempurnaan dari naskah pertama itu dihasilkan laporan yang disampaikan kepada tim pusat untuk dievaluasi.

Penutup

Hasil akhir dari penelitian ini tentu belum mencerminkan secara bulat gambaran tentang sistem kepemimpinan di dalam masyarakat pedesaan Jawa Barat. Karena sebagaimana diketahui di daerah Jawa Barat. Karena sebagaimana diketahui di daerah Jawa Barat terdapat beberapa subkebudayaan, antara lain: subkebudayaan Priangan, Cirebon, Karawang, dan Bnten. Faktor-faktor sosial-budaya dari masing-masing subkebudayaan tersebut sedikit banyak akan memberikan warna tertentu pada sistem kepemimpinan yang ada di masing-masing wilayah subkebudayaan tadi. Namun demikian, apabila ditinjau dari tujuan penelitian yang ingin dicapai hal itu sesuai dengan petunjuk penelitian yang telah digariskan oleh tim pusat. Maka hasil yang dituangkan dalam laporan penelitian kiranya cukup memadai sebagai langkah awal dalam usaha inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan daerah Jawa Barat.

IDENTIFIKASI

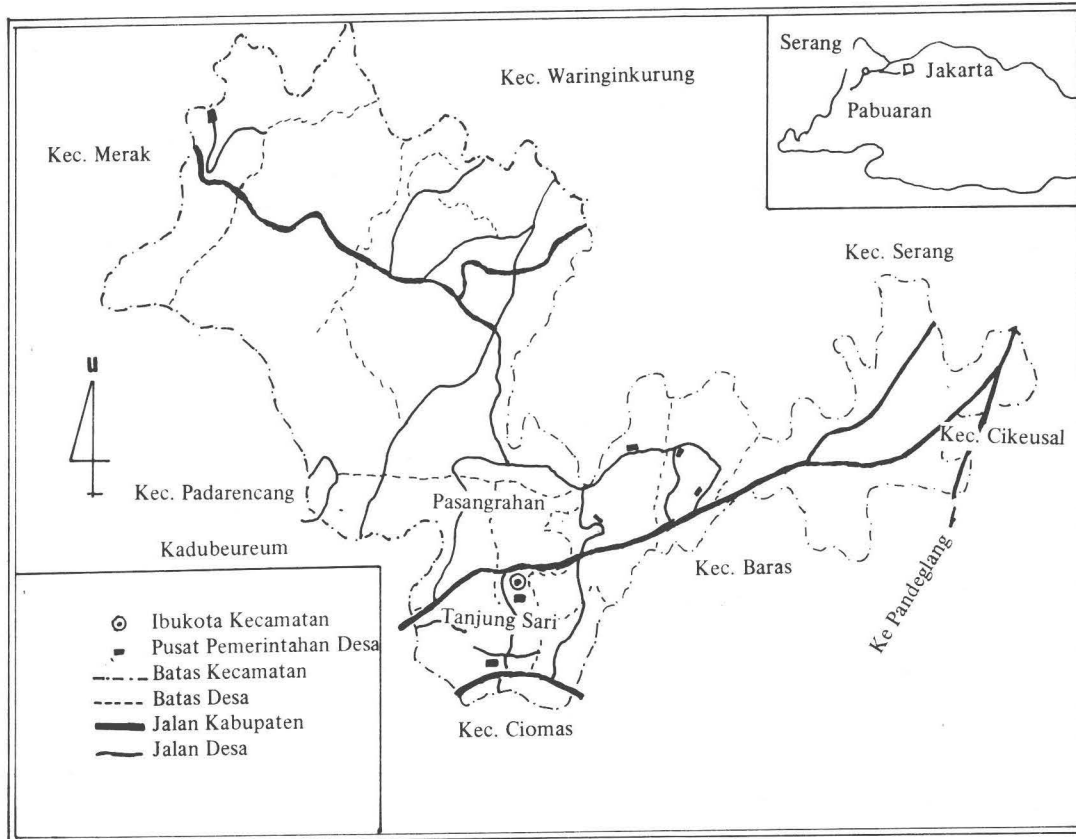
1. Lokasi Penelitian

Sebagaimana telah dikemukakan dalam Bab I, lokasi penelitian Sistem Kepemimpinan di Pedesaan Jawa Barat adalah di Kecamatan Pabuaran, termasuk wilayah Kabupaten Serang. Daerah ini terletak di sebelah barat daya Kabupaten Serang, sekitar 20 Km, dan dapat dicapai dengan menggunakan kendaraan umum.

Kecamatan Pabuaran (lihat peta pada hal. 12) pada jaman Belanda dulu termasuk Kewedanaan Ciomas (disebut pula Ciomas Tengah). Sekarang, walaupun kewedanaan sudah ditiadakan dan jabatan wedana sudah diganti dengan istilah "pembantu bupati", namun masih juga disebut bahwa kecamatan Pabuaran termasuk Kewedanaan Ciomas. Desa-desanya yang termasuk wilayah Kecamatan Pabuaran ialah Desa Luwuk, Kaduagung, Sukalaba, Gunungsari, Kadubeureum, Pasanggrahan, Tanjungsari, Pabuaran, Pancanagara, Sindangheulang, dan Sindangsari.

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Desa Pasanggrahan sebagai ibukota kecamatan, dan Desa Tanjungsari yang merupakan desa pedalaman dari ibukota kecamatan tersebut. Desa Pasanggrahan sebagai ibukota kecamatan pada saat penelitian dilakukan belum memiliki data-data dan monografi desa sebagaimana mestinya. Hal ini karena desa tersebut baru saja dibentuk dengan Surat Keputusan (SK) Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Serang no 270a/82, tanggal 20 September 1982. Desa Pasanggrahan adalah desa pemekaran dari Desa Kadubeureum, sehubungan dengan jumlah penduduk yang sudah mencapai sekitar 4.445 jiwa di Desa Kadubeureum tersebut. Sebelum Desa Pasanggrahan dibentuk, yang menjadi ibukota kecamatan adalah Desa Kadubeureum. Sampai pada saat penelitian selesai dilakukan, desa Pasanggrahan sebagai ibukota kecamatan yang baru belum memiliki kantor (*bale desa*). Pengendalian pemerintahan desa sehari-hari dilakukan dari rumah *carik*. Dan karena belum adanya data-data yang dapat dipelajari dari desa tersebut, maka sesuai dengan saran Bapak Camat Pabuaran, untuk keperluan penelitian tersebut digunakan data-data dan monografi desa Kadubeureum hingga September 1982. Hal ini juga dapat dilakukan karena menurut pertimbangan tim peneliti, selama hampir satu tahun

KECAMATAN PABUARAN



desa Pasanggrahan terbentuk tidak akan banyak perubahan dalam berbagai sektor kehidupan desa. Maka semua data-data yang akan disampaikan dalam laporan ini, yang menyangkut kepentingan Desa Pasanggrahan, digunakan data-data Desa Kadubeureum sampai tahun 1982.

Desa Pasanggrahan dan Desa Tanjungsari terletak di daerah bagian barat Pulau Jawa, di kaki Gunung Karang (1778 M). Dari kantor Kecamatan Pabuaran ke desa Pasanggrahan berjarak sekitar 1 Km. Sedangkan jarak dari ibukota Kabupaten Serang sekitar 21 Km. Wilayah administratif Desa Pasanggrahan berbatasan dengan Desa Pabuaran di sebelah timur, desa Tanjungsari di sebelah selatan, Desa Kadubeureum di sebelah barat, dan Desa Ciherang di sebelah utara. Sedangkan Desa Tanjungsari di sebelah utara berbatasan dengan Desa Kadubeureum dan Desa Pasanggrahan sebelah selatan dengan Desa Cemplang, sebelah barat Desa Sukarena dan sebelah timur Desa Sindangmandi.

Luas areal Desa Pasanggrahan dan Desa Kadubeureum ada sekitar 619,36 ha. Luas areal Desa Tanjungsari ada 550,73 ha, tanah tegalan seluas 427,23 ha, kuburan di sekitar desa seluas 8 ha, dan tanah bengkok sekitar 3,50 ha. Pada saat penelitian ini dilakukan di Desa Tanjungsari tidak diperoleh data-data terperinci tentang penggunaan areal desa sebagaimana yang terdapat di Desa Kadubeureum, sebagaimana terlihat pada hal. 14.

Baik di Desa Pasanggrahan maupun di Desa Tanjungsari terletak di daerah pegunungan dan secara geomorfologis Desa Pasanggrahan berbentuk tanah datar yang baik sekali sebagai daerah pesawahan dengan kemiringan tanah 5–15 derajat. Daerah ini memperoleh air dengan sistem pengairan yang masih bersifat tradisional dari sungai Citanggohgor dan Ciberang. Kedua sungai itu berasal dari gunung Karang. Desa Tanjungsari secara geomorfologis seolah-olah terbagi dua, yaitu bagian selatan merupakan dataran tinggi yang membentuk pesawahan pegunungan, ladang dengan berbagai tanaman keras, dan hutan. Sedangkan bagian utara membentuk daerah pemukiman penduduk dan pesawahan dataran rendah yang membentang luas. Keadaan tanah Desa Tanjungsari yang seakan-akan miring ke arah utara mempengaruhi daya dukung air dalam tanah desa tersebut. Di bagian pegunungan, air sulit diperoleh penduduk untuk keperluan mandi, cuci, dan kakus (MCK), sehingga untuk keperluan tersebut penduduk desa yang tinggal di daerah yang tinggi harus

Tabel 1.
Perincian Areal Desa Kadubeureum
(termasuk wilayah Desa Pasanggrahan)*

No.	U r a i a n	Luas (dalam ha)	Keterangan
1	Perumahan	66,58	
2	Sawah	391	
3	Ladang	124	
4	Kuburan	7,50	
5	Tegalan	73,78	
6	Tanah wakaf	1,50	
7	Kolam/Empang	1	
8	Perkebunan	75,50	
9	Lapangan	3,50	
	J u m l a h :	619,36	

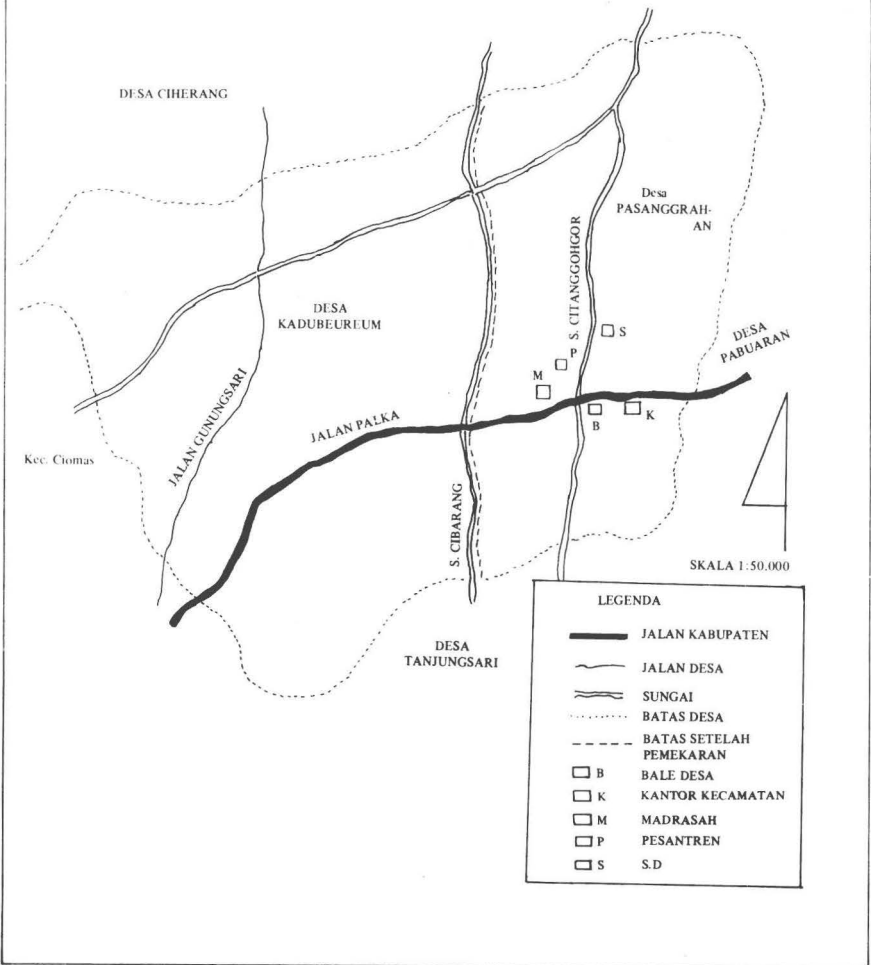
Sumber: Monografi Desa Kadubeureum, 1982

*Sebelum terjadi pemekaran Desa Pasanggrahan.

turun ke arah yang lebih rendah untuk memperoleh air yang terkadang jauh jaraknya dari daerah pemukiman. Sebaliknya di daerah yang rendah (datar) air mudah diperoleh penduduk bagi kepentingan MCK. Sumber air yang terdapat di Desa Tanjungsari pada umumnya berasal dari daerah pegunungan, yaitu sumber air Cibirai, Cipeuteuy, Cigewok, Cikopeng, dan Cisitu. Air tersebut kemudian melalui sungai Cibanten dan Cibirai mengalir ke daerah rendah pesawahan di Desa Tanjungsari dan kemudian ke daerah pesawahan yang pada umumnya "tadah hujan" di desa Kadubeureum. Di kedua desa tersebut hingga kini belum ada sistem pengairan modern.

Desa Pasanggrahan dan Desa Tanjungsari termasuk beriklim sedang dengan curah hujan yang cukup, sekitar 2000 mm/tahun. Tanah di kedua desa tersebut cukup subur, banyak tumbuh-tumbuh-

**PETA DESA KADUBEUREUM TERMASUK
DESA PASANGGRAHAN (setelah dimekarkan)**



an dan jenis tanaman yang beraneka-ragam seperti pisang, kelapa, pala, kopi, cengkeh, dan ketela pohon (singkong). Tanaman tersebut ditanam dalam bentuk *multi-crops*. Artinya, dalam satu areal tanah tertentu dibudidayakan berbagai macam jenis tanaman, sehingga sepanjang tahun para petani di kedua desa tersebut selalu dapat memetik salah satu macam dari jenis tanaman. Sedangkan pada waktu sawah tidak ditanami padi, biasanya penduduk desa menanam pesawahan mereka dengan tanaman ubi jalar, yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang keadaan wilayah Desa Pasanggrahan dan Desa Tanjungsari dapat dilihat pada peta di hal. 15, 17 dan 19.

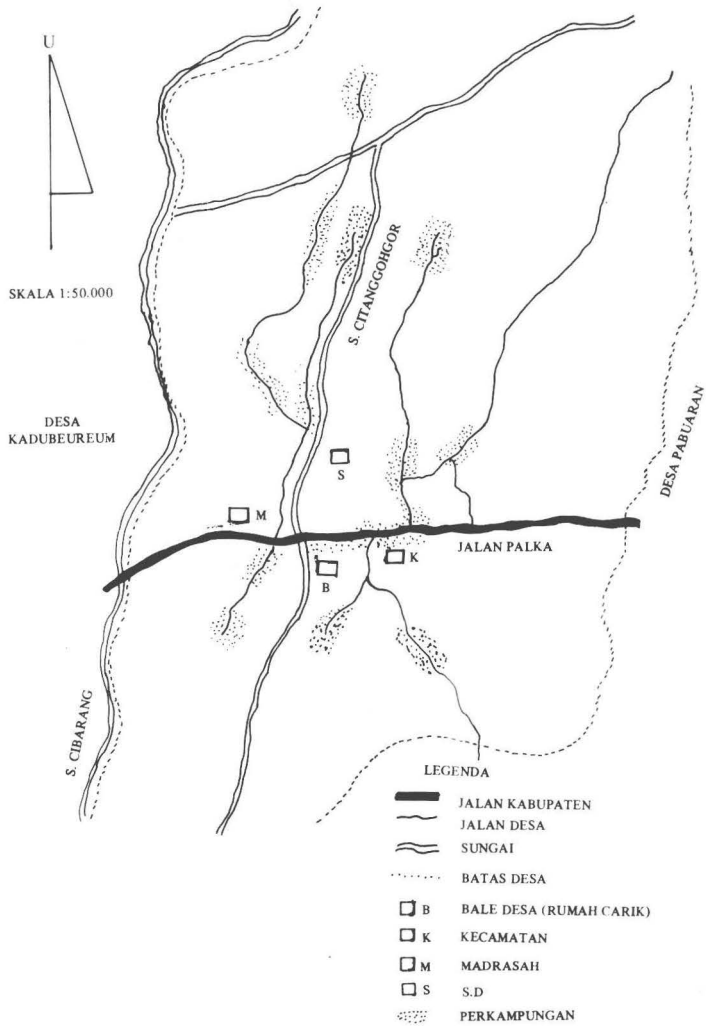
2. Keadaan Penduduk

Di kedua desa Pasanggrahan dan Tanjungsari data tentang bagaimana asal-usul dan perkembangan penduduk dari tahun ke tahun belum jelas. Monografi desa yang memuat data lengkap tentang kependudukan di kedua desa tersebut tidak dijumpai, di samping administrasi desa yang masih memerlukan pembinaan dan perbaikan dalam rangka pembangunan masyarakat desa.

Keterangan yang diberikan dari berbagai pihak, terutama dari para *kokolot* desa di kedua desa tersebut, menunjukkan bahwa penduduk desa, baik di Desa Pasanggrahan maupun di Desa Tanjungsari, pada umumnya merupakan penduduk asli atau penduduk yang dilahirkan dan dibesarkan hingga dewasa dan kemudian beranak cucu di daerah tersebut. Namun demikian, di antara mereka ada pula penduduk pendatang. Mereka pada umumnya adalah para pegawai negeri, seperti guru-guru dan petugas lain karena jabatan dan tugas mereka tinggal di kedua desa tersebut. Tetapi mereka ini termasuk kelompok kecil.

Desa Pasanggrahan yang meliputi sekitar 18 kampung, menurut keterangan *Carik*, memiliki sebanyak 2180 jiwa penduduk. Akan tetapi hingga laporan ini dibuat, di kantor desa (rumah Bapak *Carik*) belum ada statistik penduduk dan catatan lain yang berkaitan dengan keterangan mengenai Desa Pasanggrahan. Data-data dan monografi desa "masih disusun", kata Bapak *Carik*. Oleh karena itu maka data-data kependudukan yang akan disajikan dalam laporan ini adalah data-data yang terdapat di Desa Kadubeureum pada saat desa ter-

PETA DESA PASANGGRAHAN



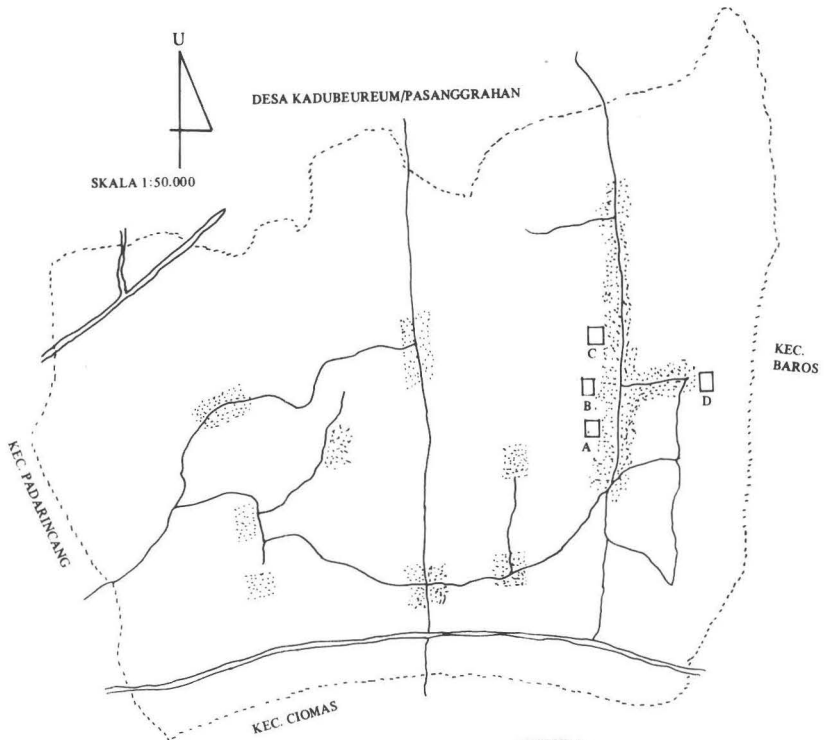
sebut belum dimekarkan. Sekedar untuk perbandingan pada halaman 20 dapat dilihat perincian penduduk di Desa Kadubeureum termasuk data Desa Pasanggrahan sebelum berdiri sendiri sebagai desa.

Menurut keterangan Bapak *Carik*, di Desa Pasanggrahan dan Tanjungsari "pertumbuhan penduduk, baik karena faktor pendatang maupun karena faktor kelahiran, tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan di daerah lain."

Keterangan tersebut cukup relevan dengan data-data yang diperoleh melalui kuesioner yang disebarakan kepada sejumlah penduduk yang masing-masing desa 100 orang responden. Hasil kuesioner tersebut menunjukkan data sebagaimana dapat dilihat pada halaman 21.

Kalau kita lihat angka-angka pada hal. 21 nanti, agaknya kesadaran memiliki jumlah anak yang relatif sedikit telah ada pada masyarakat di kedua desa tersebut. Hal ini diperkuat dengan kenyataan bahwa umur semua responden di antara 25–50 tahun telah kawin. Kebiasaan menjarangkan kelahiran anak, menurut keterangan Bapak *Carik*, di kedua desa tersebut karena kebiasaan penduduk yang selalu memperhatikan waktu dan jarak kelahiran, manakala mereka

PETA DESA TANJUNGSARI



LEGENDA :

- JALAN KABUPATEN
- JALAN DESA
- PERKAMPUNGAN
- BATAS DESA
- A BALE DESA
- B MASJID
- C MADRASAH
- D PESANTREN

Tabel 2
Perincian Penduduk Di Desa Kadubeureum
(termasuk Desa Pasanggrahan)
Dan Desa Tanjungsari

				Desa Tanjungsari		
U s i a	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
0- 4	256	324	580	—	—	—
0- 5	—	—	—	229	288	517
5- 9	207	293	500	—	—	—
6-14	—	—	—	266	291	577
10-14	176	240	416	—	—	—
15-19	290	315	605	106	144	250
20-24	303	320	623	—	—	—
20-25	—	—	—	140	124	264
25-29	212	260	472	—	—	—
26-40	—	—	—	106	162	262
30-34	170	210	380	—	—	—
31-39	—	—	—	235	218	516
35-39	123	159	282	—	—	—
40-44	75	99	174	—	—	—
45-54	65	88	157	—	—	—
50-54	53	75	128	—	—	—
55-59	42	62	104	—	—	—
60-64	35	42	78	—	—	—
60 ke atas	—	—	—	65	155	180
65 ke atas	21	25	46	—	—	—
Jumlah	2032	2513	4445*	1147	1405	2566

Sumber: Monografi Desa Kadubeureum, 1982 dan Desa Tanjungsari, 1983

* Jumlah penduduk Desa Kadubeureum sekarang ada sekitar 2265 jiwa, setelah dikurangi jumlah penduduk Desa Pasanggrahan sekitar 2180 jiwa.

Tabel 3
Jumlah Anak Yang Dimiliki Sampel Di Desa
Pasanggrahan Dan Desa Tanjungsari
Masing-masing Desa : N = 100

Jumlah anak	Desa Pasanggrahan	Desa Tanjungsari
Tidak punya anak	6	1
1	9	6
2	16	16
3	13	16
4	14	20
5	11	13
6	16	19
7	9	9
8	2	—
9	2	—
10	—	—
11	1	—
12	1	1
Jumlah	100	100

Sumber : Diolah dari Kuesioner dan Hasil Observasi, 1983.

melepaskan masa bujang atau gadis. Memelihara jarak kelahiran anak-anak mereka itu dilakukan melalui cara-cara tradisional, seperti, antara lain kebiasaan di kalangan ibu-ibu "meminum air beras-kencur dicampur dengan ragi". Ramuan ini menurut keterangan ibu-ibu di desa Pasanggrahan dan Tanjungsari memiliki hasiat menjarangkan kelahiran anak. Adapun cara membuat ramuan tersebut adalah: "beras dan kencur ditumbuk, kemudian ditambah ragi secukupnya, lalu diaduk dengan air dan disaring dulu sebelum diminum".

Faktor lain yang memungkinkan jarangnyanya kelahiran di kalangan penduduk desa tersebut, adalah kesibukan bekerja, baik di antara laki-laki maupun perempuan. Mereka bekerja di sawah, ladang, dan kebun dari pagi hingga sore hari. Biasanya penduduk di kedua desa tersebut bekerja sejak pukul 06–11.00. Mereka istirahat hingga pukul 12.00 untuk makan siang dan sembahyang *dhuhur*. Biasanya laki-laki bersembahyang berjamaah di mesjid atau langgar kampung setiap hari dan setiap waktu shalat. Kemudian mereka kembali bekerja hingga sekitar pukul 15.00 atau 16.00. Mereka pulang ke rumah sore hari memburu sembahyang *azar*. Setelah sembahyang magrib mereka tidak langsung pulang ke rumah masing-masing, tetapi mereka lanjutkan dengan pengajian bersama. Biasanya mereka membaca surat *Jassin* hingga sembahyang *isya* tiba sekitar pukul 20.00. Jadi pada saat mereka pulang ke rumah masing-masing, mereka sudah cukup lelah dan biasanya mereka terus tidur. Mereka adalah petani-petani yang rajin. Baik laki-laki maupun perempuan bekerja bersama di sawah, ladang, dan kebun mereka sejak pagi hari. Sekitar pukul 05.00 mereka biasa sudah bangun untuk bersembahyang subuh dan mempersiapkan pekerjaan lagi. Demikianlah irama kehidupan masyarakat Desa Pasanggrahan dan Tanjungsari itu.

Selanjutnya, faktor lain yang memungkinkan jarangnyanya kelahiran di antara keluarga dari masyarakat tersebut adalah menunda perkawinan sampai mas kawin mencukupi menurut ukuran adat kebiasaan mereka. Biasanya di antara orang tua, khususnya orang tua pihak perempuan, mencari jodoh untuk anaknya. Sementara calon suami gadis tersebut belum cukup umur untuk hidup berumah-tangga, biasanya di antara mereka dilakukan apa yang mereka namakan "*kawin gantung*". Dalam bentuk perkawinan semacam ini hanya sekedar mengikat janji. Pada periode ini mereka tidak diperkenankan oleh adat hidup sebagai suami-isteri. Dan perkawinan nanti dapat dilangsungkan apabila mas kawin telah dianggap cukup oleh pihak keluarga perempuan. Adapun bentuk mas kawin itu antara lain (sekarang) dapat berupa wang atau benda lain, seperti dalam bentuk perhiasan dari mas dan berlian, atau juga ternak, seperti kerbau (*kebo*). Faktor lain yang memungkinkan jarangnyanya kelahiran di kalangan penduduk di kedua desa tersebut adalah pada akhir-akhir ini, sekitar tahun 1980 dan 1981, kegiatan program keluarga berencana telah masuk ke desa Pasanggrahan dan Tanjungsari. Melalui berbagai penerangan yang dilakukan ibu Lurah dan petugas KB, agaknya, telah menambah kesadaran para warga desa dalam usia

muda akan pentingnya menjarangkan kelahiran demi untuk kebahagiaan dalam kehidupan keluarga.

3. Sejarah Pemerintahan Desa

Dalam membicarakan sejarah pemerintahan desa Pasanggrahan agaknya tidak bisa terlepas dari desa induknya yaitu desa Kadubeureum yang telah berdiri sejak jaman Belanda dulu. Menurut berbagai penjelasan *kokolot* desa, pada masa itu pemilihan kepala desa di daerah Banten dilakukan dengan sistem tunjuk. Penunjukan ini sejalan dengan usaha pemerintah Belanda pada masa itu untuk menguasai rakyat, karena kekerasan masyarakat dalam menentang penjajahan Belanda. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah Belanda baru mulai berkuasa di daerah Banten sekitar tahun 1809. Sejak itu di daerah Banten terjadi beberapa perubahan teritorial dari sistem kerajaan kepada sistem pemerintahan kolonial. Hal ini dilakukan pemerintah Belanda dulu dalam usaha memudahkan pengawasan terhadap rakyat Banten yang cenderung memiliki sifat menentang penjajahan (Effendi, 1979: 10).

Secara tradisional di daerah Banten, kepala desa itu biasa pula disebut *jaro*. Kata *jaro* memiliki pengertian yang sama dengan kata *juragan* di daerah Priangan. Artinya kata tersebut merupakan kata panggilan terhadap orang yang dihormati. Pada masa pemerintahan Belanda dulu, apabila seorang *jaro* dapat menunjukkan jasa dan kesetiaan yang luarbiasa kepada pemerintah Belanda, maka *districshoofd* (setingkat dengan wedana sekarang) dapat memberikan penghargaan dan mengangkatnya menjadi lurah. Dalam jabatan ini bukan saja ia berkuasa di desanya, tetapi juga memiliki kekuasaan pada beberapa orang *jaro* yang bekerja di bawahnya. Proses pengangkatan seorang *jaro* menjadi seorang lurah biasanya, dilakukan dalam suatu rapat *district*. Di hadapan banyak kepala desa di *district* yang bersangkutan, maka Wedana sebagai kepala *district* menjelaskan semua jasa *jaro* yang telah dilakukannya untuk kepentingan pemerintah. Namun demikian pengangkatan *jaro* menjadi seorang lurah, sebenarnya tidak ditentukan oleh peraturan (*Wet*) dan tidak pula ada Surat Keputusan (SK). Ini semata-mata hanya merupakan kehormatan saja (Djajadiningrat, 1936: 157). Dari penjelasan di atas, agaknya pada masa pemerintah Belanda dulu ada perbedaan status dan wewenang serta fungsi antara kepala desa (*jaro*) dengan lurah, dimana pada masa sekarang, orang cenderung untuk tidak membedakannya.

Di Desa Kadubeureum, dimana termasuk di dalamnya wilayah Desa Pasanggrahan sekarang, orang pertama yang ditunjuk pemerintah Belanda untuk menjadi kepala desa adalah Haji Muhammad. Sejak kapan ia ditunjuk oleh pemerintah Belanda dulu tidak ada orang yang ingat lagi. Berdasarkan berbagai keterangan para *kokolot* desa, ia menjadi Kepala Desa hingga sekitar tahun 1939. Penggantinya adalah Haji Usman yang aktif sampai tahun 1949. Haji Usman adalah keponakan Haji Muhammad.

Selama menjadi kepala desa, Haji Usman mengalami tiga masa pemerintahan, yaitu pada masa pemerintahan Belanda, Jepang dan Republik. Sejak masa Republik inilah prosedur pengangkatan kepala desa mengalami perubahan. Kepala desa tidak lagi ditunjuk, tetapi dipilih oleh masyarakat. Sejak itulah istilah kepala desa diganti namanya menjadi lurah. Melalui sistem pemilihan tersebut, maka terpilih lah seorang tokoh masyarakat bernama Aki Jubaedi. Ia menjabat kepala desa sejak tahun 1949 hingga tahun 1965. Aki Jubaedi hingga sekarang masih hidup berusia sekitar 66 tahun, tinggal di kampung Kadubangan. Sekarang ia merupakan salah seorang *kokolot* desa di Desa Pasanggrahan. Ia dikenal masyarakat dengan sebutan Aki Jubaedi. Menurut pengakuannya ia masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Haji Usman.

Peranan *kokolot*, baik di desa Pasanggrahan maupun di desa Tanjungsari, sangat dominan. Hal ini dapat kita lihat antara lain dalam peran yang dilakukan para *kokolot* desa di dalam proses pemilihan lurah. Secara tradisional proses "permainan" pemilihan lurah, baik yang biasa dilakukan di desa Kadubeureum (termasuk di dalamnya desa Pasanggrahan) maupun di desa Tanjungsari, adalah sebagai berikut: Dalam tahap mempersiapkan calon lurah, biasanya para *kokolot* desa yang merupakan tokoh-tokoh masyarakat yang disegani di kedua desa tersebut menyelenggarakan rapat tertutup untuk melakukan *penggodogan* di antara calon yang akan ditampilkan. Jadi para *kokolot* inilah yang mengatur calon lurah yang bakal maju dalam pemilihan nanti. Setelah para *kokolot* menentukan calon yang memenuhi persyaratan, baik dari segi kualitas maupun persyaratan lain, maka barulah ditentukan hari pemilihan lurah. Sebelum diadakan pemilihan tersebut, anggota masyarakat telah diberitahukan calon yang harus dipilih, sesuai dengan pilihan para *kokolot* tersebut. Setelah pemilihan selesai, barulah calon lurah terpilih itu dilaporkan kepada bupati untuk di-SK-kan. Lurah terpilih

itu memegang jabatan untuk selama 8 tahun dan boleh dipilih kembali. Sehubungan dengan begitu besar peranan dan pengaruh yang dimainkan para *kokolot* desa, maka di kalangan anak-anak muda sekarang di kedua desa tersebut, sering terdengar julukan bagi para *kokolot* tersebut "raja tanpa mahkota".

Sekarang, dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1979 yaitu Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa, maka istilah kelurahan hanya berlaku (digunakan) di desa dalam kota, kepala kelurahan (lurah) tidak lagi dipilih, tetapi diangkat dan diberhentikan oleh bupati/kepala daerah dengan imbalannya berupa gaji. Sedangkan di desa-desa luar kota istilah kepala desa berlaku kembali disamping sebutan lurah, dan penjabat ini tetap dipilih masyarakat.

Di Desa Kadubeureum pada tahun 1965 diadakan lagi pemilihan lurah baru. Haji Muhammad Syafe'i terpilih sebagai lurah baru menggantikan Aki Jubaedi. Hingga sekarang Haji Mohammad Syafe'i masih memegang jabatan lurah. Antara Haji Syafe'i dengan Aki Jubaedi masih terjalin hubungan kekeluargaan.

Sehubungan dengan jumlah penduduk yang cukup banyak dan wilayah desa Kadubeureum yang cukup luas, maka melalui Surat Keputusan (SK) Bupti/Kepala Daerah Tingkat II Serang, dengan nomor 270a/'82, tanggal 20 September 1982 maka desa Kadubeureum mengalami pemekaran. Desa Kadubeureum dipecah menjadi dua: desa Kadubeureum dan Desa Pasanggrahan. Desa yang disebut terakhir merupakan ibukota kecamatan mengganti kedudukan desa induknya. Adapun batas desa antara desa Kadubeureum dengan desa Pasanggrahan adalah sungai Ciborang (lihat peta pada halaman 15 dan 17).

Untuk sampai kepada keputusan nama desa baru itu telah diadakan suatu undian di antara nama-nama yang diusulkan adalah: "Sampiran", "Kadubangban", dan "Pasanggrahan" yang menang dalam undian tersebut dan digunakanlah sebagai nama desa pemekaran tersebut.

Adapun nama "Pasanggrahan" tersebut diusulkan oleh Makrawi Sukmawidjaja, Penilik Kebudayaan Kecamatan Pabuaran. Nama desa Pasanggrahan dilatarbelakangi oleh suatu peristiwa pada masa lalu. Pada masa kekuasaan Jepang di Indonesia, di kampung yang sekarang bernama Pasanggrahan telah dibangun penggilingan batu dan beberapa *barak* untuk para pekerja paksa (romusha). Sejak saat itu kampung tersebut bernama Pasanggrahan, artinya tempat tinggal sementara

dari para *romusha* tersebut. Alasan lain, menurut keterangan Makrawi Sukmawidjaja, adalah di desa tersebut terdapat sebuah SD (Sekolah Dasar) Inpres bernama Pasanggrahan. Orang yang dapat kepercayaan untuk menjabat Kepala Desa Pasanggrahan itu adalah Satibi, adik kandung Haji Mohammad Syafe'i, Kepala Desa Kadu-beureum sekarang.

Desa Tanjungsari yang merupakan daerah pedalaman dari Kecamatan Pabuaran, menurut berbagai keterangan para *kokolot* desa, berasal dari dua nama Tanjung Kulon dan Tanjung Wetan. Nama Tanjung Kulon sekarang masih digunakan untuk menyebut salah satu kampung dalam wilayah desa ini yang terletak di sebelah barat. Sedangkan nama Tanjung Wetan digunakan untuk menyebut sebuah kampung yang terletak di sebelah timur. Nama lain yang biasa digunakan masyarakat setempat untuk Tanjung Kulon adalah Tanjung Luhur. Sebutan ini mungkin untuk menunjukkan bahwa Tanjung Kulon terletak di bagian dataran tinggi, sedangkan Tanjung Wetan terletak di bagian dataran rendah.

Nama desa Tanjungsari yang merupakan gabungan kedua nama tersebut di atas, menurut keterangan para *kokolot* desa digunakan sejak pemerintahan Belanda dulu. Desa ini memiliki asal-usul yang cukup unik. Menurut ceritera para *kokolot* desa, pada masa lalu, pada saat Sultan Ageng Tirtajasa, dikenal pula dengan sebutan Sultan Banten berkuasa di daerah Banten, kampung Tanjungsari adalah merupakan tempat peristirahatan Sultan.

Kemudian, pada saat Banten menghadapi kekuatan Belanda, desa Tanjungsari digunakan oleh Sultan Ageng Tirtajasa sebagai tempat berunding dalam menghadapi perlawanan terhadap Belanda. Dan daerah ini pula digunakan sebagai pertahanan terakhir dari ancaman kekuasaan kolonial Belanda.

Bagaimana keadaan desa pada awal pertumbuhannya tidak banyak orang mengetahui. Menurut keterangan Haji Jana salah seorang *kokolot* desa Tanjungsari, "paling tidak di daerah ini sudah ada penduduk dalam kelompok-kelompok kecil (kampung) sejak jaman pemerintahan Maulana Hasanudin (Sultan Banten) sekitar abad ke-16". Pada masa itu daerah yang sudah tergolong ramai adalah Ciomas di sebelah barat desa Tanjungsari sekarang. Daerah Ciomas dikenal waktu itu sebagai tempat orang-orang pemberani, yang dikenal sekarang dengan sebutan "*jawara*". Dan mungkin penduduk yang paling dahulu datang ke daerah sekitar desa Tanjungsari

sekarang berasal dari daerah Ciomas. Masyarakat desa Tanjungsari hingga sekarang mengakui bahwa "Ciomas itu merupakan huluna Banten". Dimaksudkan dengan ungkapan "*huluna*" tersebut adalah mereka mengakui bahwa Ciomas itu merupakan pusat kebudayaan masyarakat Banten. Kumpulan dari beberapa kampung itulah yang kemudian sekarang membentuk desa Tanjungsari.

Selanjutnya Haji Jana mengemukakan bahwa pemimpin masyarakat desa masa lalu biasanya diambil dari orang-orang yang dikenal memiliki keberanian. Pemimpin masyarakat desa sebagaimana dikemukakan di atas itu dalam lingkungan desa Tanjungsari dinamakan "*jaro*", di samping biasa pula disebut kepala desa.

Dari beberapa keterangan yang diberikan oleh para *kokolot* desa, kepala desa pertama yang ditunjuk pemerintah Belanda di desa Tanjungsari adalah Haji Adung. Ia seorang tokoh yang dihormati masyarakat dan disegani pemerintah Belanda. Kapan ia mulai memegang jabatan kepala desa, tidak ada orang yang mengetahuinya. Menurut keterangan para *kokolot* desa, ia memegang jabatan itu hingga sekitar tahun 1920-an. Kemudian ia diganti oleh Haji Sarwan yang memegang jabatan kepala desa hingga sekitar tahun 1930-an. Bagaimana hubungan kekeluargaan kedua orang tersebut para *kokolot* desa tidak ada yang mengetahuinya. Selanjutnya, kepala desa yang menggantikan Haji Sarwan adalah Haji Dul Patah. Ia memegang jabatan Kepala Desa hingga sekitar tahun 1940-an. Antara Haji Sarwan dengan Haji Dul Patah masih terdapat hubungan kekeluargaan. Haji Dul Patah adalah adik Sarwan. Kemudian, Haji Sadik menggantikan Haji Dul Patah sebagai kepala desa. Ia memegang jabatan tersebut hingga sekitar tahun 1950-an. Ia adalah adik Haji Dul Patah. Kepala Desa Tanjungsari berikutnya adalah Haji Dul Rajak. Kepala Desa ini tidak mampu bertahan lama, baru sekitar 2 atau 3 tahun saja sudah diganti oleh Haji Rajik. Haji Dul Rajak dianggap sebagai orang luar desa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan tokoh-tokoh (*kokolot*) desa. Demikian pula ia tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan para bekas kepala desa di desa tersebut. Kemudian Haji Rajik menggantikan kedudukannya sebagai kepala desa hingga sekitar tahun 1960-an. Sejak itu hingga sekarang jabatan kepala desa dipegang oleh Goji, keponakan Haji Rajik. Sedangkan Haji Rajik adalah adik Haji Sadik bekas kepala desa terdahulu.

Apakah syarat-syarat yang perlu dimiliki oleh seorang kepala desa? Menjawab pertanyaan ini para *kokolot* desa yang lebih dominan dari golongan masyarakat lain dalam turut mengatur para calon kepala desa mengemukakan bahwa: seseorang yang dalam pola perilakunya memegang agama yang kuat; ada keturunan dari pemimpin sebelumnya sifat arif, bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik harus dekat dengan masyarakat yang dipimpinnya; harus berani dan tegas dalam tindakan. Menurut anggapan para *kokolot* desa, faktor keturunan akan selalu mereka perhitungkan dalam usaha melestarikan kedudukan keluarga di dalam jabatan kepala desa. Berdasarkan informasi tersebut, dari kepala desa yang satu ke kepala desa yang lain selalu akan diusahakan jalinan hubungan kekeluargaan. Dan kenyataan menunjukkan bahwa kepala desa yang tidak memiliki kaitan kekeluargaan dengan kepala desa sebelumnya, sebagaimana dialami oleh Haji Dul Rajak, tidak mungkin dapat bertahan lebih lama dalam jabatan tersebut.

Selanjutnya, pendapat para *kokolot* desa tentang syarat-syarat yang perlu dimiliki kepala desa, juga sejalan dengan keinginan masyarakat yang tercermin dalam jawaban mereka terhadap pertanyaan yang sama sebagaimana dikemukakan di atas. Jawaban masyarakat tersebut dapat dilihat dalam tabel pada halaman 29.

Menarik sekali atas pilihan jawaban terhadap "pandai berpidato" di kalangan masyarakat desa Tanjungsari, sebagai salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang kepala desa. Hal ini mungkin disebabkan jalan pikiran mereka bahwa seorang kepala desa juga seorang "pemimpin" yang bertanggungjawab membimbing umat manusia untuk bertindak sesuai dengan perintah Allah. Jadi, menurut

Tabel 4.
Syarat-Syarat Yang Perlu Dimiliki Seorang
Kepala Desa* (masing-masing desa N = 100)

Pendapat Masyarakat	Desa Pasanggrahan (%)	Desa Tanjungsari (%)
Bijaksana	30,5	21,2
Dapat mengambil keputusan	15,3	21,2
Tegas dalam tindakan	12,1	20,2
Bergaul akrab dengan masyarakat	34,7	21,2
Kaya	2,6	0,2
Pemberani	2,1	0,2
Pandai berpidato	1,6	15,4
Mempunyai kekuatan gaib	—	0,5
Lain-lain	1,1	—
Jumlah	100,0	100,0

Sumber: Diolah dari Kuesioner dan Hasil Observasi, 1983.

* Faktor keturunan tidak dimasukkan dalam pertanyaan ini.

anggapan masyarakat, seorang kepala desa juga dituntut untuk turut aktif melakukan penerangan-penerangan dan bimbingan dalam bidang keagamaan. Untuk itu ia harus pandai berdakwah. Dan aktivitas berdakwah ini memerlukan kepandaian dalam berpidato.

4. Latar Belakang Sosial Budaya

Mata pencaharian pokok masyarakat desa Pasanggrahan dan Tanjungsari adalah bertani di sawah dan ladang, di samping mereka juga melakukan bercocok tanam di kebun menanam palawija. Mereka itu

selain menanam padi di sawah dan ladang, juga menanam kopi, cengkeh, petai, durian, jengkol, melinjaw dan pisang. Mereka menanam tanaman tersebut dalam sistem *multi-crops*, sehingga sepanjang tahun mereka dapat memetik hasil dan menjualnya langsung ke pasar terdekat atau menjual pada tengkulak yang datang ke kebun mereka.

Sekedar untuk memberikan gambaran tentang berbagai bentuk pekerjaan yang dapat dilakukan oleh masyarakat desa di bawah ini kai sajikan beberapa catatan yang terdapat di desa Kadubeureum (termasuk di dalamnya desa Pasangrahan), dimana catatan seperti itu tidak terdapat dalam monografi desa Tanjungsari.

Tabel 5.
Perincian Pekerjaan Pokok Penduduk
Desa Kadubeureum

Jenis Pekerjaan	Jumlah	Keterangan
Pemilik sawah	508	
Petani penggarap	375	
Berkebun	85	
Pedagang	218	
Buruh	90	
Pertukangan	12	
Pencari hasil hutan	4	
Penangkap ikan darat	3	
Industri ringan	1	
Peternak	1	
Lain-lain	12	
J u m l a h	1.361	

Sumber: Monografi Desa Kadubeureum, 1982

Sebelum dimekarkan dengan Desa Pasangrahan.

Kehidupan masyarakat Desa Kadubeureum dan Tanjungsari relatif lebih makmur bila dibandingkan dengan daerah lain di wilayah Kabupaten Serang. Pendapatan mereka rata-rata tiap tahun bervariasi di antara Rp. 90.000,00 sampai sekitar Rp.500.000,00. Besarnya penghasilan ini tergantung dari luas garapan tanah masing-masing orang.

Baik di desa Pasanggrahan maupun di Desa Tanjungsari terdapat beberapa cara dalam menggunakan tenaga kerja untuk mengolah sawah atau ladang dan kebun mereka. Cara-cara itu antara lain dalam bentuk *royongan* (gotong-royong). Bentuk kerja semacam ini dapat untuk kepentingan pribadi, seperti menggarap (mengolah) sawah atau ladang dan kebun secara bergilir di antara kelompok masyarakat yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Dalam aktivitas ini tiap anggota kelompok memperoleh sekedar imbalan berupa wang yang jumlahnya tidak ditentukan. Akan tetapi wang tersebut tidak digunakan oleh anggota masyarakat yang terlibat dalam aktivitas tersebut, tetapi dikumpulkan oleh seorang *kokolot* desa dan digunakan untuk biaya perbaikan langgar kampung atau mesjid desa. Aktivitas lain dalam bentuk *royongan* adalah mengerjakan tugas-tugas kepentingan umum (memperbaiki jalan, jembatan, sekolah/madrasah, dan lain-lain). Kegiatan semacam ini biasanya dilakukan dua kali tiap minggu, ialah hari Rabu dan Minggu.

Di Desa Tanjungsari, setiap kepala keluarga yang tidak mengikuti (absen) dalam kegiatan *royongan* untuk kepentingan umum dikenakan denda Rp.1000,00 tiap kali absen. Aktivitas sosial masyarakat dilakukan dari mulai hari Senin hingga Minggu, kecuali hari Jum'at yang merupakan hari libur bagi masyarakat di kedua desa tersebut.

Bentuk pengerahan tenaga kerja lainnya adalah *liliuran*. Secara bergilir mereka saling membantu mengolah sawah/ladang atau kebun tanpa mendapatkan imbalan apa-apa. Bentuk kerja ini secara populer biasa disebut semacam gotong-royong spontan. Namun sekarang, baik di desa Pasanggrahan maupun di Desa Tanjungsari telah ada buruh tani yang bekerja mulai pukul 07.00 sampai pukul 11.00, dengan upah sebesar Rp.500,00 (ditambah satu kali makan). Bila tanpa makan, upah diberikan sebesar Rp.600,00 (*ngalagis*).

Baik laki-laki maupun perempuan bekerja di kebun. Para kiyai yang mempunyai pesantren, dibantu oleh para santri secara sukarela (*nyelang*). Tugas perempuan yang khas di pedesaan bersama anak-

anak mereka adalah mencari kayu bakar di hutan dan *ngored* atau *nyasap* (membersihkan ladang atau halaman).

Ada kebiasaan di Desa Tanjungsari ialah orang yang pergi ke pasar untuk berbelanja adalah laki-laki (suami), dan laki-laki pula yang menentukan barang-barang yang perlu dibeli untuk makan dan perlengkapan lain. Biasanya penduduk Desa Tanjungsari pergi ke pasar kecamatan atau ke pasar kabupaten di Serang atau Pandeglang seminggu atau dua minggu sekali. Menjawab pertanyaan mengapa tidak ibu atau bersama ibu dan bapak pergi ke pasar. Seorang penduduk desa mengemukakan "*isteri mah ngan kantun ngadahar* (bagi wanita hanya tinggal makan saja)." Ungkapan ini menunjukkan pandangan masyarakat desa tersebut terhadap kedudukan wanita yang dianggap lemah dan perlu dilindungi (tinggal di rumah saja, pergi ke pasar adalah perjalanan berbahaya).

Pandangan demikian menempatkan kedudukan wanita lebih rendah dari laki-laki.

Pekerjaan lain di luar buruh tani adalah menjadi tukang. Tukang kayu dan tukang tembok dibayar sekitar Rp.2.500,00/hari dengan makan. Pembantu kedua tukang itu diberi upah sekitar Rp.1000,00. Mereka mulai bekerja pukul 08.00 – 16.00.

Pada waktu senggang biasanya masyarakat desa memanfaatkan waktunya dengan membuat keranjang dari anyaman bambu untuk menyimpan padi dari sawah atau ladang. Keranjang itu mereka namakan *cagut*. Ada pula yang memanfaatkan waktu luang mereka, dengan bekerja di tempat lain, sekedar untuk mencari tambahan penghasilan kebutuhan sehari-hari. Bentuk pekerjaan demikian biasa mereka sebut *maisah*.

Dari keuntungan pertanian, mereka menutupi kebutuhan sehari-hari, perbaikan rumah, dan perjalanan ke tanah suci (makah) untuk menunaikan ibadah haji. Suatu perjalanan yang sangat mereka cita-citakan.

Penduduk desa Pasanggrahan dan desa Tanjungsari merupakan penganut agama Islam yang kuat. Mereka dengan tekun menjalankan syariat Islam, seperti sembahyang lima kali, puasa, pengajian di langgar-langgar dan mesjid desa dan menunaikan ibadah haji. Pengajian pada malam Jum'at dilaksanakan mulai pukul 08.00 – 11.00 biasa diikuti oleh laki-laki, perempuan dan anak-anak, dan juga dilakukan pada Senin malam. Pengajian campuran ini biasa disebut *ngabasing*.

Aktivitas keagamaan yang dilakukan masyarakat kedua desa tersebut membawa pengaruh yang positif dalam usaha pembangunan mental dan spiritual. Sebagaimana yang kami lihat pada malam menjelang tanggal 17 Agustus 1983 yang lalu, selama satu minggu secara terus menerus di tiap mesjid dan langgar diselenggarakan pengajian bersama (*tahlil* menurut sebutan mereka; pengajian bersama di daerah Priangan biasa disebut *wiridan*) untuk mendoakan keselamatan bangsa dan negara. Yang dibacakan pada kesempatan itu ialah Surat Yassin. Aktivitas ini diselenggarakan atas petunjuk dan bimbingan para *kokolot* desa. Menurut keyakinan masyarakat, demikian pula para *kokolot* desa, Surat Yassin itu membawa banyak berkah (*barokah*). Sudah menjadi kebiasaan penduduk tiap malam membaca surat tersebut sampai sebanyak 2–3 kali tiap orang. Dan tiap malam Jum'at dan malam Selasa biasanya mereka membaca sampai 4 kali, bahkan dalam keadaan genting (seperti kemarau panjang, terjadi ketegangan-ketegangan), mereka membaca surat tersebut hingga sebanyak 15–30 kali.

Masyarakat Desa Pasanggrahan dan Tanjungsari, disamping taat kepada agama Islam, juga mereka masih mempertahankan kepercayaan yang berhubungan dengan kepercayaan lama (sebelum Islam). Bentuk kepercayaan itu antara lain kebiasaan masyarakat melakukan ziarah (mengunjungi) *makam* (*kuburan*) yang mereka anggap keramat. Di Desa Tanjungsari dapat dijumpai "makam keramat" dari para pengikut dan tentara Sultan Ageng Tirtayasa. Makam yang dianggap keramat oleh masyarakat Banten yang ada di sekitar desa Tanjungsari, antara lain makam Ki Jata, Ki Bao, Ki Cengceng, Ki Jenggot Raweng, Ki Imam dan Ki Ilham, yang terletak di kampung Cisitu. Makam Ki Misraya di Gunung Sewu, makam Ki Mas Raksanagara dan Ki Mas Jaganagara di kampung Cibantar, makam Ki Nalir di kampung Ciapit (Pagedangan), dan makam Nyi Mas Gamparan Bojong di kampung Cisitu. Tokoh Nyi Mas Gamparan ini sangat terkenal di kalangan masyarakat desa Tanjungsari. Ia seorang tokoh wanita dari kampung Balaraja yang memberontak kepada Belanda sekitar tahun 1830. Menurut keterangan orang-orang di sekitar desa Tanjungsari, Nyi Mas Gamparan "menentang kaum *menak* (ningrat) yang anti kerakyatan". Pemberontakan ini kemudian dapat dipadamkan Belanda dengan bantuan bumiputera. Nyi Mas Gamparan dapat ditangkap oleh Raden Natanegara. Sebagai hadiah Raden Natanegara kemudian diangkat menjadi Bupati Lebak

(Effendi, 1979: 26). Hingga kini, masyarakat Desa Tanjungsari tidak mempercayai bahwa Nyi Mas Gamparan telah meninggal dunia. Masyarakat menganggap bahwa ia *ngusumah* (menghyang), dan pada suatu ketika akan datang kembali ke dunia untuk memimpin dan melindungi masyarakat dari berbagai kesulitan hidup. Masyarakat juga percaya bahwa pada saat desa dilanda musibah atau kesulitan, Nyi Mas Gamparan akan selalu membantu dan melindungi masyarakat desa tersebut. Bahkan menurut ceritera lurah, pada saat kantor desa didirikan dan masyarakat bergotong-royong mengangkut batu untuk fondasi dan tembok bangunan desa, Nyi Mas Gamparan ikut bekerja membantu masyarakat desa hingga pekerjaan cepat selesai. Sampai sekarang, pada suatu tempat yang sunyi di kampung Cisu, menurut keterangan penduduk, bekas tempat nyepi Nyi Mas Gamparan banyak dikunjungi orang yang berziarah. Biasanya para pengunjung yang datang ke tempat itu membaca Surat Al Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al Iklas (3X), zikir (30X), dan mengucapkan bermacam doa. Kemudian mandi di sebuah mata air yang keluar dari bagian bawah tempat duduk menyepi Nyi Mas Gamparan. Air tersebut biasa disebut "*cai wasiat*" (air wasiat). Tidak jauh dari tempat itu ada sebuah *pancuran* yang memiliki khasiat dapat menyembuhkan penyakit kuning pada orang yang mandi di pancuran tersebut. Pancuran itu bernama *Pancuran Cita-miang*.

Di Desa Pasanggrehan ada dua buah makam yang dianggap keramat oleh penduduk desa tersebut. Makam keramat tersebut adalah makam Ki Damiah dan Ki Gaceng anggapan masyarakat setempat, Ki Damiah pada masa lalu adalah seorang tokoh agama Islam yang dianggap masyarakat sebagai *Wahyullah* di daerah Pasanggrehan. Sampai sekarang makam itu masih dianggap keramat oleh penduduk setempat. Menurut kepercayaan masyarakat, bila orang telah berziarah ke makam itu maka apa yang ia minta bakal terkabul. Biasanya, orang yang akan pergi berziarah ke makam itu meminta izin dulu kepada Haji Satrai seorang *kokolot* desa di Desa Pasanggrehan, yang ia akui bahwa ia masih keturunan langsung Ki Damiah tersebut.

Selanjutnya, Ki Gaceng, diakui masyarakat, bahwa pada masa hidupnya dulu, sebagai seorang pejuang yang gugur dalam menghadapi tentara Kompeni (Belanda). Menurut ceritra Haji Zamra. Ki Gaceng hidup dalam jaman pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Diakuinya bahwa Ki Gaceng itu merupakan salah seorang leluhur

Haji Zamra. Di kalangan masyarakat Haji Zamra dikenal sebagai seorang jawara dan juga ulama yang kini ia juga bertindak sebagai salah seorang *kokolot* desa di Desa Pasanggrihan.

Masyarakat Desa Tanjungsari memiliki semacam kepercayaan tentang kejadian pada hari depan (di Priangan biasa disebut *uga*) di Desanya. Menurut kepercayaan masyarakat desa ramalan nenek moyang mereka yang telah terbukti kebenarannya antara lain: "Di antara Tanjung Kulon dan Tanjung Wetan akan tumbuh dan berkembang sebuah kampung yang ramai." Menurut anggapan masyarakat "kebenaran ramalan tersebut adalah bukti bersatunya Tanjung Kulon dan Tanjung Wetan dalam bentuk desa Tanjungsari sekarang." Kemudian, kata mereka ramalan keramaian itu juga terbukti, dengan banyak rumah dan sekolah, serta banyak tamu dari luar desa untuk bertemu dengan Abah Machmud dan belajar mengaji di pesantren." Agaknya, ramalan tentang akan terbentuknya desa Tanjungsari yang ramai sudah menjadi bagian dari kepercayaan masyarakat desa yang bersangkutan. Mereka percaya bahwa perubahan yang terjadi dalam lingkungan hidup mereka, di samping sebagai berkah Tuhan Yang Maha Esa, juga merupakan pertanda akan kebenaran ramalan nenek moyang mereka masa lalu.

Sekarang, di Kampung Kadukacapi, di desa Tanjungsari ada sebuah gong yang mereka anggap keramat. Gong tersebut biasa disebut masyarakat dengan sebutan "Gong Si Parayoga". Kisah "Gong" tersebut menurut Jakri, yang mengaku dirinya masih keturunan Sultan Banten adalah: Gong ini merupakan salah satu peralatan untuk *panayagan* (apakah dalam nada *saldendro* atau *pelog* tidak diketahui). Pada saat gong ini dipukul Sultan tidak ada suaranya. Oleh karenanya gong dan semua perlengkapan lainnya (lengkap) diserahkan Sultan pada Nyi Mas Gamparan, salah seorang Panglima Perang Sultan, untuk disimpan di kampung Balajara. Oleh Nyi Mas Gamparan gong itu dicoba dipukul dan ternyata suaranya terdengar hingga ke seluruh Banten. Maka kemudian Sultan mencoba mengambil kembali seluruh perlengkapan tersebut dari Nyi Mas Gamparan. Tetapi pada saat Sultan memukul gong tersebut tidak berbunyi. Maka gong tersebut dan seluruh perlengkapan diserahkan kembali pada Nyi Mas Gamparan dengan ucapan "ini semua sudah merupakan hak mu". Menurut ceritera Jakri, gong tersebut ditemukan kakeknya (uyut) Latib. Ia temukan pada sebuah belukar di sekitar tempat menyepi Nyi Mas Gamparan. Di mana sekarang daerah

itu dianggap suci oleh masyarakat Desa Tanjungsari. Setelah menemukan gong tersebut, pada malam harinya uyut Latib bermimpi bahwa perlengkapan lainnya akan datang menyusul gong tersebut yang berupa saron, kenong dan lain-lainnya datang melengkapi gong tersebut. Ini terjadi pada jaman Belanda dulu. Sebuah *caning* diberi nama Si Layon.

Menurut Jakri, uyut Lajib mewasiatkan pada semua sanak keluarganya apabila mereka ingin selamat mandilah di tempat penyepian Nyi Mas Gamparan dan sekarang air yang keluar dari tempat penyepian tersebut disebut Ci Wasiat sebagaimana dikemukakan terdahulu. Si Layon sekarang telah hilang, kata Jakri yang menyimpan peralatan gambelan itu, "pada masa Jepang terbawa oleh orang yang membeli kapuk (kapok) padanya. Orang tersebut berasal dari Jawa Tengah. Tetapi masyarakat desa Tanjungsari percaya, berdasarkan pesan karuhun, bahwa semua perlengkapan gamelan itu akan kumpul kembali apabila saatnya telah tiba dan ini pertanda Desa Tanjungsari akan merupakan sebuah kota yang ramai dikunjungi banyak orang.

Salah satu keanehan gong Si Parayoga tersebut, menurut Jakri, pada saat air sungai Cibanten kering selama delapan bulan. Ini terjadi pada masa permulaan kemerdekaan, orang tua Jakri mimpi mendapat petunjuk agar "gong Si Parayoga" dibawa berarak keliling kampung dan kemudian menuju ke hulu sungai. Kemudian di hulu sungai Cibanten gong tersebut dipukul satu kali dimana dihadapan hulu sungai itu telah diletakkan kepala kerbau. Seketika gong tersebut dipukul maka keluarlah air tersebut dan terus mengalir dengan normal tanpa terjadi hujan pada saat itu. Demikian kisah Jakri.

Di kalangan penduduk Desa Pasanggrahan dan Tanjungsari ada beberapa *pantangan* (larangan), antara lain dilarang kencing menghadap kuburan keramat. Pada bulan Syawal dan Silih Mulid tidak boleh mendirikan rumah. Kemudian pada tiap *Rebo Wekasan* (pada bulan Safar minggu terakhir) orang harus tinggal di rumah agar terhindar dari berbagai bencana. Pada tiap hari Jum'at orang tidak boleh menumbuk padi. *Suhunan* (atap) rumah harus menghadap *ngulon-ngetan* (barat-timur). Kalau ada yang berbeda dari yang lain, biasanya, menurut kepercayaan masyarakat, pemilik rumah tersebut akan terus menderita sakit atau *malang bumi* menurut ungkapan masyarakat desa Tanjungsari.

Tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat desa Pasanggrahan dan Tanjungsari dapat dikatakan masih sangat rendah. Sebagian besar dari mereka memiliki pendidikan tingkat SD (tidak tamat), dan masih banyak pula penduduk yang belum melek huruf. Mereka yang pernah memperoleh kesempatan belajar membaca, banyak yang tidak dapat membaca kembali karena langkanya bahan bacaan, seperti buku atau surat kabar. Di Desa Tanjungsari kesempatan menonton siaran TV pun sangat langka, karena penduduk tidak tertarik untuk membeli TV. Pada umumnya mereka memiliki pesawat radio transistor.

Akhir-akhir ini sarana pendidikan di kedua desa tersebut mulai dibangun. Di Desa Tanjungsari telah ada dua buah SD, sebuah madrasah Ibtidaiyah, dan sebuah madrasah Tsanawiyah "Tunas Harapan", yang terletak di komplek pesantren "Hamidiyah". Di Desa Pasanggrahan hingga kini baru terdapat sebuah SD.

Minat orang untuk memasukkan anak-anak mereka ke sekolah agama (Islam) nampaknya lebih besar dari pada ke sekolah umum (SD). Hal ini dapat kita lihat baik di Desa Pasanggrahan maupun di Desa Tanjungsari. Sebagai ilustrasi dapat kita lihat bahwa murid SD yang terdapat di Desa Kadubeureum ada sekitar 985 orang (dari 4 buah SD). Sedangkan pada dua Madrasah dan empat Pesantren ada sebanyak 825 murid, belum terhitung murid-murid SD yang rangkap belajar dengan pendidikan Pesantren. Menurut para pengelola pendidikan di Desa Kadubeureum jumlah murid yang belajar rangkap ada sekitar 260 orang. Di Desa Tanjungsari dua buah SD memiliki sebanyak 190 orang, sedangkan sebuah Madrasah memiliki murid sebanyak 400 orang, belum termasuk anak-anak yang belajar di dua buah Pesantren.

Mengapa orang tua lebih berminat menyekolahkan anak-anak mereka pada sekolah Madrasah? Menurut anggapan orang tua anak-anak, di Madrasah anak-anak memperoleh keuntungan ganda, "*kana agama bisa kana umum bisa*" (Ilmu agama dan masalah umum dikuasainya). Bahkan pada masa lalu di Desa Kadubeureum ada anggapan bahwa memasukkan anak mereka ke sekolah umum hanya membuang-buang biaya saja. Anggapan demikian sekarang sudah mulai berkurang, seperti tampak pada minat orang tua yang memasukkan anak-anak mereka ke SD yang mulai meningkat.

Dilihat dari sarana komunikasi, desa Pasanggrahan lebih baik dari Desa Tanjungsari. Desa Pasanggrahan terletak di tepi jalan raya *Palka*

(Palima-Cinangka), sedangkan sarana komunikasi di Desa Tanjungsari masih belum memadai (jalan berbatu-batu besar tanpa aspal sehingga jarang sekali dilalui kendaraan umum, kecuali truk yang mengangkut hasil budidaya masyarakat). Pengaruh luar yang masuk dalam kehidupan masyarakat Desa Tanjungsari belum terasa benar. Sedangkan di Desa Pasanggrahan sudah mulai ada pergeseran, antara lain karena pengaruh media massa (koran, TV dan radio transistor).

Demikian pula sudah ada pergeseran minat dalam pendidikan anak-anak mereka. Mereka mulai lebih banyak mengalihkan perhatian pada SD dibandingkan pada sekolah agama.

Frekuensi orang-orang yang bepergian ke luar desa lebih banyak dari Desa Pasanggrahan dibandingkan dari Desa Tanjungsari. Dalam segi kebersihan (*kabersekaan*), masih banyak penduduk di Desa Pasanggrahan yang membuang kotoran secara sembarangan, mandi di tempat terbuka dengan air yang kurang bersih, dan membangun rumah yang kurang memenuhi syarat kesehatan dibandingkan dengan penduduk Desa Tanjungsari. Mobilitas penduduk Desa Tanjungsari ke luar desa hanya dimungkinkan oleh alasan keagamaan (menghadiri pesta Mauludan di Mesjid Banten atau mengantar dan menjemput tetangga atau saudara yang pergi dan pulang dari tanah suci), menjual hasil pertanian mereka ke pasar kecamatan, atau belanja keutuhan sehari-hari yang dilakukan dua minggu sekali (ini pun tidak dilakukan oleh semua penduduk). Jarang benar masyarakat Desa Tanjungsari pergi ke luar desa dengan alasan rekreasi atau keperluan lain, selain dengan alasan tersebut di atas. Keadaan ini tentu membawa pengaruh pada sikap masyarakat desa tersebut yang relatif tertutup bagi pengaruh kebudayaan luar, bila dibandingkan dengan keadaan masyarakat desa Pasanggrahan sebagai ibukota kecamatan.

Namun demikian, masyarakat Desa Tanjungsari tidak hidup dalam suatu isolasi total. Hal ini tampak dengan adanya usaha perubahan sikap hidup masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Sebuah organisasi pemuda bernama "COPERO", singkatan dari Corps Pemuda/Pelajar Reformis bergerak mempersatukan pandangan kaum muda, baik dari kalangan santri maupun dari kalangan pelajar umum, dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Para anggota organisasi ini adalah pelajar dan pemuda di bawah umur 30 tahun. Aktivitas mereka tidak selamanya mendapat restu para *kokolot* desa. Seringkali terjadi ketegangan-ketegangan yang pada dasar-

nya diakibatkan oleh perbedaan pandangan hidup generasi muda dan generasi tua. Dalam menghadapi ketegangan-ketegangan demikian itu maka "musyawarah/mufakat" masih tetap merupakan alat untuk memecahkan/meredam berbagai gejolak sosial pada masyarakat Desa Tanjungsari.

BAB III.

GAMBARAN UMUM KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN

1. Organisasi Pemerintahan Desa

Ada pendapat yang mengatakan bahwa kata "desa" berasal dari bahasa Sangsakarta, "desi" yang berarti "tanah air" atau "tanah kelahiran" (Patji, 1983: 323). Sekarang, kita mengenal beberapa pengertian tentang Desa.

Bintaro (1968: 95) mengemukakan bahwa "desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial, ekonomis, politis dan kultural yang terdapat di situ dalam hubungannya dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain." Bouman (1971: 79), mengemukakan pendapatnya :

"Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya, usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial."

Dilihat dari segi hubungan dengan penempatannya dalam susunan tertib pemerintah, maka desa diberi batasan sebagai berikut : "Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu badan hukum dan adalah pula badan pemerintahan yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melindunginya (Bertha, 1982 : 26). Maka berdasarkan berbagai pengertian desa, sebagaimana dikemukakan di atas, maka desa itu merupakan suatu kesatuan hukum di mana terdapat atau bertempat tinggal suatu kelompok masyarakat yang mengadakan pemerintahan sendiri. Dari segi sosiologis desa adalah "kesatuan masyarakat pertanian dalam suatu wilayah yang jelas menurut susunan pemerintahan" (FIIS, UI. 1978/1979: 118). Selanjutnya, apabila dilihat dari segi pemerintahan desa berarti "suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat, telah memiliki hak menyelenggarakan rumah tangganya." Pengertian desa ini berdasarkan Undang-Undang no. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Napitupulu, 1981: 32).

Istilah desa pada mulanya hanya dikenal di pulau Jawa, Madura dan Bali. Sedangkan di pulau lain Wilayah Nusantara ini ada istilah lain untuk pengertian yang sama. Di Sumatera Selatan, misalnya, daerah yang setingkat dengan desa di Jawa biasa disebut "dusun", di Maluku biasa disebut "dusun dati", di Minangkau biasa disebut "nagari", di Aceh disebut "gamping atau meunasah", dan lain-lain.

Hingga kini di daerah Banten tidak ada data-data atau keterangan yang dapat menjelaskan bagaimana struktur pemerintahan tingkat desa diatur, baik pada masa kekuasaan Kerajaan Padjadjaran (Pucuk Umum), maupun pada masa kekuasaan Sultan Banten (Hasanudin). Keterangan-keterangan yang kami peroleh tentang pembentukan desa-desa di sekitar daerah Banten baru sekitar tahun 1810, pada saat Banten ditaklukan Belanda. Jadi, pemerintah kolonial Belanda secara leluasa memerintah Banten baru sekitar abad ke 19, pada masa puncak kejayaan Banten mulai pudar. Pada masa itu kekuasaan ada pada putera Sultan Aliuddin I.

Sebagaimana dikemukakan di atas, maka sejak sekitar tahun 1810 Pemerintah Hindia Belanda mulai membenahi administrasi di sekitar daerah Banten. Pada saat itu mulailah dilakukan berbagai perombakan dan pembentukan wilayah-wilayah baru dalam tingkat kabupaten, dan bupati-bupati sebagai kepala kabupaten mulai diangkat pemerintah Belanda. Kegiatan ini dilakukan Belanda, setelah Sultan Banten yang terakhir, Abdulmafachir Muh. Aliuddin II di-buang ke *Batavia* (Jakarta sekarang) oleh Daendels. Kemudian Daendels membagi bekas kerajaan Banten menjadi dua wilayah baru, yaitu daerah *Banten Girang* (Banten Utara) dan daerah *Banten Hilir* (Banten Selatan). Sementara itu penjabat (*bestuur*) bumiputera di daerah Banten mulai disusun dan dalam mengisi jabatan tersebut pemerintah Belanda belum memiliki aturan yang tetap. Pemerintah Belanda pada saat itu masih melakukan berbagai macam percobaan memilih penjabat bumiputera yang setia pada kebijaksanaan pemerintah Belanda. Pada mulanya jabatan bupati (*regent*) itu diberikan pada keturunan sultan.

Sultan Muhammad Safiudin, sultan Banten terakhir yang kemudian diasingkan Belanda ke Surabaya pada tahun 1832, dituduh membantu pemberontakan bajak laut di Selat Sunda. Tetapi karena keamanan di daerah Banten belum juga pulih sebagaimana dikehendaki pemerintah Belanda, maka diadakan perubahan dimana pengangkatan bupati di daerah Banten tidak lagi diperhitungkan faktor keturunan.

an, pendidikan dan pengetahuan sebagai syarat-syarat bagi seorang bupati dan jabatan lain di bawahnya. Pemerintah Belanda cenderung untuk mengangkat seorang penjabat dalam jabatan pemerintah (*Gouvernement*) yang memiliki keberanian menumpas pergolakan dan pembangkangan massa menentang kebijaksanaan pemerintah Belanda. Banyak orang yang memiliki kualifikasi "jago" (dalam sebutan masyarakat Banten "jawara"), yakni seseorang yang memiliki *elmu* (kesaktian) dan keberanian (fisik) dan mempunyai pengikut banyak orang, tampil memegang kekuasaan formal setelah diangkat pemerintah Belanda. Sebagai contoh pengangkatan Sahab, seorang pemimpin pemberontak di daerah Kabupaten Lebak, menjadi *Districthoofd* (demang) di daerah Gunung Kencana sekitar tahun 1816. Dengan pengangkatan ini maka daerah Banten Selatan menjadi aman dan di antara keturunan Sahab kemudian ada yang menjadi bupati di salah satu daerah di Banten. Kemudian pengangkatan Wiradidjaja menjadi Bupati Caringin. Ia dikenal di kalangan masyarakat bernama Bocel. Semasa mudanya ia menjadi budak belian dan pernah dijual kepada bangsa Eropah di daerah Bogor. Demikian pula pengangkatan Basudin menjadi salah seorang bupati di daerah Banten, yang kemudian dikenal dengan nama Raden Adipati Ario Tjondro-negoro.

Sementara pemerintah Belanda mampu menjinakkan sebagian "jago" atau "jawara" melalui berbagai kedudukan dalam bidang pemerintahan mulai tingkat bupati hingga kepala desa, perlawanan dari "jago-jago" lain dan munculnya "jago" baru di kalangan masyarakat di daerah Banten tidak dapat dihindarkan. Mereka inilah yang berdiri di luar jalur *establishment* kekuasaan Belanda yang dengan gigih dan terus-menerus memberikan perlawanan dan melakukan pemberontakan menentang pemerintah Belanda. Sikap masyarakat yang selalu menentang dan membangkang, terhadap berbagai kebijakan Belanda melahirkan pandangan negatif pemerintah Belanda terhadap para "jago" yang merupakan pimpinan-pimpinan pemberontakan massa di daerah Banten. Maka pada saat itu, sekitar tahun 1810 lahirlah ejekan terhadap para "jago" atau "jawara" itu dengan kata "bocokok" yang berarti "buaya darat". Hingga sekarang akibat pandangan negatif Belanda terhadap para "jago" atau "jawara" pada masa lalu masih terasa di kalangan masyarakat kita. Seolah-olah para jawara itu adalah seorang jagoan yang selalu menimbulkan kekacauan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Pembangkangan dan pemberontakan rakyat Banten terhadap pemerintah Belanda itu mencapai puncaknya dalam peristiwa pemberontakan Cilegon (1888). Masyarakat Banten biasa pula menyebutnya peristiwa tersebut "Perang Wasid". Pemberontakan ini dipimpin para "jagoan" yang juga merangkap sebagai ulama. Mereka memanfaatkan sentimen keagamaan, di samping kondisi sosial yang rawan melicinkan jalan meletusnya pemberontakan. Pemerintah Belanda mengerahkan segala kekuatan militerinya dan mendatangkan bantuan dari *Batavia* (Jakarta sekarang) untuk memadamkan pemberontak tersebut.

Ilustrasi di atas sekedar untuk memberikan gambaran dinamik masyarakat Banten dalam menghadapi kekuasaan pemerintah Belanda dan memahami berbagai kebijakan pemerintah Belanda tersebut dalam mempertahankan kekuasaannya, seperti melakukan perubahan dalam administrasi wilayah Banten, pengangkatan para bupati, dan lain-lain, dimana kebijakan pemerintah Belanda tersebut akan membawa pengaruh langsung terhadap pembentukan sistem pemerintahan dan organisasi desa di semua wilayah Banten. Dalam hubungan itu Djajadiningrat (1936) mengemukakan dalam buku hariannya: "nasib orang-orang Banten di dalam perkara mendirikan desa masa dahulu amatlah buruknya, karena berubah-ubahnya paham pihak *Bestuursambtenaar* yang berkuasa." Buruknya nasib orang-orang Banten, menurut kesan Djajadiningrat, karena tiap pembesar yang berkuasa di daerah Banten mempunyai selera yang berbeda-beda dalam usaha memusatkan penduduk untuk tinggal mengelompok lebih besar dalam suatu kehidupan desa. Sebagaimana kehidupan masyarakat ladang, maka biasanya penduduk tinggal terasing satu dengan lainnya. Hal ini karena mereka tinggal di tengah-tengah tanah ladang mereka. Pada tanah perkarang mereka biasa berdiri sebuah rumah panggung dengan atap rumbia yang dilengkapi sebuah lumbung padi, sebuah kandang kerbau, dan sebuah bangunan sederhana untuk menyimpan lesung.

Kebiasaan penduduk untuk tinggal di ladang masing-masing dengan segala perlengkapan hidupnya membawa mereka untuk tidak saling tergantung pada bantuan orang lain dan tentu saja kebiasaan ini membawa suatu sikap hidup yang lebih individualistis dibanding dengan kebiasaan masyarakat sawah. Hanya pada waktu panen sajalah mereka relatif memerlukan bantuan tenaga orang lain, dan untuk

keperluan tersebut mereka biasa melakukannya dengan sistem *liliuran*.

Bagi pemerintahan Belanda, terpercarnya tempat tinggal penduduk tentu sangat menyulitkan dalam memerintah daerah tersebut, karena keamanan sulit dikendalikan dan pungutan pajak sulit dilaksanakan. Dalam menghadapi keadaan tersebut, maka pihak penguasa Belanda mulailah melakukan prakarsa: memerintahkan penduduk untuk tinggal berkumpul mengelompok dalam kampung-kampung, dan kemudian beberapa kampung itu dikelompokkan lagi dalam satu wilayah kekuasaan yang disebut desa. Dengan demikian, maka dapatlah dikatakan bahwa desa yang dibentuk pada masa pemerintahan Belanda itu merupakan unit pemerintahan terendah dari sistem birokrasi pemerintah Belanda. Di daerah Banten pemerintahan desa dilakukan oleh seorang kepala desa, biasa pula disebut *jaro*. Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, seorang *jaro* dibantu oleh beberapa orang pembantu, biasa disebut "parabot desa" atau "parentah desa". Biasanya para anggota *parabot desa* itu terdiri dari orang-orang yang memiliki kecakapan dan pengaruh yang luas di kalangan warga desa yang bersangkutan. Jumlah anggota *parabot desa* itu di beberapa daerah di Jawa Barat tidak sama. Hal ini tergantung dari penghargaan masyarakat hasil pendapat yang diterima masing-masing anggota *parabot desa* itu. Biasanya tinggi rendahnya penghargaan terhadap jabatan itu ditentukan oleh luasnya tanah *bengkok* yang dimiliki desa yang bersangkutan. Karenanya tanah *bengkok* tersebut merupakan sumber pendapatan utama para anggota *parabot desa*. Di daerah Banten jumlah anggota *parabot desa* termasuk kecil bila dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Barat. Hal ini dikarenakan tanah *bengkok* yang dimiliki desa sangat sempit, bahkan di beberapa daerah hampir tidak ada. Adapun macam-macam jabatan *parabot desa* yang ada di daerah Banten adalah :

- (1) *Carik* (Sekertaris Desa);
- (2) *Ulu-Ulu* (Urusan Pengairan Desa);
- (3) *Kabayan* (Pesuruh Desa);
- (4) *Amil* (Urusan Agama);
- (5) Polisi Desa;
- (6) *Pangiwa* (Kepala Kampung, biasa disebut pula Tua Kampung).

Di dalam struktur pemerintahan desa, selain adanya kepala desa (*jaro*) bersama *parabot desanya*, masih ada kelembagaan lain yang sangat penting dalam membantu kelancaran tugas kepala desa adalah

para *sesepuh* desa. Biasanya di daerah Banten para *sesepuh* desa ini disebut *kokolot*. Meskipun kelembagaan *kokolot* desa dalam struktur pemerintahan desa sekedar berfungsi sebagai penasihat kepala desa (mereka tidak memiliki kewenangan eksekutif), tetapi peranan yang dimainkan para *kokolot* desa itu sangatlah besar dalam kehidupan masyarakat desa. Tanpa restu para *kokolot* desa, sesuatu program yang ditawarkan pada masyarakat tidak mungkin akan memperoleh hasil yang diharapkan. Biasanya di daerah Banten para *kokolot* ini terdiri dari para *jawara* dan ulama atau kombinasi keduanya baik mereka bekas kepala desa atau merupakan penduduk asli (*cikal bakal*) desa. Di daerah Priangan biasanya *cikal bakal* desa itu disebut *pribumi*.

Selama masa pemerintahan Belanda, di daerah Banten seorang kepala desa atau *jaro* tidak dipilih masyarakat desa tetapi diangkat atau ditunjuk pemerintah (bupati). Hal ini agaknya berbeda dengan keadaan di daerah lain di Jawa Barat, dimana seorang lurah dipilih rakyat. Kebiasaan pemilihan tersebut di samping merupakan tradisi masyarakat desa, juga sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan desa yang dibuat pemerintah Belanda. Hal ini dapat kita lihat pada tulisan Soetardjo Kartohadikoesoemo (1965), yang mengemukakan :

".... perhatian utama mengenai pemerintahan desa dimulai Rafles, yang mengeluarkan Revenue Instruction (11 Februari 1814) : 1. Kepala Desa sebagai kepala rakyat yang berkuasa mengatur rumahtangga desanya sendiri. 2. Kepala Desa sebagai perantara pemerintah dalam hal pungutan pajak tanah. Kemudian pada masa kekuasaan Belanda kembali di wilayah Nusantara ini maka terdapat berbagai perubahan, di samping diadakan pengukuhan terhadap produk Rafles tersebut, seperti terlihat dalam Staatsblad 1818 no 15; 1819 no 5, 6, 10 dan 14; dalam stbl. 1819 no 13 telah ditetapkan bahwa pemilihan Kepala harus disahkan oleh Residen. Dalam stbl. 1819 no. 47 dan stbl. 1907 no 212 aturan pemilihan kepala Desa diperbaharui lagi dimasukkan syarat-syarat sebagai berikut: Menurut pasal 5 peraturan pemilihan, maka yang dilarang untuk dipilih menjadi Kepala Desa adalah (a) wanita; (b) orang yang belum dewasa (staatsblad, 1918 no 277); (c) bekas kepala Desa atau bekas pegawai negeri yang telah diberhentikan dari jabatannya dengan tidak hormat; (d) mereka yang dengan keputusan hakim yang sudah tak dapat dirobah lagi telah dicabut haknya untuk memangku suatu jabatan, yaitu kalau waktu diadakan pemilihan tempo pencabutan hak itu belum berakhir, stbl. 1917 no 497, pasal 21 ayat 12. Sedangkan yang berhak memilih Kepala Desa adalah (a) Penduduk desa yang memikul wajib-kerja dan warga pemerintah desa;

(b) Penduduk desa, bekas kepala desa diberhentikan dengan hormat, guru agama yang telah mendapat pengesahan dari kepala daerah, pegawai mesjid dan penjaga kuburan yang dimuliakan.”

Selain kepala desa yang ditunjuk, bagi daerah Banten pengangkatan anggota *parabot* desa yang dilakukan oleh kepala desa dengan memperhatikan persetujuan rapat desa, yang harus disahkan oleh wedana. Meskipun kedudukan rapat desa adalah keputusan tertinggi yang harus dilakukan kepala desa, tetapi keputusan itu tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pemerintah Belanda. Biasanya di daerah Banten dalam rapat desa itu dihadiri oleh para *kokolot* desa, kepala desa dan *parabot* desa termasuk para tua kampung (*pangiwa*).

Selama 133 tahun (1809–1942) Banten dalam cengkraman Belanda (Indonesia tercatat dalam sejarah menjadi jajahan Belanda selama 350 tahun) telah membawa banyak perubahan dalam tata kebiasaan pemerintah desa di daerah Banten. Hal ini terjadi karena akibat berbagai perubahan wilayah administrasi di daerah Banten, di samping sering terjadinya perubahan berbagai peraturan dan perundang-undangan mengenai sistem pemerintahan desa, antara lain dalam cara pengangkatan tugas dan wewenang kepala desa dalam menjalankan pemerintahannya.

Berbagai peraturan dan perundang-undangan produk Belanda tersebut pada hakekatnya adalah usaha yang secara terus menerus menekan sistem pemerintahan desa, mengurangi fungsi dan membatasi kewenangan kepala desa. Dengan demikian, maka secara berencana pemerintah Belanda berusaha menjauhkan hubungan kepala desa dengan masyarakat yang dipimpinnya. Sebagai akibat dari kebijaksanaan pemerintah Belanda tersebut, maka kepala desa telah kehilangan kewibawaannya sebagai orang yang dihormati. Perkataan "*jaro*" bagi masyarakat Banten mengandung makna "orang yang dihormati", sama dengan sebutan "*juragan*" di kalangan masyarakat Priangan.

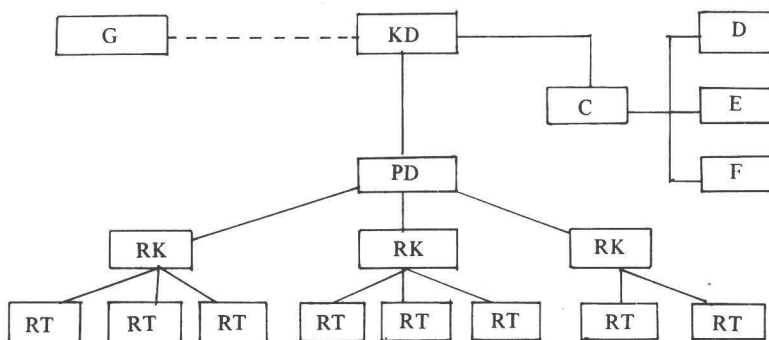
Selama pemerintahan Belanda berlangsung di tanah Banten, dan juga di seluruh wilayah Nusantara ini, berbagai perubahan perundang-undangan telah lebih mengukuhkan jabatan kepala desa dalam memelihara dan melaksanakan kepentingan pemerintah Belanda yang utama, yaitu memungut pajak dari masyarakat dan tugas-tugas kepolisian, antara lain merendam gejolak masyarakat dalam menentang penjajahan Belanda.

Tampaknya, dalam masa kekuasaan Jepang di Indonesia tidak terdapat perubahan fundamental dalam organisasi pemerintahan desa termasuk di wilayah Banten. Demikian pula pada awal kemerdekaan secara struktural tidak banyak mengalami perubahan dalam organisasi pemerintahan desa. Sebagaimana diketahui, dasar hukum yang mengatur tentang struktur dan tata pemerintahan desa adalah pasal 18 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal tersebut mengemukakan "Bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa." Adapun undang-undang yang dikeluarkan untuk memenuhi perintah pasal 18 tersebut di atas adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1948. Akan tetapi undang-undang ini tidak mengatur struktur dan tata pemerintahan sampai tingkat desa, tetapi hanya tingkat propinsi, kabupaten dan kota besar. Oleh karenanya maka bagi desa-desa di Jawa dan Madura tetap berlaku "*Inlandsche Gemeente Ordonantie (IGO)*, *Staatsblad* tahun 1906, no. 83" dengan beberapa perubahan yang banyak menyerahkan persoalan desa kepada hukum adat. Sedangkan untuk daerah luar Jawa berlaku "*Inlandshe Gemeente Ordonantie Buiten Gevesten (IGOB)*, *Staatsblad* tahun 1938 no. 638", yang juga banyak menyerahkan persoalan desa kepada hukum adat setempat (Beratha, 1983: 29).

Namun demikian, diundangkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka semua undang-undang yang sebelumnya mengatur tentang tata pemerintahan desa seperti IGO dan IGOB, dan demikian pula Undang-Undang No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, secara resmi telah dicabut (pasal 39 Undang-Undang No. 5 Tahun 1979). Maka dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tersebut, yang merupakan undang-undang yang pertama selama masa kemerdekaan ini yang mengatur struktur dan tata pemerintahan dalam tingkat desa, pemerintah pusat tetap mengindahkan keanekaragaman keadaan desa dan ketentuan adat yang masih berlaku; di samping memperkuat pemerintahan desa dalam upaya mengerjakan partisipasi dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi desa yang makin meluas dan efektif (Beratha, 1983: 42).

Pada saat penelitian ini dilakukan, struktur pemerintahan, baik yang terdapat di desa Pasanggrahan maupun di desa Tanjungsari, sebagai berikut :

Struktur Pemerintahan Desa di Pasanggrahan dan Tanjungsari



Keterangan:

- KD = Kepala Desa;
- C = Carik (Sekertaris Desa);
- PD = Polisi Desa;
- RK = Rukun Kampung;
- RT = Rukun Tetangga;
- G = Kokolot Desa;
- D = Amil;
- E = Ulu-ulu (Urusan Pengairan);
- F = Kabayan (Pesuruh Desa).

Sedangkan organisasi Pemerintahan Desa yang didasarkan pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 dapat kita lihat pada halaman 49.

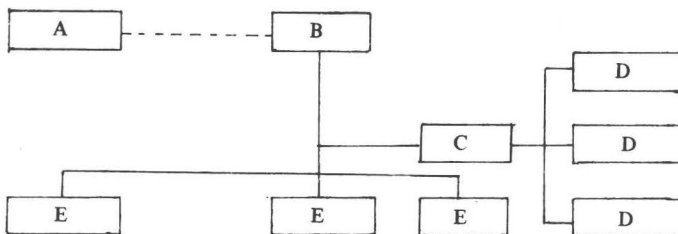
Dalam pasal 3 dan 23 Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, berturut-turut ditetapkan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Selanjutnya, ditetapkan bahwa pemerintah desa dalam melakukan tugasnya dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekertaris desa dan kepala-kepala urusan. Demikianlah organisasi pemerintahan desa menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Tampaknya, organisasi pemerintahan desa yang terdapat di desa Pasanggrahan dan Tanjungsari masih memberikan kesan warisan pemerintahan Belanda. Hal ini tampak dari wewenang polisi desa yang langsung membawahi kepala-kepala kampung atas garis instruksi langsung kepala desa. Pada masa awal kemerdekaan, kepala desa pertama yang dipilih masyarakat desa Tanjungsari adalah Haji Sadik. Ia memegang jabatan kepala desa hingga sekitar tahun 1950-an. Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, jumlah anggota *parentah desa* tidak sama pada tiap-tiap desa. Maka apabila di desa Pasanggrahan terdapat seorang carik, di desa Tanjungsari terdapat dua orang carik, dan istilah "amil" biasa pula disebut *panghulu amil*".

Hingga kini desa Pasanggrahan membawahi sekitar 18 kampung yaitu: Kadubangban Barat, Kadubangban Timur, Kupahandap, Lebak Gintung, Citanggohgor, Ciaseum, Gadog, Pasanggrahan, Sampiran, Cibatu Baru, Malangnengah, Lembur Jero, Pasir, Ciherang, Lebak Budi, Cikukuk Landeuh, dan Cikukuk Girang. Sedangkan desa Tanjungsari hanya membawahi sekitar 8 kampung yaitu: Kadukacapi, Karag, Tanjung, Pagedangan, Birai, Parigi, Tanjung Kulon, dan Talag.

Baik di desa Pasanggrahan maupun di desa Tanjungsari rapat desa biasa diadakan satu kali dalam satu bulan pada minggu ke 2. Biasanya yang dibicarakan dalam rapat desa itu adalah, antara lain, program

Struktur Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979



Keterangan:

- A = Lembaga Musyawarah Desa (LMD),
- C = Sekertaris Desa;
- E = Kepala Dusun (Kepala Kampung);
- B = Kepala Desa;
- D = Kepala Urusan

pembangunan desa menyangkut masalah BIMAS, Panca Usaha Tani, masalah KB (Keluarga Berencana), dan lain-lain. Dalam rapat desa ini biasa dihadiri oleh para *kokolot* desa, para ketua kampung dan Ketua RT (Rukun Tetangga) dan semua pamong Desa (parangkat desa), dipimpin oleh kepala desa.

Imbalan kepala desa di desa Pasanggrahan dan Tanjungsari berupa tanah bengkok. Di desa Tanjungsari, misalnya tanah bengkok berupa tanah darat (huma) seluas 3,5 ha yang dikerjakan oleh masyarakat dalam bentuk 1:3 (satu bagian untuk *jaro* dan dua bagian untuk *penyambut* (penggarap). Sistem tersebut di kalangan masyarakat desa Tanjungsari biasa disebut sistem *maro*. Bentuk imbalan lain adalah berupa jasa masyarakat desa yang secara tradisional biasa disebut "*bayar gawe*" (semacam kerja-bakti) untuk *jaro*. Bentuk kerja-bakti ini adalah dilakukan oleh warga desa secara sukarela, bekerja tanpa dibayar membantu mengerjakan tanah atau sawah garapan/milik *jaro* dalam satu tahun selama 5 hari kerja untuk tiap orang. Menurut keterangan lurah desa Tanjungsari kebiasaan itu telah lama ditinggalkan masyarakat. Sedangkan untuk keperluan administrasi desa antara lain diperoleh bantuan dari masyarakat melalui "pembayaran administrasi" sebesar Rp.500,00 untuk ijin keramaian atau selamatan, di samping ada sekedar honorarium sumbangan pemerintah pusat yang diterima setiap tiga bulan sekali untuk kepala desa, carik, panghulu amil, polisi desa dan ulu-ulu. Sedangkan biaya pembangunan desa, selain swadaya masyarakat juga diperoleh melalui bantuan desa (Bandes), biasanya dibeikan satu kali dalam setahun. Bantuan ini digunakan untuk memperbaiki balai desa, gorong-gorong dan perbaikan jalan desa.

2. Sistem Kepemimpinan

Di kalangan masyarakat desa Pasanggrahan dan Tanjungsari dikenal adanya bentuk kepemimpinan yang biasa dalam ilmu-ilmu sosial disebut kepemimpinan formal dan informal (nonformal). Dalam hubungannya dengan sistem kepemimpinan desa kepala desa berserta *parabot desa* (pamong desa) dikategorikan pimpinan formal. Hal ini disebabkan karena kepala desa memiliki dasar-dasar kewenangan (authority) kekuasaan dengan sanksi-sanksi yang nyata (secara resmi kepala desa dipilih masyarakat, dikukuhkan dengan surat keputusan bupati, dan lain-lain). Kepemimpinan yang bersifat informal yang ada pada masyarakat desa Pasanggrahan dan Tanjung-

sari adalah kekuasaan yang dimiliki tokoh-tokoh masyarakat, di mana kekuasaannya dan kepemimpinannya diterima masyarakat desa atas dasar nilai-nilai sosial yang mendalam (hormat, kagum, memiliki kemampuan sosial dan kekayaan yang lebih dari masyarakat biasa), seperti pada umumnya kualitas kepemimpinan sebagaimana dikemukakan di atas yang dimiliki tokoh-tokoh adat dan agama di kedua desa tersebut.

Dalam kehidupan sosial masyarakat di desa Pasanggrahan dan Tanjungsari bentuk kepemimpinan formal dan informal, sebagaimana dijelaskan di atas, memiliki hubungan yang erat yang ditandai dengan adanya interaksi antara peranan-peranan yang dimainkan oleh kedua unsur-unsur kekuatan tersebut. Peranan yang dimainkan oleh kedua unsur kekuatan itu melahirkan sistem politik dan sistem kepemimpinan tingkat lokal (desa) sebagai hasil dari perpaduan kedua unsur kekuatan tersebut yang didukung oleh sistem politik nasional, masyarakat setempat dan kebudayaan yang berlaku sehingga secara aktual memberikan suatu corak tersendiri pada sistem kepemimpinan yang berlaku di kedua desa tersebut.

Secara sederhana sistem politik dan sistem kepemimpinan yang berlaku di kedua desa tersebut ditandai dengan adanya interaksi dan perpaduan antara peranan yang dimainkan oleh apa yang dinamakan masyarakat desa tersebut sebagai unsur *umaroh* (unsur kepemimpinan formal); unsur *ulama* (unsur kepemimpinan agama), dan unsur *jawara* (unsur kepemimpinan adat). Ketiga unsur kekuatan tersebut memainkan peranan penting dalam membentuk sistem politik dan sistem kepemimpinan desa yang didukung oleh penguasaan berbagai sumber daya ekonomi dan jaringan kekerabatan yang meluas hingga ke luar desa tersebut.

Tumbuh dan berkembangnya ketiga unsur kekuatan tersebut di atas, sebagaimana yang kita lihat sekarang, merupakan produk sejarah yang panjang yang kemudian memberikan corak pada sistem politik dan sistem kepemimpinan dewasa ini di kedua desa tersebut, dan di daerah Banten pada umumnya. Produk sejarah yang dimaksudkan adalah sebagaimana layaknya susunan dan ideologi dari suatu kerajaan tradisional, seperti kerajaan Padjadjaran yang berkuasa di daerah Banten sampai sekitar 1527, atau pun kerajaan Islam Banten (1527–1809), dimana kepemimpinan dan kekuasaan kerajaan tersebut diterima masyarakat secara alamiah tanpa banyak protes meskipun pergantian kekuasaan dari satu regim ke regim yang lain selalu

melalui jalan peperangan. Agaknya masyarakat traditional harus menerima beban dan realitas sebagai suatu yang lazim, tidak membayangkan perubahan di dalamnya, sebab segala sesuatu itu telah ditakdirkan dalam status yang statis. Hal tersebut di atas sesuai dengan keterangan Onghokham (1982) :

“....dikaitkannya kepemimpinan dengan konsensus dan budaya serta konsepsi mengenai takdir dan nasib adalah untuk menghilangkan jejak bahwa kepemimpinan itu, seperti dalam setiap masyarakat, lebih sering merupakan hasil pribadi. Agaknya berbahaya lagi bagi stabilitas karena kepemimpinan traditional ini sering dicapai melalui kekerasan.”

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam kepemimpinan traditional, perang merupakan hakekat dari suatu kerajaan. Melalui perang dan kekuatan fisik sesungguhnya kekayaan akan diperoleh dan dikuasai, dimana kekayaan itu sesungguhnya akan merupakan dasar dalam mempertimbangkan kepemimpinan. Salah satu sumber kekuasaan yang sangat penting dalam negara agraris adalah “tanah”. Biasanya tanah dikuasai kerajaan dan menjadi milik raja. Sedangkan rakyat yang tinggal di sekitar tanah tersebut hanya memiliki hak penggarapan, dan hak ini diberikan oleh raja selama rakyat tersebut mendukung kekuasaan raja. Dukungan tersebut diberikan dalam arti bahwa rakyat harus menyediakan diri sebagai tenaga kerja, menyediakan upeti untuk raja, dan tugas-tugas kemiliteran pada saat kerajaan menghadapi ancaman dari luar.

Di daerah Banten, dimana penduduk mengerjakan pertanian dalam bentuk *huma* (ladang), biasanya pengolahan ladang itu dikerjakan oleh kelompok-kelompok kecil masyarakat. Untuk memudahkan kontrol terhadap para penggarap tanah yang merupakan sumber kekayaan raja, maka dalam tiap kelompok penggarap tanah tersebut dipimpin oleh seorang yang memiliki keberanian fisik dan hubungan dekat dengan kerajaan.

Keberanian fisik tersebut menjadi syarat utama karena tugas pemimpin demikian itu selain mengawasi kelompok masyarakat tersebut, juga bertugas memungut upeti dan mengatur tugas lain untuk kepentingan raja. Dalam melakukan tugas-tugas tersebut tentu saja seorang pimpinan itu harus melakukannya seringkali dengan kekerasan demi berjalannya roda pemerintahan traditional.

Pemimpin kelompok masyarakat tersebut di atas, di kalangan masyarakat Banten biasa disebut “jawara”. Sebutan tersebut mengandung arti “jagoan”. Hal ini sejalan dengan kedudukannya se-

bagai elite desa, yang merupakan pimpinan di kalangan masyarakat bawah, dimana biasanya seorang jawara sangat aktif dalam melayani atasan, sesamanya, dan para pengikutnya di desa. Akan tetapi dalam melakukan tugasnya sebagai perantara raja dengan rakyat, para *jawara* itu lebih sering melayani kepentingan atasan. Karena aktivitas dan kharismanya sebagai seorang *jawara*, dia akan tetap berusaha mempertahankan kepercayaan masyarakat sekitarnya. Biasanya pada diri para *jawara* sifat magis setiap kepemimpinannya mengutamakan ilmu kekebalan yang mereka peroleh dari orang-orang yang ahli untuk itu. Di antara para *jawara* itu sering terjadi persaingan dalam mengumpulkan pengikut sebanyak-banyaknya. Di daerah Banten persaingan itu dilakukan melalui pertandingan pencak silat dengan menggunakan senjata golok. Hingga kini golok buatan Ciomas terkenal di Jawa Barat. Jenis pencak silat yang sangat terkenal di daerah Banten adalah *turumbu*. Persaingan di antara *jawara* juga dilakukan melalui permainan menyabung ayam. Melalui kedua jenis pertandingan itu para *jawara* sekaligus mencoba kekebalan yang mereka miliki. Maka di sini tampak bahwa selalu ada kompetisi untuk memperoleh kepemimpinan.

Permainan menyabung ayam yang digemari kalangan elite dan rakyat sejak masa kerajaan Padjadjaran memiliki nilai sosial yang tinggi di kalangan masyarakat. Hal ini dapat diamati dari berbagai keterangan para *kokolot* desa, bahwa pada masa dulu, apabila seorang *jawara* kalah dalam menyabung ayam, maka yang bersangkutan akan kehilangan simpatik dan dukungan rakyat sebagai seorang pemimpin. Hal ini disebabkan karena kekalahan menyabung ayam tersebut dinilai masyarakat yang bersangkutan telah kehilangan kekebalannya. Di sini kata *jawara* juga identik dengan "*juara*" menyabung ayam. Sejalan dengan anggapan masyarakat tersebut di atas, sebagaimana yang diungkapkan dalam suatu cerita rakyat yang kami dengar di desa Tanjungsari: " . . . raja Pucuk Umun kalah menyabung ayam oleh Sultan Banten. Maka kemudian ia dipersilahkan meninggalkan ibukota kerajaan beserta para pengikut yang setia kepadanya. Ia pergi ke suatu daerah di sekitar Gunung Pulosari dan Gunung Cibodas dan kemudian mereka sampai di lereng Gunung Kendeng. Kemudian daerah tersebut kini di kalangan masyarakat desa terkenal dengan sebutan daerah *rawayan* (pengelana). Di daerah tersebut Pucuk Umun beserta para pengikutnya oleh Sultan Banten diberi tanah garapan seluas kulit kerbau. Karena keuletan Pucuk Umun beserta para pengikutnya, maka kulit kerbau itu mereka sabit-sabit hingga sebesar rambut manusia dan kemudian mereka sambung-sambung

dan hingga menjadi panjang dan luas seluas daerah *rawayan* sekarang. Orang-orang *rawayan* inilah yang sekarang dikenal dengan sebutan orang Baduy”.

Versi lain yang kami peroleh tentang orang-orang Baduy ini adalah di desa Pasanggrahan, yang diungkapkan oleh Bapak Sukma :

” . . . pada masa pemerintahan Sultan Banten orang-orang di sini dikenal sebagai orang-orang yang bandel. Mereka yang pada waktu itu tidak menurut kepada perintah Sultan (mereka itu adalah pengikut setia Pucuk Umun) pindah ke lereng Gunung Cibodas dan Gunung Pulosari. Di antara mereka ada pula yang menyingkir ke Jayasinga, Sanghyang Sirah dan Borosngora di daerah Ujungkulon dan kemudian di antara mereka mempersatukan diri dan tinggal di daerah Parahiang, yang sekarang biasa disebut daerah *rawayan* di sekitar lereng Gunung Kendeng di daerah Rangkasbitung, yang kini kita kenal sebagai orang-orang tua dulu, katanya orang-orang tersebut berasal dari kampung pasar Cemplang, kini termasuk. Cemplang di dekat desa Tanjungsari sekarang.”

Dari berbagai uraian sebagaimana dikemukakan di atas, maka tampaklah bahwa sistem politik dan sistem pemerintahan masyarakat Banten masa lalu, dibina melalui kekuatan dan keberanian fisik dengan dilandasi konsepsi kekebalan yang merupakan unsur kekuatan magis.

Beralihnya kekuasaan dari Padjadjaran kepada kerajaan Islam Banten, agaknya corak dari sistem politik dan sistem kepemimpinan masyarakat secara struktural tidak mengalami perubahan. Masyarakat Banten sekarang menilai bahwa periode Islamisasi di daerah Banten yang dimulai sejak tahun 1527 merupakan pembaharuan dari sikap dan cara hidup manusia Banten, suatu perubahan dari orientasi masyarakat yang bersifat Hindu-Budha kepada suatu kehidupan sosial yang dilandasi ajaran-ajaran Islam.

”Masyarakat Banten merasa dirinya manusia-manusia baru, bukan manusia-manusia sebelumnya, sikap dan corak kehidupannya berubah. Perasaan dan kualitas baru yang diperolehnya dari ajaran Islam (agama baru yang dipeluknya) membuat mereka (masyarakat Banten) merasa dirinya manusia baru dengan cita-cita baru, doktrin hidup dan kepribadian baru” (Effendi, 1979: 2).

Dalam melakukan proses Islamisasi di kalangan masyarakat, Fatahillah (1527–1550) berhasil meletakkan dasar-dasar pembaharuan yang dilandasi ajaran Islam. Proses tersebut dilaksanakan melalui kekerasan dan cara-cara damai. Sebagaimana diuraikan di atas, orang-

orang yang tidak mau tunduk pada kekuasaan Fatahillah diusirnya ke daerah selatan Banten, yang dikenal sekarang sebagai orang-orang Baduy. Tetapi dalam sistem politik dan kepemimpinan, Fatahillah tetap menggunakan pola lama. Ia tetap menggunakan pengaruh para *jawara* yang setia padanya sebagai perantara antara raja dengan rakyat. Para *jawara* tersebut tentu harus meninggalkan cara lama, kebiasaan yang berlandaskan Hindu-Budha kini beralih pada kebiasaan Islam. Selanjutnya, para *jawara* tersebut bukan saja sebagai orang-orang yang "jago" dalam, tetapi juga mereka menjadi orang-orang yang ahli dalam bidang agama. Maka dari sinilah muncul kepemimpinan yang di kalangan orang Banten sekarang disebut "*jawara-ulama*" (seorang *jawara* dan juga seorang yang memiliki pengetahuan luas tentang agama). Konsep kekebalan yang sekarang mereka miliki berlandaskan ajaran Islam, sebagai unsur kekuatan magis dalam melaksanakan kepemimpinannya.

- Sejalan dengan uraian di atas, Haji A. Hayat, salah seorang *kokolot* desa Tanjungsari mengemukakan: "memang ada dua kriteria tentang *jawara* di daerah Banten. Pertama *jawara* yang ulama (*jawara-ulama*) yang memegang teguh ilmu agama. Kedua, *jawara* yang menggunakan "*elmu hideung* (ilmu hitam)." Penggunaan istilah "*elmu hideung*" bagi orang-orang Banten adalah karena seseorang belajar atau memperoleh ilmu (kepandaian) untuk memperoleh kekebalan diri yang tidak berdasarkan pada ajaran-ajaran Islam. Biasa juga orang-orang Banten menyebutnya "*elmu rawayan*" atau "*elmu urang Baduy*" Konotasi di atas tersebut, juga menunjukkan hal yang dianggap masyarakat Islam Banten "jelek" dan "tidak terpuji". Jadi tidak terhormat menurut anggapan masyarakat tersebut.

Dari uraian di atas, memang hingga kini, secara terselubung masih dirasakan adanya semacam "ketegangan masa lalu" di antara *jawara-ulama* dan *jawara* bukan ulama. Hal ini mungkin karena *jawara-ulama* seak proses Islamisasi di daerah Banten berada dalam struktur kekuasaan dan *jawara* yang bukan ulama tersingkir dari peranannya sebagai pemimpin masyarakat. Banyak di antara mereka yang bukan *jawara* ulama, kemudian menggabungkan diri dengan para pengikut setia Pucuk Umun di daerah selatan Banten. Di daerah inilah kemudian mereka mengembangkan keahlian dalam ilmu silat dan kekebalan. Berdasarkan keterangan di atas, maka di kalangan masyarakat Banten terdapat dua pusat keilmuan, pertama yang berorientasi ke arah selatan Banten, dimana mereka namakan "*elmu rawayan*";

kedua, yang berorientasi dan memegang teguh ilmu agama yang berpusat di pesantren-pesantren.

Pada masa pemerintahan Belanda di daerah Banten (1809–1942) agaknya secara kualitatif tidak banyak mengubah sistem politik dan sistem kepemimpinan dalam birokrasi pemerintahan, bahkan kecenderungan lebih mengukuhkan sistem sosial yang dianut masyarakat. Namun demikian pemerintah Belanda mulai membebani sistem birokrasi pemerintahan seperti membagi-bagi wilayah Banten dalam beberapa *Afdeeling* dengan organisasi pemerintahan yang hirarkis mulai dari tingkat kabupaten hingga desa. Dalam sistem pemerintahan tingkat desa pemerintah Belanda masih tetap menggunakan unsur-unsur kewibawaan dan kharisma para *jawara* sebagai perantara antara pemerintah Belanda dengan rakyat.

Dalam usaha mengukuhkan sistem birokrasi yang dibangun pemerintah Belanda itu, banyak di antara para *jawara* yang ditunjuk pemerintah Belanda untuk menduduki jabatan kepala desa (*jaro*), bahkan ada di antara mereka yang ditunjuk menjabat jabatan bupati. Sejak masa inilah di antara *jawara* ada yang memegang jabatan "formal" di dalam sistem birokrasi pemerintahan Belanda. Walaupun mereka telah berhenti dari jabatan formalnya itu, tetapi karena wibawa dan kharismanya di tengah-tengah masyarakat, maka mereka tetap dihormati dan disegani dan menentukan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Mereka inilah yang kemudian sekarang biasa disebut masyarakat dengan sebutan "*kokolot* desa", sedangkan jabatan formalnya, yang pernah mereka pegang, diserahkan pada anak atau saudara terdekatnya yang dianggap mampu melanjutkan kepemimpinannya melalui pengesahan dan penunjukan penguasa setempat.

Para *jawara* yang berada di luar struktur kekuasaan baik yang ulama maupun yang bukan ulama, terus melakukan perlawanan massa, menentang penjajahan Belanda. Di daerah Banten tercatat berbagai peristiwa pemberontakan rakyat antara lain, pemberontakan Cikande, pemberontakan Cipicing, pemberontakan Leuweung Lancang, peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 1810. Pemberontakan Bidin dan Agus Kamis di Serang sekitar tahun 1817. Pemberontakan Nyi Mas Gampanan Bojong dari desa Balaraja sekitar tahun 1830. Pemberontakan Kiyai Gede sekitar tahun 1835. Puncaknya adalah pemberontakan Cilegon sekitar tahun 1888 yang memakan banyak korban baik dari pihak Belanda maupun dari pihak rakyat.

Perlawanan yang terus menerus dari masyarakat tersebut sangat menyulitkan posisi dan pengawasan pihak pengusaha Belanda, sehingga sering terjadi berbagai perubahan kebijakan yang pada hakekatnya upaya penguasa dalam menekan atau memadamkan perlawanan massa. Salah satu upaya dilakukan penguasa Belanda adalah mengubah dan mempersempit wilayah administrasi dan mengangkat orang-orang yang sangat berjasa kepada pihak penguasa dalam jabatan-jabatan pemerintahan. Di samping itu memberikan penghargaan khusus pada para *jaro* yang menunjukkan kesetiiaannya dengan mengangkatnya menjadi "lurah". Namun sikap masyarakat yang "bandel" tidak memudahkan pemerintah Belanda menundukkannya. Dari sikap itulah, maka kemudian di kalangan masyarakat Banten dikenal istilah "Banten" yang berarti "*bantahan*". Kata ini bermakna bahwa orang-orang Banten selalu membantah dan ini menunjukkan sifat "keras" dan "spontan" rakyat Banten yang terlihat hingga sekarang. Pada masa itu timbul pula pengertian bahwa "*jawara*" itu berasal dari kata "ja" berarti "*jahat*", "wa" berarti "wani" (berani), dan "ra" berarti "*rampog*" (perampok). Pengertian tentang *jawara* sebagaimana dikemukakan di atas tentu dilatarbelakangi oleh sikap mereka yang selalu menentang berbagai kebijakan pemerintahan Belanda. Akibatnya ialah tumbuh kesan dan penilaian negatif di kalangan masyarakat luar Banten mengidentikan *jawara* dengan *rampog*. Memang harus diakui ada di antara *jawara* yang melakukan tindakan-tindakan semacam itu.

Sebagai akibat dari kesan umum yang negatif terhadap pengertian *jawara* sekarang, maka di kalangan *kokolot* desa yang memiliki predikat *jawara* ada perasaan keengganan menyandang predikat tersebut. Mereka sekarang lebih senang disebut "ulama" atau "kokolot" tersebut terdapat pula usaha untuk mengembalikan citra *jawara* sebagai pimpinan yang baik dalam masyarakat dengan memberikan interpretasi baru terhadap pengertian *jawara*. Mereka mengemukakan bahwa arti kata "*jawara*" itu adalah "ja" berasal dari kata "*jago*" bukan "*jahat*"; kata "wa" berasal dari kata "wani" (berani) dan "ja" berasal dari kata "ramah" atau "*radikal*". Pengertian ini sesuai dengan sifat dan karakter orang-orang Banten, kata para *kokolot* desa, baik di desa Pasanggrahan maupun di desa Tanjungsari.

Berbagai ilustrasi historis sebagaimana dikemukakan di atas diharapkan dapat memahami sistem politik dan sistem kepemimpinan

yang tumbuh dan berkembang sekarang, baik di desa Pasanggrahan maupun di desa Tanjungsari dalam suatu sistem birokrasi nasional. Sebagaimana dikemukakan terdahulu, sistem politik dan sistem kepemimpinan yang ada sekarang di kedua desa tersebut ditandai dengan adanya interaksi dan perpaduan antara peranan yang dimainkan oleh unsur kekuatan *umaroh*, ulama dan *jawara* atau perpaduan di antara keduanya (jawara-ulama).

Di desa Tanjungsari yang merupakan desa pedalaman (*hinterland*) dari desa Pasanggrahan (ibukota kecamatan), *kokolot* desa terfokuskan pada seorang kiyai bernama Haji Machmud. Sehari-hari ia dipanggil masyarakat dengan sebutan "Abah (Bapak)", artinya orang yang dihormati. Sebutan tersebut khas Sunda, tidak bernafaskan keagamaan. Abah Machmud bersama adiknya Haji Hayat, hidup sederhana tinggal dalam sebuah kompleks pesantren, mengurus para santri yang datang dari berbagai penjuru Nusantara. Nama pesantren tersebut adalah "Hamidiyah", diambil dari nama orang tuanya. Banyaknya para santri yang datang dari berbagai daerah di Indonesia, menunjukkan pula besarnya wibawa dan pengaruh Abah Machmud dalam bidang agama. Ia dikenal masyarakat luas sebagai seorang ahli pencak silat (pendekar), memiliki kekebalan, dan karena kualitas pribadinya itu ia dihormati serta disegani sebagai pemimpin masyarakat. Sebagai seorang kiyai, Haji Machmud bukan saja sebagai seorang guru agama, tetapi para santri dan masyarakat sekitarnya mengakui bahwa ia sebagai seorang yang dipertua, *kokolot* dan pemimpin masyarakatnya. Oleh karenanya ia diakui masyarakat memiliki wibawa yang bersifat lahir dan bathin. Inilah suatu "tipe ideal" dari seorang *jawara-ulama*. Dalam perjalanan hidupnya ia mencatat sebagai seorang pejuang kemerdekaan dan pernah menjabat sebagai camat di Ciomas (1945), Pabuaran (1946) dan di Cipetir (1947). Pada Pemilu (Pemilihan Umum) 1971 ia membentuk Satkar (Satuan Karya) ulama se-daerah Banten bekerjasama dengan Danrem (Komandan Resimen) "Maulana Yusuf" Serang, Kolonel Anwar. Sebelumnya, ia tercatat sebagai seorang aktivis PSII (Partai Serikat Islam Indonesia). Pada sidang MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) 1982–1985 ia merupakan salah seorang utusan daerah Jawa Barat dan merupakan anggota tertua MPR. Pendidikan formal yang diperolehnya mencapai kelas III SD. Sejak dulu ia dikenal masyarakat melampaui batas-batas desanya. Hampir setiap hari banyak orang, baik masyarakat biasa maupun para pejabat sipil ataupun militer, berkunjung untuk sila-

turahmi meminta do'a atau nasihat agar selamat dalam hidup, berhasil dalam usaha, dan lain-lain. Selain Abah Machmud masih ada figur *kokolot* yang lain di sekitar Desa Tanjungsari, antara lain Haji Idis, Haji Hadil, Haji Hayat adik Abah Machmud.

Di desa Pasanggrahan, para *kokolot* desa juga sebagaimana terjadi di Desa Tanjungsari, didominasi oleh para ulama atau *jawara-ulama* yang berpusat di pesantren-pesantren. Dapat dikemukakan nama-nama para *kokolot* desa tersebut, antara lain, Haji Satari, Haji Adung, Haji Zamra, dan Ki (Aki) Jubaedi. Di antara nama-nama tersebut ada yang bekas lurah, dan mereka itu termasuk para bekas pejuang kemerdekaan yang aktif. Ke semua *kokolot* desa tersebut masih berkiblat pada pengaruh dan wibawa Haji Machmud di Desa Tanjungsari. Berbagai masalah yang menyangkut kehidupan masyarakat desa biasanya dibicarakan di antara para *kokolot* desa dari masing-masing desa tersebut mereka bertemu dalam suatu pertemuan yang informal. Biasanya mereka sering melakukan kunjungan satu sama lain pada saat-saat luang. Dalam kesempatan bertemu itulah biasanya mereka memusyawarahkan berbagai kehidupan masyarakat desa. Dalam menentukan keputusan, peranan dan wibawa Haji Machmud sangat dominan dan pendapatnya didengar oleh para *kokolot* desa dari desa lain. Bagaimana tingkat kewibawaan dan kharisman di antara masing-masing *kokolot* desa dalam pandangan masyarakat di kedua desa dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6
Orang-orang yang dipertua di Desa Pasanggrahan
dan desa Tanjungsari
(masing-masing desa N = 100)

Nomor	Desa Pasanggrahan N a m a	%	Desa Tanjungsari N a m a	%
1	Haji Satrai	48	Haji Machmud	49,7
2	Ki (Aki) Jubaedi	20,4	Haji Hadil	17,5
3	Haji Adung	11,6	Haji Idis	16,9
4	Haji Zamra	9,3	Haji Hayat	13,2
5	Haji Abubakar	5,7	Bapak Juhra	2,7
6	Ki (Aki) Emed	5		

Sumber : Diolah dari kuesioner dan hasil observasi, 1983.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa penilaian masyarakat berbeda terhadap masing-masing *kokolot* desa di kedua desa tersebut. Perbedaan penilaian tersebut tentu didasarkan pada pengakuan masyarakat terhadap intensitas dan kualitas pribadi seorang *kokolot* desa. Di sini jelas Haji Satrai (48%) dan Haji Machmud (497%) dapat dinilai sebagai "*central figure*" di kampung mereka masing-masing, dan dengan demikian mereka berdua memiliki "posisi kunci" dalam kehidupan sosial masyarakat desa.

Selanjutnya kriteria apa yang mendorong seseorang untuk diakui masyarakat sebagai seorang *kokolot* desa yang disegani, dapat dilihat dalam tabel halaman berikut ini.

Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa pandangan masyarakat terhadap *kokolot* desa itu dilandasi berbagai macam faktor sesuai dengan berkembangnya cara berfikir dan pengetahuan masyarakat yang bersangkutan. Dalam kaitan ini, tanggapan masyarakat desa Pasanggrahan agaknya lebih memperinci keabsahan seorang *kokolot* desa dengan dicantumkan seperti kata-kata, "wibawa", "membimbing masyarakat", dan lain-lain. Hal ini dapat dinilai sebagai suatu gambaran idea dari masyarakat yang sudah dipengaruhi lebih banyak cara berfikir yang lebih terbuka. Sedangkan hal tersebut di atas tidak tampak pada sikap masyarakat desa Tanjungsari. Pada masyarakat desa ini, agaknya yang paling penting dari seorang *kokolot* desa adalah kedalaman ilmu dalam pengertian "ilmu" (kedalaman pengetahuan agama dan termasuk kekebalan) di samping faktor usia. Dalam konsep tradisional, sebenarnya pengertian "tua" (kolot) sebagaimana dikemukakan oleh masyarakat desa Tanjungsari, mencakup juga pengertian pengalaman, wibawa, dan lain-lain. Dan tingginya penghargaan terhadap seseorang yang memiliki latar belakang ilmu keagamaan, sebagaimana tampak dari tanggapan masyarakat desa Pasanggrahan (47%) dan masyarakat desa Tanjungsari (98%), menunjukkan secara struktural konsep berfikir dan bertindak masyarakat di kedua desa tersebut masih memiliki nilai-nilai yang relatif sama. Oleh karenanya, maka pada masyarakat kedua desa tersebut, unsur agama masih tetap memegang peranan penting, menduduki "posisi sentral" dalam membentuk keabsahan seorang *kokolot* desa.

Selanjutnya, peranan yang diberikan para *kokolot* desa sangat besar dalam menentukan seorang berhasilnya untuk menduduki jabatan kepala desa (jaro). Sebelum diadakan pemilihan kepala desa, para *kokolot* desa biasa menyelenggarakan pertemuan "tertutup"

untuk melakukan seleksi terhadap para calon yang akan ditampilkan dalam pemilihan kepala desa. Dalam pertemuan tersebut terjadi tawar-menawar di antara para *kokolot* desa tersebut dan dalam peristiwa seperti ini pengaruh seorang *kokolot* yang cukup dominan di antara mereka berperan memberikan keputusan akhir. Biasanya muncullah calon yang akan tampil dalam pemilihan kepala desa yakni seorang yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan *kokolot* desa yang memiliki kedudukan dominan tersebut. Sedangkan dalam suatu desa di mana tidak ada seorang *kokolot* yang cukup dominan dalam menentukan sikap akhir, maka kembali pilihan pada seorang yang didasarkan pada keturunan kepala desa sebelumnya. Keadaan ini tampak di desa Tanjungsari misalnya, kepala desa sekarang dipegang oleh Bapak Goji, seorang keponakan Abah Machmud dan masih merupakan keponakan Haji Rajik, kepala desa sebelumnya. Sedangkan di desa Pasanggrahan Bapak Satibi, kepala desa sekarang adalah adik kandung Bapak Haji Mohammad Syafe'i, kepala desa Kadubeureum, di mana keduanya masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Bapak Jubaedi, kepala desa Kadubeureum sebelumnya.

Di kalangan masyarakat di kedua desa tersebut agaknya telah memiliki cukup kesadaran bahwa kepala desa dipilih masyarakat. Menjawab pertanyaan, "siapa saja yang memilih kepala desa" (dari masing-masing desa, N = 100), masyarakat desa Pasanggrahan mengemukakan bahwa "kepala desa dipilih masyarakat" (85,6%), sedangkan sebanyak (12,5%) tidak memberikan jawaban. Kemudian, di desa Tanjungsari yang memberikan jawaban sama atas pertanyaan sebagaimana dikemukakan di atas sekitar (99%), dan sekitar (1%) tidak memberikan jawaban. Selanjutnya, pandangan masyarakat tentang "asal daerah" dari seorang kepala desa, mereka mengemukakan "sebaiknya kepala desa adalah penduduk asli desa yang bersangkutan". Hal ini dikemukakan oleh sekitar (73%) responden dari desa Pasanggrahan dan sekitar (27%) dari responden tidak memberikan jawaban. Sedangkan di desa Tanjungsari pandangan tersebut diberikan oleh sekitar (98%) dan (2%) dari responden tidak memberikan jawaban. Alasan yang dikemukakan oleh masyarakat di kedua desa terhadap pandangan tersebut di atas adalah "karena orang luar desa tidak mengetahui adat kebiasaan yang berlaku di desa ini".

Berbagai uraian di atas agaknya memperlihatkan bahwa sistem kepemimpinan yang berlaku sekarang di kedua desa tersebut memperlihatkan bahwa pengaruh *kepala* desa yang sangat dominan. Mes-

kipun pada masa sekarang seorang kepala desa sangat menentukan dalam memilih seorang calon. Dengan demikian secara demokratis masyarakat desa tidak menentukan pilihannya. Tampaknya, keadaan demikian tidak merupakan suatu hal prinsip di kalangan masyarakat desa, karena memang mereka tidak ingin memecahkan masalah, dan bahkan mereka sering menghindari pengambilan keputusan oleh dirinya karena terlalu terbiasa menyandarkan nasibnya kepada orang lain, seperti kepada para *kokolot* desa atau kepada lurah setempat.

Suatu hal yang menarik dalam menentukan kepala desa di kedua desa tersebut dari dulu hingga sekarang adalah dalam proses penentuan calon kepala desa tersebut faktor keturunan dan "kejagoan" termasuk konsep kekebalan, masih merupakan pertimbangan utama para *kokolot* desa. Faktor tersebut agaknya masih sangat diperlukan dalam menanamkan pengaruh dan wibawa di kalangan masyarakat yang masih bersifat traditional.

Dengan kharisma *kokolot* desa seorang kepala desa dapat mengambil keputusan menerima atau menolak secara sangat halus usul-usul proyek pembangunan desa yang ditawarkan dari atas. Dalam pandangan para *kokolot* desa, kepala desa dianggap merupakan orang yang terpercaya dalam menyelesaikan masalah-masalah keduniaan. Sejalan dengan anggapan tersebut masyarakat desa mempercayakan nasib dan pemikirannya kepada kepala desa sebagai orang yang dianggap "lebih tahu".

Demikianlah intraksi dan perpaduan dari permainan antara unsur-unsur traditional (ulama dan *jawara*) sebagai *kokolot* desa dengan unsur-unsur formal (*umaroh*), dalam hal ini kepala desa dengan para pembantunya *parabot* desa), ke semua kekuatan tersebut membentuk suatu sistem politik dan sistem kepemimpinan yang tumbuh dan dianut masyarakat desa Pasanggrahan dan Tanjungsari di daerah Banten Selatan.

Tabel 7
Tanggapan dan Pengakuan Masyarakat terhadap *Kokolot* Desa
di Desa Pasanggrahan dan Desa Tanjungsari
(masing-masing Desa N = 100)

Nomor	Desa Pasanggrahan Pendapat Masyarakat	%	Desa Tanjungsari Pendapat Masyarakat	%
1	Pandai dan berpengaruh dalam Bidang Agama	47	Ilmunya tinggi	59
2	Berwibawa	15	Ilmu dan usianya tua	39
3	Dapat membimbing masyarakat	6		
4	Karena jabatan	3		
5	Tidak memberikan jawaban	29	Tidak memberikan jawaban	2
	Jumlah	100		100

Sumber: Diolah dari Kuesioner dan Hasil Observasi, 1983.

BAB IV

POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DI BIDANG SOSIAL

1. Organisasi Dalam Kegiatan Sosial

Sediono M.P. Tjondronegoro (1982: 216) mengemukakan bahwa: ".....pengertian organisasi itu mencakup kerangka yang luas daripada kedudukan pelaku sosial dalam susunan tertentu (*hierarchical*), peranan yang dikaitkan pada kedudukan, corak kerja (*procedure*) dalam sistem nilai yang mendasari *prosecure* termasuk kode etik dalam birokrasi."

Biasanya suatu organisasi yang dibentuk memiliki tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut harus ditunjang oleh adanya kegiatan dari orang-orang yang terlibat dalam organisasi itu. Agaknya, supaya fungsi dari bagian-bagian keseluruhan organisasi dapat efektif melakukan tugasnya, maka diadakan "aturan permainan" yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan organisasi.

Namun demikian, agaknya bagi sebagian besar masyarakat di desa Pasanggrahan dan Tanjungsari bentuk organisasi sebagaimana dikemukakan di atas, dirasakan sebagai suatu hal yang asing dalam konsep berfikir mereka. Pengertian itu sulit untuk diikutinya dan bahkan di luar jangkauan perhatian mereka. Hal ini dapat dilihat dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh sekitar 100 orang responden dari masing-masing desa tersebut, antara lain terhadap pertanyaan tentang "organisasi yang mereka ketahui sebagai wadah kegiatan kemasyarakatan", hampir (50%) dari responden di kedua desa tersebut tidak memberikan jawaban. Sejalan dengan kenyataan tersebut di atas, Sediono M.P. Tjondronegoro (1982: 217) mengemukakan ".....bahkan setelah peristiwa 30 September 1965..... organisasi lebih digambarkan sebagai hasil perwujudan ideologi yang dihubungkan dengan partai-partai politik tertentu yang dikenal sebagai gambaran massa dan dicirikan oleh disiplin partai yang ketat. Tampaknya memang organisasi terletak di luar jangkauan perhatian masyarakat pedesaan yang sedikit banyak terpencil dan terpisah".

Agaknya, di kalangan masyarakat desa gambaran mereka tentang "Organisasi yang mereka ketahui sebagai wadah kegiatan Masyarakat" langsung akan menunjukkan pada LKMD (Lembaga Ketahanan Ma-

syarakat Desa) sebagai wadah kegiatan sosial mereka. Hal ini terlihat dari jawaban responden terhadap pertanyaan sebagaimana dikemukakan di atas tadi. Hampir sekitar (19%) di desa Pasanggrahan menjawab LKMD sebagai wadah kegiatan sosial mereka. Sedangkan di desa Tanjungsari jawaban sekitar (33,5%). Sebelumnya wadah kegiatan sosial masyarakat desa adalah LSD (Lembaga Sosial Desa). Baik LSD maupun LKMD merupakan program pemerintah untuk mencoba menghidupkan aktivitas sosial masyarakat desa.

Namun demikian, hingga sekarang baik LSD maupun LKMD dengan personalia lengkap yang langsung dipimpin oleh kepala desa belum memperlihatkan aktivitas yang memadai di kedua desa tersebut. Aktivitas sosial masyarakat di kedua desa tersebut dilaksanakan melalui pranata sosial yang bersifat tradisional yang berakar dalam adat kebiasaan mereka, seperti kebiasaan *royongan*, *liliuran*, pengajian bersama, arisan ibu-ibu, dll.

LKMD di kedua desa tersebut dipimpin langsung oleh masing-masing kepala desa, sedangkan jabatan lain dipegang oleh anggota masyarakat. Selain terdapat seorang ketua umum dalam wadah LKMD ini, terdapat pula seorang ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara. Sedangkan seksi-seksi mencakup kegiatan, antara lain, keamanan dan ketertiban, urusan keagamaan, urusan gotong-royong desa, olah raga dan kesenian, kegiatan pemuda, PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga). Pen Mas (Pendidikan Masyarakat), kesehatan dan keluarga berencana (KB) dan urusan ekonomi.

Berdasarkan berbagai penjelasan dari masing-masing kepala desa di kedua desa tersebut, hingga sekarang kegiatan LKMD belum menunjukkan aktivitasnya sesuai dengan harapan. Hal ini mungkin karena berbagai kegiatan sosial masyarakat desa telah berjalan sebagai

Pelaksanaan KB, baik di desa Pasanggrahan maupun di desa Tanjungsari, dilaksanakan ibu-ibu dengan cara suntikan dan pil. Pemasangan IUD belum bisa dilakukan karena kondisi sosial masyarakat yang belum memungkinkan. Seperti ungkapan di kalangan ibu-ibu "*abdi mah isin dipasang spiral mah*, (saya malu kalau dipasang spiral)". Ungkapan tersebut menunjukkan sikap menolak secara sangat halus terhadap metoda kontrasepsi tersebut. Secara tradisional, ibu-ibu yang ingin menjarangkan kelahiran biasanya meminum air beras kencur dicampur dengan ragi. Sementara itu ulama dan para *kokolot*

desa menerima adanya program KB dengan asumsi bahwa KB dapat dilaksanakan apabila yang bersangkutan melaksanakan program tersebut untuk melancarkan kepentingan ibadah. Sebagai contoh, kalau seandainya seorang tidak melakukan KB (melahirkan terus-menerus tiap tahun sehingga yang bersangkutan terganggu ibadahnya, seperti sholatnya, ngaji bersamanya karena terus-menerus harus mengurus bayi). Maka melaksanakan KB untuk itu bersifat "*wenang*" (dapat dilakukan). Dalam hubungan dengan program KB yang dapat bersifat *wenang* atau *haram* peranan dan petunjuk para ulama dan *kokolot* desa sangat menentukan.

Di desa Pasanggreh dan Tanjungsari kesatuan wilayah desa yang menonjol dalam pola kehidupan sosial masyarakatnya adalah dalam bentuk Rukun Kampung (RK). Pada setiap RK di kedua desa tersebut terdapat sebuah langgar. Langgar tersebut di samping tempat sembahyang bersama juga biasa digunakan untuk pertemuan warga kampung dan pengajian bersama (pria, wanita dan anak-anak). Pengajian seperti ini biasanya dalam bentuk ceramah dari seorang kiyai. Sedangkan pertemuan *kokolot* kampung bersama ketua RK biasanya dilakukan di rumah ketua RK yang seringkali juga berstatus salah seorang *kokolot* kampung dalam kampung tersebut.

Kerja bakti sebagai salah satu bentuk kegiatan sosial dilakukan pula atas inisiatif kepala kampung bagi pekerjaan yang menyangkut kepentingan masyarakat dalam satu kampung. Bentuk-bentuk kegiatan yang sering dilakukan dalam katagori ini, di kedua desa tersebut adalah kegiatan gotong-royong masyarakat kampung dalam rangka memperbaiki langgar, jalan kampung atau jalan desa, gotong-royong, dan lain-lain, yakni cara yang mereka sebut *royongan*. Bentuk kerjasama lain yang masih bersifat *royongan* adalah semacam koperasi, di mana ketua kampung atau kokolot desa mengumpulkan sejumlah uang dari tiap kepala keluarga di kampung yang bersangkutan. Selanjutnya, uang tersebut apabila sudah mencukupi dibelikan kepada seekor kerbau untuk kemudian disembelih nanti pada Hari Raya Idulfitri atau Hari Raya Kurban. Kemudian daging kerbau tersebut dijual kepada masyarakat yang memerlukan untuk keperluan lebaran. Cara demikian sangat membantu masyarakat yang tidak mampu, karena bisa membeli daging relatif lebih murah dari pada di pasar. Keuntungan dari penjualan daging tersebut digunakan warga kampung untuk memperbaiki langgar. Orang yang memiliki kerbau secara pa-

tungan, di samping memperoleh dagingnya juga berbuat amal karena ia telah mencari dana untuk memperbaiki langgar. Kerjasama *royongan* seperti ini pelaksanaannya amat sederhana, karena tidak memerlukan tenaga pengelola (organisasi) yang rumit seperti halnya bentuk kerjasama yang diperintahkan dari atas. Bentuk *royongan* yang asli, tidak memerlukan banyak tenaga, cukup dengan tiga orang penanggung jawab saja, yaitu: kepala kampung sebagai penanggung jawab semua kegiatan dari mulai penarikan uang dari para peserta, pembelian kerbau, penyembelihan, pembagian daging kepada yang berhak, sampai menyerahkan uang sisa yang disumbangkan bagi keperluan perbaikan langgar. Biasanya, kepala kampung dibantu oleh 2–3 orang pembantu yang diambil dari kalangan keluarganya untuk melaksanakan kegiatan itu.

Pada kenyataannya kerjasama antara warga desa mudah digerakkan, karena masyarakat merasa bahwa kegiatan tersebut akan dipaksakan dari atas, tetapi didasarkan atas saling percaya-mempercayai yang menumbuhkan kesadaran masing-masing warga desa untuk ikut serta dalam kegiatan seperti yang dikemukakan di atas. Bentuk kegiatan sosial lainnya adalah *liliuran*, yakni bentuk kerja atau sistem pengerahan tenaga sukarela untuk membantu pengolahan sawah atau ladang. Caranya adalah anggota masyarakat bekerja secara sukarela, bergiliran di antara para pemilik atau pengolah sawah dan ladang. Dengan demikian sawah atau ladang dapat ditanami atau dituai tepat pada waktunya. Kegiatan ini juga dilakukan antara warga kampung.

Bentuk kegiatan sosial lainnya yang dilakukan masyarakat di kedua desa tersebut adalah kegiatan di bidang penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat di tiap kampung. Di bidang keamanan dan ketertiban bersama ini kepala kampung bertanggung-jawab dalam hal pelaksanaan kegiatan ronda atau jaga malam yang berlaku di kampung yang dibawahinya. Pelaksanaan ronda tersebut adalah kepala-kepala keluarga yang tinggal di kampung tersebut. Wajib ronda yang dikenakan kepada kepala keluarga ini diatur sedemikian rupa, sehingga tiap malam sedikitnya ada 2–3 orang peronda, dan tidak satu malam pun tanpa meronda. Apabila seseorang wajib ronda sakit, ia digantikan oleh tenaga cadangan yang bertindak sebagai wakil kalangan keluarga sendiri atau orang lain. Pengaturan ronda dengan cara giliran itu dilakukan di bawah pengawasan kepala kampung yang bersangkutan. Kepala kampung inilah yang kemudian harus memper-

tanggung-jawabkan segala kejadian yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat dalam kampungnya kepada *parentah desa*, dalam hal ini kepada polisi desa. Aparat *parentah desa* inilah yang bertanggung-jawab kepada kepala desa tentang keamanan dan ketertiban seluruh desa. Oleh karena itu polisi desa harus mengkoordinasikan tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang dibebankan kepada kepala kampung dalam lingkungan desa yang bersangkutan. Dalam melaksanakan tugas keamanan dan ketertiban desa ini, seorang polisi desa dibantu oleh petugas keamanan desa yang biasa disebut HANS-SIP/HANRA (Pertahanan Sipil/Pertahanan Rakyat). Di desa Tanjung-sari saja ada sekitar 112 orang HANSIP/HANRA dan sebanyak 12 orang HANRA. Dengan demikian para wajib ronda berperan sebagai pembantu keamanan desa dan mereka berasal dari keluarga masyarakat sendiri.

Kegiatan sosial berikutnya yang dilakukan masyarakat di kedua desa tersebut untuk memenuhi perintah Camat adalah bentuk kerja sama antar desa. Kegiatan ini dapat berbentuk kerja bakti untuk memperbaiki jalan desa sesuai dengan program perbaikan jalan atau biaya pemerintah daerah. Demikian pula dengan perbaikan jembatan dan gorong-gorong yang menggunakan sistem pengerahan tenaga kerja dengan cara dibayar (program padat karya). Kegiatan kerja bakti dengan sistem gotong-royong biasa pula dilakukan atas perintah kepala desa, meskipun kegiatan tersebut tanpa bayaran. Kebanyakan sistem gotong-royong di desa dilakukan tanpa perintah kepala desa, tapi lebih banyak atas inisiatif *kokolot* desa.

Selanjutnya, perselisihan di antara warga kampung, biasanya cukup diselesaikan oleh *kokolot* kampung atau ketua kampung yang bersangkutan. Tetapi apabila perselisihan itu melibatkan warga antar desa, maka diadakanlah musyawarah di antara *kokolot* desa dari desa-desa yang bersangkutan. Caranya adalah *kokolot* desa dari desa A diundang untuk datang ke suatu tempat yang telah ditentukan di desa B untuk melakukan musyawarah. Akan tetapi apabila masyarakat *kokolot* desa A tersebut lebih berwibawa dari pada *kokolot* desa B, maka para *kokolot* dari desa B yang datang menemui *kokolot* desa A untuk melakukan musyawarah. Apabila di antara para *kokolot* desa tersebut telah melakukan jabat-tangan maka persoalan sudah dianggap selesai.

Namun demikian, apabila masalah yang menimbulkan perselisih-

an itu menyangkut hal-hal yang bersifat kriminal atau pembunuhan, maka Polisi Desa, Kepala Desa dan Koramil diikutsertakan untuk menanggulangi kejadian tersebut. Setelah secara adat diselesaikan, maka kemudian kejadian tersebut dilaporkan kepada yang berwajib untuk diselesaikan secara hukum. Kemungkinan lain dapat terjadi apabila salah satu pihak tidak menerima uluran tangan dalam musyawarah. Bila demikian halnya, permasalahan dibawa ke tingkat desa atau kecamatan untuk diselesaikan melalui hukum. Biasanya perselisihan di antara warga kampung atau warga desa terjadi karena pertengkaran dalam pertandingan sepak bola antar desa, gara-gara mempermainkan gadis di tempat keramaian, atau berebut pacar di kalangan anak-anak remaja. Di kalangan orang dewasa perselisihan terjadi karena masalah air sawah, pencurian, dan lain-lain. Tetapi apabila kemudian terjadi kembali pencurian oleh orang yang pernah mencuri, umpamanya, jangan mengharap orang itu akan selamat, sebagaimana diungkapkan oleh Haji Hayat, salah seorang *kokolot* desa Tanjungsari "*maok dua kali eumeur* (mencuri untuk kedua kalinya remuk)".

Dalam dunia hukum mereka mengenal adanya bentuk hukum negara. Menurut anggapan mereka harus dianut oleh para petugas negara, termasuk RT dan RK dalam menyelesaikan suatu perselisihan. Kedua, *hukum sara* yang dipegang oleh para *kokolot* desa, termasuk para ulama dan *kokolot* kampung dalam menyelesaikan suatu perselisihan. Menurut Haji Hayat, hukum sara dipegang oleh *nu ngatur agama* (yang mengatur agama) tempatnya di mesjid. Sedangkan hukum negara tempatnya di balai desa dalam menyelesaikan suatu perkara.

Untuk sekedar melihat gambaran bagaimana *kokolot* desa berperan menjadi penengah dalam perselisihan di antara warga desa, dapat dilihat dalam tabel halaman berikut ini:

Tabel 8
Penengah Perselisihan di Antara Warga Desa
(Masing-masing Desa N = 100)

Desa Pasanggrahan		Desa Tanjungsari	
Peranan yang dimainkan	%	Peranan yang dimainkan	%
Kokolot Desa	55	Kokolot Desa	66,66
Kepala Desa	39,5	Kepala Desa	33,34
Koramil	3,5		
Kepolisian	2,0		
RT	2,5		
Jumlah	100,0		100,00

Sumber: Diolah dari kuesioner dan Hasil Observasi, 1983.

Dari tabel di atas, tampak bagaimana peranan yang dimainkan para *kokolot* desa di kedua desa tersebut. Sebanyak (55%) di Desa Pasanggrahan dan sekitar (66,66%) di Desa Tanjungsari mengatakan bahwa *Kokolot* desa merupakan unsur penengah dalam berbagai bentuk perselisihan di antara warga desa. Tampaknya Koramil dan Kepolisian serta ketua RT kurang berpengaruh dalam turut menyelesaikan berbagai perselisihan, bahkan di desa Tanjungsari hanya menunjuk pada dua macam kelembagaan saja, *kokolot* desa dan kepala desa.

Demikian pula sejumlah responden tersebut dalam menjawab pertanyaan "siapakah yang menggerakkan atau pelopor dalam berbagai aktivitas sosial", baik di desa Pasanggrahan (70%) maupun di Desa Tanjungsari (80%) mengemukakan *kokolot* desa dan ulama. Sedangkan sisanya mengemukakan (15%) di Desa Pasanggrahan dan (20%) di Desa Tanjungsari mengemukakan kepala desa. Di Desa Pasanggrahan masih ada sekitar (15%) mengemukakan bahwa

Wadah aktivitas generasi muda baik di Pasanggrahan maupun di Tanjungsari adalah AMS (Angkatan Muda Siliwangi). Organisasi ini bergerak dalam bidang politik, ekonomi dan kepemudaan dan mempunyai jalur sampai tingkat propinsi. Banyak di antara anggota dan aktivis organisasi ini menduduki jabatan penting di kedua desa tersebut. Selanjutnya, di kalangan pelajar yang ada di sekitar kedua desa tersebut, mereka membentuk organisasi yang merupakan wadah kegiatan mereka. Di Pasanggrahan organisasi pelajar tersebut bernama GREES (Gerakan Remaja Sampingan), diketuai oleh seorang pelajar bernama Rachmat. Sedangkan di desa Tanjungsari organisasi pelajar tersebut bernama KOPERO (Korps Pelajar Reformis). Kata "reformis" yang mereka artikan sebagai "pembaharuan" dalam kehidupan generasi muda. Hingga kini KNPI/AMPI belum menjangkau generasi muda yang ada di kedua desa tersebut. Salah seorang tokoh KOPE-RO adalah Haji Abidin, salah seorang pelajar Sanawiyah di desa tersebut dan kini ia tinggal di Bogor untuk melanjutkan pendidikannya.

Kegiatan kedua organisasi tersebut dalam bidang sosial bersama-sama penduduk desa lainnya ialah melakukan kerja bakti memperbaiki jalan dan pembinaan dalam bidang kesenian dan olah raga. Bentuk kesenian yang mereka kembangkan adalah kasidah, rudat, pencak silat. Pertunjukan kesenian itu dilakukan pada saat selamatan penduduk, hari besar nasional (17 Agustus, Sumpah Pemuda dan lain-lain). Sedangkan macam olah raga yang mereka kembangkan adalah volly ball, badminton, catur dan sepak bola.

Komunikasi melalui Koran Masuk Desa belum begitu memasyarakat. Hingga sekarang koran tersebut baru masuk pada tingkat kecamatan yang terbatas dibaca oleh para pamong desa saja. Program tersebut di Kecamatan Pabuaran ialah dengan cara disebarkannya surat-kabar "*Bandung Post*", sebuah surat-kabar milik Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat. Penjelasan-penjelasan dan pengumuman kepala desa atau para *kokolot* desa, biasanya dilakukan di langgar-langgar atau mesjid desa dalam acara pengajian bersama. Masyarakat desa di kedua desa tersebut tidak pernah mendengarkan warta berita, baik melalui radio apalagi melalui TV. Di Desa Tanjungsari ada beberapa orang yang mempunyai TV, tetapi mereka lebih senang menonton acara hiburan. Hal-hal yang serious tidak mereka sukai. Mereka mengakui bahwa berita-berita penting mereka peroleh dari aparat desa atau dari para *kokolot* desa, seperti mengenai peristiwa "gerhana matahari total", mereka peroleh berita tersebut di mesjid pada saat

sembahyang jamaah. Mereka diminta para kokolot desa untuk membersihkan badan (mandi) dan sembahyang gerhana.

Demikianlah beberapa bentuk organisasi sosial dan kegiatannya yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat desa Pasanggrahan dan Tanjungsari sekarang.

2. Sistem Kepemimpinan

Sebagaimana diuraikan terdahulu, sistem kepemimpinan yang berlaku di desa Pasanggrahan dan Tanjungsari ialah ditandai dengan adanya dua jalur bentuk kepemimpinan. Pertama, kepemimpinan dalam jalur formal, dan kedua, kepemimpinan dalam jalur yang bersifat informal. Kedua jalur tersebut berperan bersama-sama saling mengisi dalam melaksanakan kehidupan sosial di kedua desa tersebut. Pada jalur formal peranan utama dipegang oleh kepala desa di masing-masing desa tersebut, dan jalur informal biasa dipegang oleh para *kokolot* desa yang berstatus sebagai ulama atau kokolot desa tersebut, baik dalam kegiatan sosial maupun dalam kegiatan yang bersifat kerohanian.

Dalam membicarakan sistem kepemimpinan yang bersifat informal di kedua desa tersebut, kita tidak dapat melepaskan wibawa, pengaruh dan peranan seorang *kokolot* desa yang tinggal di Desa Tanjungsari. Hal ini dikarenakan wibawa, pengaruh dan peranan sebagai pimpinan informal bergema hingga di luar batas-batas desanya sampai ke tingkat kecamatan, kabupaten dan daerah tingkat I Jawa Barat, bahkan cukup pula berpengaruh dalam tingkat nasional. *Kokolot* tinggal di pesantren "Hamidiyah". Kiyai inilah yang mengatur dalam berbagai kegiatan sosial maupun keagamaan di Kecamatan Pabuaran.

Dalam kegiatan pengajian, misalnya, pelaksanaannya diawasi pada tiap-tiap kampung oleh ketua kampung yang juga mereka anggap sebagai *kokolot* desa. Biasanya orang yang menentukan seorang ketua kampung mampu atau tidak menyelenggarakan pengajian bersama adalah Abah Machmud sendiri. Di antara para kokolot desa yang tersebar di sekitar Kecamatan Pabuaran ada yang bekas teman seperjuangan atau masih termasuk keluarga Abah Machmud. Setidaknya ia mengetahui benar tentang kehidupan masa lampau, termasuk pendidikan dan pengalaman masa kecil para *kokolot* desa di sekitar Kecamatan Pabuaran. Dengan demikian, Abah Machmud menggunakan semacam kriteria untuk menentukan siapa yang pan-

tas untuk menjadi pembantu-pembantu dan kawan setia dalam kerangka melaksanakan pengajian dan kegiatan sosial lainnya.

Sebagai seorang "central figure" di wilayah kecamatan Pabuaran, ia membina hubungan yang akrab dengan para kokolot desa lain. Di desa Tanjungsari, sebagai tempat melakukan berbagai perintahnya ia selalu berhubungan erat dengan Haji Idis, Haji Hadil, Haji Juhra dan Haji Hayat di mana mereka itu memiliki pula peranan penting dalam menyelenggarakan pengajian maupun kegiatan lainnya. Sedangkan di desa Pasanggrahan Abah Machmud selalu berhubungan erat dengan Haji Satrai, Ki Jubaedi, Haji Adung dan Haji Zamra. Mereka inilah yang memegang peranan penting terselenggaranya kegiatan pengajian dan kegiatan sosial lainnya.

Para *kokolot* desa tersebut pada waktu-waktu tertentu datang ke pesantren Abah Machmud untuk mendiskusikan berbagai perkembangan sosial. Tentu sebagai seorang yang dianggap memiliki pengalaman dan kualitas kepemimpinan yang lebih daripada kokolot desa lainnya, ia selalu memberikan saran, petunjuk dan pengarahan kepada para *kokolot* desa yang datang berkonsultasi padanya.

Dalam usaha melicinkan jalan untuk berhubungan dengan fihak di luar desa Abah Machmud mendirikan organisasi sosial keagamaan yang didukung oleh sebagian besar ulama Banten. Organisasi tersebut bernama *SATKAR ULAMA* (Satuan Karya Ulama). Kini ia menjabat sebagai salah seorang ketua. Dalam kenyataannya organisasi tersebut telah banyak memberikan keuntungan baik yang bersifat kebendaan maupun kerohanian, khususnya dalam membantu pembinaan pendidikan keagamaan di desa. Banyak kalangan penjabat, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi sampai tingkat pusat, memberikan bantuan pembangunan sarana pendidikan dan sarana ibadah. Sekarang telah berdiri sarana tersebut di desa Tanjungsari.

Menurut pengakuan Haji Machmud, tujuan mendirikan *SATKAR ULAMA* adalah ingin mempersatukan para ulama dalam satu wadah yang dianggap penting untuk meningkatkan peranan ulama dalam alam pembangunan sekarang. Menurut anggapannya seorang pemimpin harus memperoleh dukungan dari atas maupun dari bawah. Namanya *SATKAR ULAMA* memperoleh dukungan semacam itu, karena segala kegiatan organisasi tersebut selalu memperoleh dukungan, setidak-tidaknya dari kalangan ulama yang sefaham dengan dia.

Selanjutnya, di Desa Pasanggrahan dan Tanjungsari banyak para *kokolot* desa yang merangkap sebagai ketua kampung (RK). Dalam keadaan inilah sesungguhnya bertemu tugas-tugas formal (perintah melalui kepala desa) dan tugas-tugas sosial yang bersifat informal (perintah melalui *kokolot* desa atas dasar musyawarah di antara mereka). Maka dengan demikian setiap RK atau RT memiliki fungsi ganda, yakni sebagai aparat desa dan aparat *kokolot* desa.

Memang dalam kenyataannya jalur kepemimpinan formal dan informal dalam rangka pelaksanaan kehidupan sosial pada masyarakat desa di kedua desa tersebut sulit ditentukan batas-batasnya. Kedua jalur tersebut saling berhimpit dan saling mengisi untuk dapat memimpin masyarakat menurut tingkat dan wilayahnya. Sebagai ilustrasi, dapat dikemukakan tentang pengajian "*minggon*". Dalam kegiatan tersebut, seorang kepala kampung yang juga merangkap sebagai *kokolot* desa dapat menyelenggarakan pengajian. Demikian pula seorang kepala desa selalu mengikuti kegiatan pengajian, apabila kegiatan tersebut berlangsung di mesjid atau di langgar di kampungnya.

Untuk menghadapi tamu-tamu yang berkunjung ke Abah Machmud, ia dibantu oleh tiga orang pembantu dekat di lingkungan pesantren yang dipimpinnya. Ketiga pembantu itu melakukan tugasnya masing-masing yang berbeda-beda. Tugas-tugas tersebut adalah (1) tugas mengurus akomodasi, (2) tugas mengurus konsumsi, dan (3) tugas mengurus soal transportasi. Tugas-tugas tersebut dilakukan oleh para santri yang tergolong *senior* (antara 2 sampai 3 tahun telah menetap di pesantren tersebut). Tamu-tamu yang datang mengunjungi Abah Machmud dapat dikategorikan ke dalam tiga bagian, yakni: (1) mereka yang datang hanya sekedar untuk bertemu muka (memelihara hubungan emosional); (2) mereka yang datang untuk meminta do'a restu dari Abah Machmud sehubungan dengan kedudukannya atau usahanya agar lebih maju (biasa disebut *jarah* atau ziarah); dan (3) mereka yang datang sekedar untuk meminta obat dan do'a agar penyakit yang dideritanya cepat sembuh atau do'a agar usaha dan cita-cita orang tersebut dapat berjalan dengan lancar.

Mereka yang termasuk katagori pertama biasanya adalah teman-teman seperjuangan Abah Machmud pada masa lampau yang kini jumlahnya sudah semakin berkurang. Mereka yang tergolong kepada katagori kedua, adalah para kiyai, tokoh masyarakat setempat, dan juga dari luar desa. Mereka yang tergolong kepada katagori ketiga, adalah tamu yang memiliki perusahaan atau para pejabat daerah

bahkan dari pusat. Kepada para tamu yang meminta restu itu, Abah Machmud selalu mengingatkan setiap usaha harus diridoi Allah. Karena itu Abah Machmud selalu memberi nasihat agar mereka membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an pada setiap selesai mengerjakan sembahyang lima waktu.

Di antara tamu yang sering datang ke Abah Machmud, selain *kokolot* desa di sekitar kecamatan Pabuaran, para kepala desa dan masyarakat biasa, juga para pejabat dari berbagai daerah di Jawa Barat dan Jakarta. Mereka datang untuk bertukar pendapat mengenai berbagai hal yang dihadapinya dalam perjalanan hidupnya. Pada tingkat desa, apabila Abah Machmud ada keperluan kepada salah seorang *kokolot* desa, maka melalui salah seorang pembantunya ia mengundang untuk datang menemuinya. Biasanya, kokolot desa yang dipanggilnya itu segera datang tepat pada waktu yang dijanjikan. Berbagai petunjuk secara spontan diberikannya pada kokolot desa tersebut di hadapan siapa saja tanpa ada rahasia. Abah Machmud selalu bersikap terbuka dan spontan sebagaimana kebiasaan orang-orang Banten pada umumnya.

Menurut pendapatnya, konsep kepemimpinan yang harus dihindarkan dari setiap jiwakita, dan ini selalu diucapkan kepada para tamu atau pejabat yang datang menemuinya adalah: (1) pemimpin yang kaya tapi licik (*sugih pelit*); (2) pemimpin yang hanya kepalanya saja (*pemimpin ngan ukur huluna*). Adapun maksud pemimpin hanya kepalanya saja adalah pemimpin tanpa pengikut. Menurut Abah Machmud pemimpin semacam itu bukan pemimpin.

Dari uraian di atas maka tampaklah bahwa sistem kepemimpinan yang dianut di kedua desa tersebut didominasi oleh tokoh-tokoh informal dengan "central figure"-nya Abah Machmud yang memiliki jaringan sosial yang luas melampaui batas-batas desanya sampai ke para pejabat tinggi di Jakarta dan Bandung. Dengan kualitas kewibawaannya dan kharismanya itu ia mampu mengatur permainan, bukan saja masalah-masalah yang bersifat sosial tetapi juga masalah-masalah yang bersifat formal, seperti menentukan jabatan kepala desa, dan sebagainya.

3. Pengaruh Kepemimpinan Dalam Bidang Sosial

Pengaruh kepemimpinan informal, seperti ulama dan *jawara* atau perpaduan keduanya (ulama-*jawara*) dalam kehidupan masyarakat di kedua desa tersebut sangat besar. Hal ini mungkin karena

pola pendekatan yang dilakukan oleh para tokoh desa tersebut sesuai pandangan keagamaan masyarakat yang bersangkutan. Para ulama dan *kokolot* desa cukup berhasil dalam mempengaruhi gerak masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan yang berlaku di sekeliling mereka. Masyarakat mengakui bahwa Abah Machmud memiliki kualitas yang tinggi dalam bidang keagamaan, sedangkan untuk bidang tertentu dalam masalah urusan kebendaan mereka menunjuk kepala desa sebagai pemimpin mereka, sejauh kepala desa tersebut mendapat restu para tokoh masyarakat.

Dilihat dari segi pendidikan, para tokoh keagamaan di kedua desa tersebut memiliki tingkat pengetahuan agama yang cukup untuk menanamkan pengaruh mereka di kalangan masyarakat. Mereka rata-rata adalah keluaran pesantren terkenal di daerahnya, seperti pesantren Ciomas. "*Central figure*" Abah Machmud, yang kini hampir mencapai usia sekitar 100 tahun, memperbesar wibawanya, bukan saja karena usianya tetapi juga karena pengalamannya dalam bidang pemerintahan. Ia pernah menjabat Camat di Ciomas, Pabuaran dan Cipetir. Ia juga bekas pimpinan pejuang yang aktif di daerah Banten, dan seorang bekas salah seorang pimpinan PSII yang disegani masyarakat. Kini ia sebagai salah seorang pimpinan SATKAR ULAMA di wilayah Banten. Terakhir ia sebagai anggota tertua MPR mewakili masyarakat Jawa Barat. Sifat keradikalan yang dimilikinya, spontan dan terbuka dan keterampilan fisik yang dimilikinya sebagai bekas seorang jago pencak silat memberikan gambaran sebagai "*ideal type*" dari seorang "Jawara-ulama". Kini orang memanggilnya dengan sebutan ulama saja. Abah Machmud beranggapan bahwa "berjuang di jalan Allah adalah merupakan keharusan bagi umat Muslim." Sering ia mengemukakan pada masa perjuangan menghadapi Belanda dulu: *saha nu lumpat, lain anak aing* (siapa yang lari karena takut Belanda, bukan anak saya). Kata-kata ini diucapkan dulu sebagai usaha menanamkan keberanian terhadap anak buahnya. Berbagai program pembangunan di Pasanggrihan dan Tanjungsari, antara lain perbaikan jalan desa, gorong-gorong, jembatan serta program sosial lainnya seperti PKK dan KB, dinilai berhasil oleh masyarakat luas. Hal ini menurut anggapan masyarakat karena penggerak-penggerak pembangunan itu kebanyakan dipelopori oleh para ulama dan *kokolot* desa bekerjasama dengan kelompok masyarakat dan pemuda yang terkenal keberaniannya. Di Desa Tanjungsari, seorang pemuda yang cukup terkenal dan menduduki jabatan keamanan desa dalam LKMD

dan aktif dalam organisasi pemuda AMS, diperkenalkan oleh Abah Machmud sebagai seorang *jawara* Banten. Ia bernama Dul Jawad yang sehari-hari bekerja sebagai petani.

Ia berceritera sering diminta bantuan orang-orang kaya (istilah dia *dibon*) ke daerah Lampung untuk menjaga kebun cengkeh, ke Bandung untuk menjaga toko mas, ke Karawang atau Jakarta. "Tergantung orang yang memanggil saya," katanya. Ia juga memperlihatkan perbagai keheranan, mengapa orang datang meminta bantuannya, padahal menurut pengakuannya ia tidak bisa apa-apa. "*Kami mah ngan saukur tukang tani* (saya kan cuma sekedar tukang tani)." "Saya hanya mencoba berjalan di atas jalan Allah, sesuai dengan petunjuk dan nasihat Abah," kata Bapak Dul Jawad. Bersama para pemuda (biasa disebut *jawara-santri*) Bapak Dul Jawad sering melakukan kerja bakti di desanya.

Suatu konsep atau menurut ungkapan masyarakat *patokan hirup* (landasan hidup) yang ditanamkan dengan kereas oleh Abah Machmud terhadap para santri dan pemuda di daerah Banten, dan mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan karakter kepemimpinan dalam kehidupan masyarakat, diungkapkan oleh Haji Hayat, adik kandung Abah Machmud. *Patokan hirup* atau juga pegangan hidup tersebut adalah: *jaga mal*, artinya bahwa setiap orang harus berani mempertahankan kekayaan kita; ini berarti juga melawan orang-orang jahat. Kalau kita tidak melakukan perlawanan, maka kita termasuk orang-orang kafir, yaitu orang yang hina di muka Allah. Apabila kita tidak mampu melawannya, *teu kauntupan*, istilah Haji Hayat, maka untuk sementara kita harus pindah dulu (hijrah) sebagaimana Nabi Muhammad s.a.w. melakukannya dulu.

Patokan kedua adalah *jaga agama*, kita semua berkewajiban menjaga agama kita agar tidak tercemarkan oleh orang-orang kafir. Patokan ketiga, adalah *jaga darah* yaitu harus menjaga keselamatan diri kita sendiri sebelum orang lain akan mengganggu atau membinasakan kita, *samemeh dipaehan batur maehan heula* (sebelum dibunuh orang lain, membunuh dulu).

Apabila kita mencoba memahami patokan hirup masyarakat ini, maka memang terdapat unsur-unsur penanaman keberanian yang bersifat radikal dalam perilaku yang tetap ramah, spontan dan terbuka yang mencerminkan watak atau karakter orang-orang Banten sekarang. Inilah apa yang dinamakan "ideal type" dari kehidupan para *jawara ulama* dan *jawara-santri* yang tercermin pula dalam

pola bertindak di kalangan para *kokolot* desa masyarakat di Desa Pangsanggrahan dan Tanjungsari.

Demikianlah gambaran kepemimpinan yang berlaku di kedua desa tersebut, di mana peranan kepemimpinan yang bersifat informal sangat dominan. Selama pemerintah mampu memanfaatkan wibawa dan kharisman mereka untuk kepentingan pembangunan masyarakat desa, selama itu pula partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan. Oleh karenanya perlu terus-menerus dibina dialog dan saling pengertian antara pemerintah dengan para *kokolot* desa, sehingga benar-benar mereka memahami apa yang diinginkan dari atas, sementara dari bawah mereka dapat menunjukkan partisipasinya. Karena wibawa dan wewenang kepala desa pun tergantung dari restu mereka.

BAB V

POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DI BIDANG EKONOMI

1. Organisasi Dalam Kegiatan Ekonomi.

Baik di Desa Pasanggrahan sebagai ibukota kecamatan, maupun di Desa Tanjungsari sebagai *hinterland* dari Desa Pasanggrahan tidak terdapat kegiatan ekonomi masyarakat yang dikelola oleh organisasi ekonomi, seperti koperasi atau bentuk organisasi perekonomian lain. Sebagaimana dijelaskan terdahulu, di kedua desa tersebut sudah ada LKMD sebagai wadah kegiatan sosial masyarakat, termasuk di dalamnya kegiatan ekonomi rakyat. Tetapi LKMD tersebut belum menunjukkan kegiatan seperti yang diharapkan masyarakat. Demikian pula di Kecamatan Pabuaran terdapat sebuah bangunan BUUD/KUD yang baru dibangun, tetapi hingga penelitian ini selesai dilakukan, BUUD/KUD tersebut belum menjalankan aktivitasnya sesuai dengan tujuan badan tersebut. Bahkan bangunan tersebut dibiarkan saja sehingga tampak di sekitarnya tumbuh alang-alang, tanpa dirawat. Menurut keterangan salah seorang penduduk Desa Pasanggrahan, Ketua BUUD/KUD tersebut tidak tinggal di Desa, tetapi di kota Serang.

Kenyataan tersebut, sejalan dengan tanggapan masyarakat di kedua desa tersebut, atas pertanyaan "apakah ada koperasi di desa ini." Tidak ada seorang pun di antara responden (masing-masing desa $N = 100$) yang memberikan jawaban. Selanjutnya, pertanyaan lain yang diajukan pada responden tersebut tentang "apakah ada organisasi lain yang mengelola kegiatan ekonomi selain dari koperasi". Juga terhadap pertanyaan ini tidak seorang pun di antara responden yang memberikan jawaban.

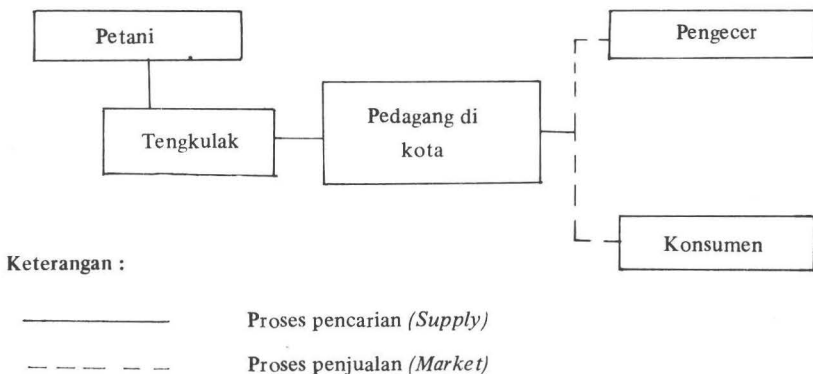
Tampaknya, kegiatan dan pengelolaan ekonomi masyarakat di kedua desa tersebut, lebih tepat apabila dikategorikan pada istilah "pranata ekonomi desa". Hal ini dikarenakan, berdasarkan observasi, masyarakat di sana masih melakukan berbagai macam aktivitas ekonominya secara tradisional. Dalam hubungan ini penggunaan istilah "pranata" dapat diartikan sebagai lembaga yang lebih nyata dengan bangunan, pola organisasi dan segala peralatan (attributes) yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan fungsinya. Di sini jelas bahwa pranata tersebut mencakup hal yang telah berakar dalam

norma sosial masyarakat tersebut yang didalamnya mencakup unsur "peralatan" dan lambang (symbols).

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, masyarakat Desa Pasanggrahan dan Tanjungsari termasuk masyarakat agraris. Di samping mengerjakan sawah, mereka masih melakukan kegiatan berladang. Mereka menanam sebagian ladangnya dengan berbagai tanaman yang hasilnya dapat mereka jual di pasar, seperti tanaman kelapa, lada, kopi, petai, durian, melinjay, dan lain-lain. Dengan tanaman sistem *multi-crops* ini maka sepanjang tahun mereka dapat memetik hasilnya sesuai dengan musim dari macam tanaman tersebut. Kemudian, hasilnya itu mereka jual ke pasar terdekat di Kecamatan Pabuaran atau mereka jual kepada tengkulak yang datang ke kebun mereka untuk selanjutnya oleh para tengkulak tersebut hasil bumi (budidaya pertanian) itu dibawa ke Jakarta, Lebak, Serang, Karawang, dan lain-lain.

Secara sederhana maka pola perdagangan masyarakat desa Pasanggrahan dan Tanjungsari adalah sebagai berikut :

Proses Pengumpulan Dan Pemencaran Hasil Budidaya Masyarakat Desa Pasanggrahan & Tanjungsari



Dalam pola perdagangan yang menyangkut antarkota biasanya perdagangan hasil budidaya petani itu dilakukan para tengkulak yang datang ke kebun-kebun mereka. Para tengkulak tersebut ada yang berasal dari luar desa tersebut, tetapi ada juga yang berasal dari desa yang masih penduduk kedua desa tersebut. Di antara para tengkulak tersebut biasanya berpredikat "*jawara*", karena pengalaman petualangannya, di samping mereka memiliki pengalaman dalam hal berdagang di kota-kota besar, seperti di Jakarta, Serang, Lebak, Karawang, bahkan sampai di kota Bandung. Kemudian mereka mampu membina hubungan dagang dengan orang-orang di kota sehingga arus barang hasil pertanian masyarakat di kedua desa tersebut ke kota besar berjalan dengan lancar. Sedangkan untuk mencukupi *supply* kebutuhan masyarakat pada tingkat kecamatan, para petani menjualnya sendiri ke pasar Pabuaran, yang biasa disebut "Pasar Simpang". Pasar tersebut terletak di persimpangan jalan antara Ciomas dan Pabuaran.

Biasanya para tengkulak membayar kontan hasil tanaman para petani itu. Berbagai hasil pertanian yang telah dibeli para tengkulak itu biasanya ditimbun di pinggir-pinggir jalan desa atau jalan ke kebun untuk memudahkan angkutan truk mengambil dan mengangkutnya ke kota-kota. Sebagai gambaran harga jual hasil pertanian di kedua desa tersebut, yang didasarkan pada harga jual pada tahun 1982, menurut keterangan para petani adalah: kelapa (tanpa sabut atau kulit) sekitar Rp.70,- (di kebun); harga pisang setandan Rp.1000,- (di kebun); harga petai tiap 100 papan (saempong) Rp.65000,- (di kebun); harga cengkeh kering Rp.5000,-/kg; harga kopi sekitar Rp.1000,-/kg. Belum lagi diperhitungkan dari penghasilan tanaman *matang* (ubi jalar) yang mereka tanam pada saat sawah istirahat dari tanaman *padi* dan *casava* (singkong) yang memiliki potensi ekonomi cukup baik di kedua desa tersebut. Singkong tersebut biasa dibuat tapai (*peuyeum sampeu* di daerah Priangan).

Tingkat pendapatan masyarakat di kedua desa, sebagaimana dikemukakan di atas, cukup tinggi apabila dibandingkan dengan desa-desa lain di sekitar Banten. Menurut berbagai keterangan yang diperoleh masyarakat di kedua desa tersebut cukup makmur. Hal ini dapat diamati dari lingkungan tempat tinggal mereka, baik jalan desa maupun jalan-jalan kampung cukup teratur, bersih dan terpelihara, halaman rumah teratur rapih, dan rumah-rumah penduduk dibangun dengan atap genting dan sebagian besar telah berlantai tembok atau

kayu dengan dinding tembok atau kayu. Secara tradisional sebenarnya rumah orang-orang Banten beratap alang-alang. Menurut kepercayaan mereka beratap genting artinya "dikubur hidup-hidup". Kini kepercayaan tersebut sudah ditinggalkan orang sehingga kekhasan bentuk-bentuk rumah tradisional telah tiada.

Sebagian dari hasil penjualan tanaman budidaya, biasanya mereka tabungkan dengan cara membeli perhiasan dari mas. Mereka jarang menggunakan perhiasan ini, tetapi apabila mereka memerlukan uang, lalu dijualnya atau ditukarkan lagi dengan uang pada toko mas itu. Kemudian, apabila telah memilih cukup simpanan uang untuk biaya perjalanan ke Tanah Suci, mereka juga pergi untuk menunaikan ibadah haji.

Menjawab pertanyaan "mengapa tidak bergabung dalam koperasi saja", pada umumnya masyarakat di kedua desa tersebut mengatakan "sudah *kapok* dengan koperasi". Agaknya gambaran negatif mengenai koperasi di kalangan masyarakat masih belum sirna. Mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan koperasi dalam meningkatkan daya hidup masyarakat memerlukan perjuangan yang tidak ringan. Dalam cara berorganisasi masyarakat desa masih menghargai hal yang praktis dan realistik (nyata atau kongkrit) dari pada hal yang berbelit-belit dan birokratis. Oleh karenanya mereka lebih dekat berhubungan dengan tengkulak yang hanya didasarkan atas saling percaya-mempercayai dari pada dengan petugas bank yang menjalankan peraturan yang ketat dan rumit serta sistem pembukuan yang penuh dengan formalitas. Sebagaimana dikemukakan terdahulu, masyarakat Desa Pasanggrahan dan Tanjungsari, dan di daerah Banten Selatan pada umumnya, adalah masyarakat peladang (*pahuma*). Dalam konsep kehidupan masyarakat ladang (*huma*) tidak ada hak milik atas tanah. Tanah sebagai "*modes of production*" dalam suatu bentuk kerajaan agraris tetap dikuasai oleh kerajaan dan menjadi milik raja. Sedangkan pada masa pemerintahan kolonial Belanda, tanah dikuasai pemerintah kolonial sehingga menjadi milik negara. Maka dalam struktur pemerintahan sebagaimana dikemukakan di atas, rakyat hanya memiliki hak menggarap setelah memperoleh izin dari para penguasa tanah yang bersangkutan.

Di daerah Banten Selatan, berdasarkan penelitian Prof. R. Soepomo, S.H. (Soewondo, 1967) pada masa pemerintahan kolonial Belanda, terdapat tanah kering yang oleh pemerintah kolonial Belanda dulu disebut "blok-blok huma", biasanya masyarakat

Banten (Selatan) menyebutkan *huma geblogan*. Areal tanah tersebut pemerintahan kolonial melarang masyarakat untuk mengolahnya sebagai tanah garapan. Hak membuka *huma* atas sebidang tanah tertentu, oleh Van Vollenhoven (1931) biasa disebut hak memungut hasil dari tanah yang tidak tetap yang oleh penduduk di daerah Banten Selatan biasa disebut *ngaku*. Bilamana di suatu daerah orang mengatakan: "*huma* di blok A *diakui* oleh Si B, maka hal itu berarti Si B yang mempunyai hak mengusahakan *huma* di atas tanah tersebut." Setiap orang yang berhak mengusahakan tanah dalam suatu blok tertentu harus membayar sewa sebanyak Rp.2,- kepada pemerintah kolonial Belanda untuk setiap *bau* (5/7 ha). Di sini tampak dengan resmi masyarakat desa harus membayar sewa pada pemerintah kolonial Belanda, karena menurut "*azas domein*" (Soewondo, 1967: 139) pemerintah menjadi pemiliknya.

Biasanya di daerah Banten Selatan hak seseorang menanam suatu areal *huma* hanya berlaku untuk satu kali tanam saja. Setelah itu tidak dikatakan lagi bahwa tanah itu diaku oleh bekas penggarapnya. Menurut kebiasaan penduduk tanah tersebut sudah menjadi bebas kembali. Sudah merupakan suatu ciri yang khas bahwa tanah *huma* setelah panen tidak langsung ditanami kembali (*dipardeokeun*) menurut istilah orang-orang Banten Selatan.

Suatu areal *huma* yang telah ditinggalkan sekitar satu tahun setelah panen, di daerah Banten disebut *jami*, dan membuka areal tanah tersebut, disebut *ngajami*. Bila tanah tersebut sudah ditumbuhi alang-alang yang masih muda, maka areal tersebut biasa disebut *reuma*. Membuka areal *reuma* biasa disebut *ngareuma*. Dan apabila tanah itu telah penuh dengan alang-alang maka jadilah *reuma kolot*. *Reuma kolot* yang terus dibiarkan akan menjadi *leuweung* atau hutan.

Adanya larangan memperluas areal *huma geblogan* oleh pemerintah kolonial Belanda mengakibatkan suatu corak khas dalam pola pengolahan tanah di daerah Banten Selatan. Masyarakat peladang di daerah ini tidak berpindah dari satu daerah ke daerah lain, tetapi hanya bergeser di sekitar areal *huma geblogan* saja. Selanjutnya, karena berbagai faktor sosial, di antaranya pertumbuhan penduduk yang cepat, khususnya karena faktor perpindahan (migrasi intern), di samping keterbatasan *huma geblogan*, maka di antara para peladang itu banyak yang mengusahakan tanahnya secara tetap. Dalam sistem "*ladang menetap*" itulah para penggarap, di samping menanam

padi di atas tanah garapannya mulai menanam tanaman yang berumur panjang, seperti kelapa, melinjau atau buah-buahan lainnya. Dan menurut anggapan masyarakat di daerah Banten Selatan, tanaman menjadi milik mereka yang menanaminya, meskipun pengolahan *huma* telah berakhir dan tanahnya tidak lagi digarap oleh orang yang menanami tanaman yang berumur panjang tersebut. Sementara itu orang-orang yang membuka areal *huma* berikutnya menghormati hak milik pengolah tanah sebelumnya atas tanaman tadi. Mereka yang mengerjakan tanah berikutnya mengizinkan memiliki tanaman untuk memelihara dan memetik hasilnya.

Para pejabat pemerintah kolonial Belanda di daerah Banten Selatan dahulu menganjurkan pada masyarakat yang mengelola blok-blok *huma* dan menanam tanaman lainnya, agar mengajukan permohonan untuk meminta hak milik atas blok-blok *huma* tersebut dengan demikian mereka dibiasakan mengusahakan tanah secara tetap. Pemilikan tanah atas *blok-blok huma* pada waktu itu dimungkinkan asal meminta izin terlebih dahulu kepada pemerintah. Surat izin tersebut dikenal penduduk dengan sebutan "*cap singa*". Ordonansi Pembukaan Tanah, St. 1925 no. 649 (Soewondo, 1967: 144). Sejak itulah di kalangan masyarakat Banten Selatan dikenal adanya hak milik atas tanah. Apabila di antara para penggarap tanah dalam *blok-blok huma* tersebut timbul perselisihan, karena terjadi salah pengertian atas pemilikan tanah, maka para *kokolot* kampung biasanya berperan menyelesaikannya.

Selain diperkenalkannya hak milik atas tanah kepada penduduk, diperkenalkan pula cara-cara baru dalam menanam padi melalui sistem pertanian sawah. Dengan demikian penduduk lebih terikat pada tanamannya dalam suatu areal yang tetap. Bersamaan dengan sistem pertanian sawah, diperkenalkan pula sistem irigasi yang mengatur aliran air yang merupakan sarana pokok dalam memelihara dan berhasilnya tanaman padi di sawah.

Kebijakan pemerintah kolonial Belanda memberikan hak milik atas tanah pada masyarakat dan memperkenalkan sistem pertanian sawah, sejalan dengan rencananya yang ingin meningkatkan hasil pangan dan perluasan perkebunan dengan jenis tanaman ekspor. Melalui jaringan perluasan pesawahan, pemerintah kolonial menghendaki agar masyarakat Banten Selatan, yang pada saat itu masih bersifat *nomaden*, dapat hidup dalam pola perkampungan yang tetap. Dengan demikian penguasa akan mudah memungut pajak dan menga-

wasi gerak serta perilaku penduduk yang selalu memiliki semangat menentang penjajahan Belanda.

Sekarang, dapat kita saksikan masyarakat di Desa Pasanggrahan dan Tanjungsari melakukan dua pola penanaman padi, yaitu pola sawah dan pola ladang. Dalam melaksanakan kedua pola tersebut cara pengerahan tenaga tetap dilakukan sebagaimana nenek moyang mereka mengerjakan *huma*, yaitu dikerjakan sendiri dengan bantuan anggota keluarga dan tetangga terdekat. Mereka bekerja secara gotong-royong. Sistem ini di kalangan masyarakat Banten Selatan dikenal dengan istilah *liliuran*, yakni anggota masyarakat bergantian bekerja secara sukarela, seperti mencangkul di ladang atau sawah milik orang-orang yang bersangkutan.

Dewasa ini di kalangan masyarakat Pasanggrahan dan Tanjungsari pola pengerahan tenaga dilakukan pula dengan sistem *royongan*. Hasil sistem pengerahan tenaga yang bersifat spontan ini digunakan untuk kepentingan umum, misalnya untuk sarana peribadatan atau sarana sosial lainnya. Caranya ialah apabila seseorang hendak mengerjakan sebidang sawah, maka si empunya memberitahukan kepada *kokolot* kampung sekaligus dengan besarnya dana untuk itu. *Kokolot* kampung kemudian menghubungi masyarakat untuk mengerjakan secara bergotong-royong. Upah pekerjaan tersebut tidak diberikan pada masyarakat yang mengerjakan pekerjaan itu, tetapi ditampung oleh *kokolot* kampung. Kemudian uang tersebut digunakan untuk memperbaiki langgar, mesjid atau sarana sosial kampung. Bagi masyarakat perbuatan seperti itu merupakan ibadah dan *amal jariah*. Sebuah mesjid di kampung Kadubangban di desa Pasanggrahan yang luasnya sekitar 500 M² merupakan hasil *royongan* masyarakat kampung tersebut.

Alat-alat yang digunakan untuk mengolah tanah, baik di sawah maupun di ladang, adalah sabit, cangkul, *garu* dan *wuluku* yang ditarik oleh kerbau (kebo). Oleh karenanya kerbau merupakan binatang yang memiliki nilai yang tinggi bagi masyarakat Pasanggrahan dan Tanjungsari. Siapa pun yang akan menjual kerbaunya pada orang lain harus seizin kepala desa.

Sistem ekonomi tradisional lainnya yang masih dianut masyarakat di sana adalah "sistem patungan", yaitu suatu cara gotong-royong masyarakat untuk memperoleh sejumlah dana, misalnya untuk perbaikan sarana peribadatan (mesjid atau langgar). Bila ada seorang yang akan menjual seekor kerbau, misalnya seharga Rp.200.000,-

maka seorang *kokolot* kampung menawarkan kerbau tersebut kepada masyarakat seharga Rp.250.000,- Secara *patungan* (iuran) masyarakat desa membelinya, dan biasanya pembayaran dilakukan pada musim panen. Keuntungan sebesar Rp.50.000,- dipergunakan *kokolot* kampung untuk memperbaiki atau membangun mesjid atau langgar di kampung-kampung sekitar desa yang bersangkutan.

Namun sekarang, baik di Pasanggrahan maupun di Tanjungsari terdapat kecenderungan baru dalam kehidupan masyarakat dengan adanya buruh tani yang bekerja dengan memperoleh upah sebesar Rp.500,- (ditambah makan satu kali), dan bila tanpa makan upah diberikan sebesar Rp.600,- Buruh tani tersebut bukan penduduk setempat, tetapi pendatang dari luar desa.

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti rokok, sabun, gula, kopi, dan lain-lain, masyarakat membelinya dari beberapa toko kecil (*warung*). Di desa Pasanggrahan ada sekitar 6 buah *warung* yang menjual kebutuhan sehari-hari, di antaranya ada yang menjual pakaian jadi dibeli dari pasar Serang, Lebak dan Pandeglang. Ke semua pemilik *warung* tersebut adalah pribumi. Di Tanjungsari hanya terdapat 2 buah *warung* saja yang menjual barang kebutuhan pokok masyarakat dan makanan. Kedua *warung* tersebut hanya dibuka sore hari hingga larut malam. Pada pagi hari pemilik kedua *warung* tersebut bekerja di ladang.

Jumlah serta jenis barang yang diperdagangkan dalam *warung-warung* tergantung pada irama pola pertanian tersebut. Artinya dalam musim panen jenis barang dan macam barang akan lebih banyak, karena pada musim ini berarti musim belanja bagi para petani. Sedangkan pada musim kemarau, pada saat masyarakat berhenti bekerja di sawah atau ladang, pembeli pun amat jarang, oleh karena itu *warung-warung* menjadi sepi.

Demikianlah beberapa gambaran organisasi dalam kegiatan ekonomi kehidupan masyarakat sehari-hari di desa Pasanggrahan dan Tanjungsari.

2. Sistem Kepemimpinan

Agaknya pola perdagangan yang berlaku di kalangan masyarakat desa, baik di Pasanggrahan maupun di Tanjungsari dilakukan secara individual. Sikap yang bersifat individualistik dalam pola perdagangan mereka, mungkin sebagai peninggalan dari karakter masyarakat ladang. Dalam kehidupan sosial masyarakat ladang, pengaruh jarak

yang berjauhan antara areal ladang yang satu dengan yang lainnya akan membawa akibat terhadap jarak yang berjauhan pula antara rumah yang satu dengan rumah yang lain. Keadaan tersebut akan menimbulkan pola hubungan antar tetangga yang longgar. Aktivitas gotong-royong di kalangan masyarakat ladang hanya dilakukan pada peristiwa tertentu saja, seperti pada masa panen, mencangkul, dan lain-lain. Oleh karena itu maka di antara mereka terdapat kecenderungan hidup yang bersifat individualistis (Adimihardja, 1980: 15).

Sejalan dengan penjelasan di atas, maka hingga kini di kalangan masyarakat petani di kedua desa tersebut tidak ada minat untuk bergabung dalam koperasi. Hal ini juga dikarenakan oleh kelemahan koperasi itu sendiri pada masa lampau yang sering disalahgunakan oleh para pimpinannya. Akibatnya masyarakat desa hingga saat ini tidak mau bergabung dalam wadah koperasi, sebagaimana yang diungkapkannya "sudah *kapok* dengan koperasi".

Namun demikian, sikap individualistis dalam pola perdagangan seperti dikemukakan di atas, yang dimiliki kalangan petani di kedua desa tersebut, bukan berarti bahwa mereka melakukan usahanya semata-mata berorientasi terhadap *profit making* dengan cara memaksimalkan kebutuhan pasar. Tetapi para petani tersebut dalam melakukan aktivitas perdagangan masih tetap didasarkan pada landasan hubungan sosial (*social relationships*) yang akrab. Hal ini dapat kita amati dari sikap para petani dalam menjual hasil budidaya mereka. Meskipun ada tengkulak yang menawarkan harga lebih tinggi, tetapi mereka tidak akan menjualnya, selain kepada tengkulak langganannya, walau dengan harga yang lebih rendah.

Namun demikian, di antara para petani dan tengkulak langganannya sering pula terjadi tawar-menawar (*bargaining*) dalam menentukan harga pada setiap kali panen. Hal ini dilakukan apabila ada tengkulak lain yang berani membeli hasil budidaya mereka lebih tinggi daripada langganannya mereka. Agaknya, tawaran lebih tinggi itu dinilai sebagai informasi adanya kenaikan harga di pasar. Dalam tawar-menawar tersebut selalu ada kata sepakat (penyesuaian harga baru), sehingga tidak menimbulkan macetnya mekanisme perdagangan dalam bidang produksi dan distribusi tersebut.

Selanjutnya, sebagian keuntungan yang diperoleh para petani dari hasil penjualan budidaya disumbangkan pula untuk keperluan sarana sosial di desanya, seperti memperbaiki mesjid, langgar, dan

lain-lain. Hal ini mereka lakukan, di samping sebagai tugas dan keyakinan keagamaan (amal), juga karena mereka rasakan bahwa "fungsi mesjid atau langgar" tersebut bukan semata-mata tempat beribadah, tetapi merupakan "sumber informasi" berbagai hal yang perlu mereka ketahui. Hampir setiap malam mereka bersembahyang jamaah, mengaji dan berdoa bersama, dan dalam kesempatan berkumpul itu mereka gunakan pula untuk bercakap-cakap mengenai pengalaman masing-masing. Berbagai peristiwa penting yang menyangkut kehidupan kemasyarakatan biasa pula diumumkan di mesjid atau langgar, baik oleh para *kokolot* desa maupun oleh pamong desa.

Fungsi mesjid atau langgar sebagaimana dikemukakan di atas, tidak lepas dari peranan dan wibawa para *kokolot* desa atau *kokolot* kampung dalam membimbing masyarakat pada suatu bentuk kehidupan yang dilandasi etos keagamaan. Sebagai contoh, ketentuan bekerja setiap hari di sawah, ladang dan kebun yang dibarengi semangat ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menurut berbagai keterangan yang diperoleh dari para *kokolot* desa, sejalan dengan konsep "*tawakal*" dalam agama Islam. Menurut salah seorang *kokolot* desa di desa Pasanggrahan, "*tawakal*" adalah "*pasrah*", dalam arti menyerahkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. "Untung atau rugi dalam usaha saya, ada pada kekuasaannya," demikian kata Haji Satri. "Tetapi kita harus tekun berusaha dengan kerja keras untuk mencoba memenuhi tuntutan hidup ini," demikian ia menambahkan. Dari keterangan di atas, agaknya memang masyarakat di kedua desa tersebut mampu melakukan interpretasi terhadap konsep "*tawakal*" itu cukup dinamis, karena menurut mereka "berserah diri" bukan berarti diam, tetapi kita harus terus menerus berusaha, berdoa dan bekerja keras agar nasib kita dapat berubah.

Dari berbagai uraian di atas, maka jelas bahwa pengaruh agama Islam telah memberikan warna yang sangat dominan dalam kehidupan masyarakat di sana. Keadaan ini tentu tidak terlepas dari kepemimpinan dan wibawa para ulama dalam membimbing masyarakat ke arah suatu bentuk kehidupan masyarakat yang *religious*. Interaksi yang terus menerus dan bersifat dinamis, seperti dalam pertimbangan dan nasihat para ulama, baik dalam masa senang maupun dalam masa susah, adalah salah satu faktor utama yang melanggengkan kepemimpinan di kalangan para ulama tersebut. Hal ini menurut pendapat Taufik Abdullah (1982: 16) "berarti

bahwa selama pribadi yang disebut "pemimpin" itu dianggap atau dinilai telah memenuhi kebutuhan dari sistem sosial dan komunitasnya, maka selama itu pula ia bisa mempertahankan ikatan emosional dengan para pengikutnya. Dan selama itu pula, tentu saja, kepemimpinnya berlanjut."

Tampaknya dalam kehidupan sosial masyarakat baik di Pasangrahan maupun di Tanjungsari, peranan yang dimainkan para ulama telah memenuhi harapan sosial masyarakat. Hal ini tampak dari kepercayaan masyarakat terhadap para ulama di kedua desa tersebut, dimana mereka dipercayai mampu memberikan perlindungan lahir dan bathin.

3. Pengaruh Dan Fungsi Kepemimpinan Dalam Bidang Ekonomi Dalam Masyarakat.

Berbagai uraian terdahulu menunjukkan bahwa pengaruh kepemimpinan para ulama yang merupakan *kokolot* desa di Pasangrahan dan Tanjungsari sangat dominan. Namun demikian, efektivitas pengaruh para ulama di kedua desa itu sangat ditentukan oleh karakteristik pribadi, kharisma yang didukung oleh kedalaman pengetahuan keagamaan yang mereka miliki.

Agaknya, sebagaimana diuraikan dalam berbagai bagian dari tulisan ini, dapat kita pahami bahwa dominasi kepemimpinan para *kokolot* desa dan ulama di kedua desa tersebut, telah berhasil membentuk suatu "doktrin hidup" dalam wajah kepribadian "Muslim Banten". Hal ini tampak dalam pola kehidupan masyarakat di kedua desa tersebut, mereka ulet dan rajin dalam melakukan pekerjaan baik di sawah atau di ladang maupun di kebun-kebun mereka yang merupakan sumber ekonomi utama di desanya. Dalam pola pembagian hasil keuntungan perdagangan, tidak hanya dinikmati oleh yang bersangkutan, tetapi sebagian mereka sisihkan untuk *zakat* dan sumbangan-sumbangan lain di desa. Selanjutnya, baik *zakat* maupun sumbangan itu dikumpulkan oleh para *kokolot* desa atau *kokolot* kampung, dan secara musyawarah digunakan untuk kepentingan kehidupan masyarakat desa atau kampung tempat tinggal mereka.

Pola perilaku masyarakat yang juga banyak dipengaruhi "doktrin Islam" terlihat pada jawaban mereka terhadap pertanyaan tentang "prioritas" pemilihan benda yang mereka beli apabila membelanjakan uang hasil keuntungan pertanian mereka. Jawaban-jawaban yang mereka kemukakan adalah pertama, membeli perhiasan mas. Per-

hiasan tersebut selain dapat dipakai dalam peristiwa-peristiwa tertentu, seperti undangan perkawinan atau tabungan untuk persiapan menunaikan ibadah haji. Kedua, membeli tanah untuk memperluas produksi pertanian mereka. Dan ketiga, apabila sarana produksi dinilainya telah mencukupi, mereka baru merencanakan untuk menunaikan ibadah haji. Dari berbagai pola pemilihan yang merupakan prioritas sebagaimana dikemukakan di atas, tampaknya masyarakat di kedua desa tersebut lebih memiliki semangat untuk maju dengan bekerja keras dan ulet dibandingkan dengan kehidupan sosial masyarakat di desa lain di sekitar Banten Selatan.

Sampai sekarang masyarakat di kedua desa itu pantang (*pamali* menurut ungkapan masyarakat tersebut) menjual padi. Hal ini mungkin karena hasil panen di sawah atau di ladang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mereka. Demikianlah pengaruh dan fungsi kepemimpinan *kokolot* desa dan para ulama di kedua desa Pasanggrahan dan Tanjungsari. Kesemuanya bersumber dari ajaran agama, baik yang paling mendalam dan fundamental yang bersifat doktriner maupun ajaran-ajaran yang bersifat praktis. Sehingga terjadilah proses pembentukan tingkahlaku yang membawa ke arah terjelmanya sistem nilai yang tercermin dalam pola kehidupan masyarakat di kedua desa tersebut, baik yang bersifat kehidupan ekonomi maupun dalam bidang sosial lainnya.

BAB VI

POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DI BIDANG AGAMA

1. Organisasi Dalam Keagamaan

Semua uraian dalam tulisan bab-bab sebelumnya menggambarkan bagaimana agama memainkan peranan penting dalam kehidupan sosial masyarakat di desa Pasanggrahan dan Tanjungsari. Bagi masyarakat di kedua desa tersebut, agama agaknya merupakan faktor integrasi dalam kehidupan sosial mereka. Hal ini tampak dari pola perilaku masyarakat, dimana aktivitas sosial mereka selalu dilatarbelakangi motif keagamaan seperti dalam kegiatan *patungan* dan *royongan*. Kedua macam kegiatan tersebut akhirnya menjurus pula kepada tujuan untuk kepentingan keagamaan. Demikian pula dalam penilaian masyarakat tentang ukuran baik dan buruk, boleh dan tidak, selalu didasarkan pada pertimbangan dan norma-norma keagamaan. Pada akhirnya semua usaha dan keuntungan yang mereka peroleh dari hasil usahanya digunakan untuk memenuhi cita-cita utama mereka, yaitu pergi ke Tanah Suci, Mekah, untuk menunaikan ibadah haji.

Tentu saja tidak semua anggota masyarakat memahami norma-norma keagamaan yang merupakan pedoman hidup mereka sehari-hari. Tampaknya, di sinilah fungsi dan peranan para *kokolot* desa dan para ulama membimbing dan menunjukkan jalan yang benar yang mereka yakini sesuai dengan perintah agama.

Media komunikasi dan konsultasi antara umat dengan para *kokolot* desa dan ulama itu biasanya dilakukan pada setiap malam hari setelah selesai sembahyang berjamaah dan pengajian bersama (tahlilan) di langgar atau di mesjid.

Di tempat-tempat inilah mereka mengemukakan berbagai persoalan yang mereka hadapi, untuk memperoleh pemecahan dari para *kokolot* desa atau dari para ulama. Sedangkan untuk kasus-kasus yang mereka anggap khusus, seperti perselisihan, pencurian, dan lain-lain, biasanya konsultasi dilakukan di rumah salah seorang *kokolot* desa. Sedangkan penyelesaian terhadap kasus tersebut dapat dilakukan di suatu tempat yang telah ditentukan, di kantor desa atau kecamatan. Hal ini tergantung dari besar kecilnya kasus yang terjadi.

Masyarakat di kedua desa tersebut beranggapan bahwa kegiatan

pengajian bersama (tahlilan) itu merupakan organisasi keagamaan yang memiliki fungsi bukan saja sebagai media ibadah, tetapi juga merupakan media kemasyarakatan. Artinya, dengan seringnya mereka berkumpul di langgar atau mesjid, warga kampung atau warga desa pada umumnya, di samping melakukan tugas keagamaan (ibadah), juga mereka memanfaatkannya untuk berbincang-bincang saling tukar-menukar informasi dalam berbagai peristiwa kehidupan sosial sehari-hari. Dalam media pengajian itu pula berbagai informasi dan penerangan yang perlu diketahui masyarakat diumumkan para *kokolot* desa atau petugas desa. Dengan demikian langgar atau pun mesjid di kedua desa tersebut berfungsi sebagai sarana ibadah dan juga sarana komunikasi sosial di antara warga desa.

Pada data-data yang diperoleh atas jawaban terhadap pertanyaan tentang "organisasi yang menampung aktivitas keagamaan" terlihat bahwa hampir semua responden (di masing-masing desa N = 100) menunjuk media "pengajian bersama". Di desa Pasanggrahan agaknya terdapat beberapa istilah yang digunakan masyarakat terhadap bentuk aktivitas pengajian tersebut. Antara lain di antara responden, kan *padilah* (10%), disamping ada yang hanya mengemukakan "Pengajian" saja (20%). Di desa Tanjungsari semua responden kan "pengajian" saja (20%). Di desa Tanjungsari semua responden hanya mengemukakan istilah "pengajian" saja (100%). Perbedaan istilah yang digunakan terhadap aktivitas pengajian di desa Pasanggrahan, semata-mata hanyalah dipengaruhi latar belakang bahasa yang biasa mereka gunakan. Seperti kata "*jamiahan*" artinya sama dengan kata "bersama", biasa pula disebut *basingan*. Berdasarkan berbagai keterangan penduduk, pada umumnya masyarakat di kedua desa tersebut, menganut faham aliran *tharekat Qodariyah Naksabandiyah*, yakni sebuah aliran yang besar pengikutnya di Jawa Barat. Namun demikian, sebagaimana dikemukakan oleh Sudjana (1975) "pengertian dasar terhadap istilah di dalam *tharekat*, seperti *tajarrud*, *uzalah*, *fakher*, *dawamus sukut* dan *dawamudz dzikir*, *gilatul akli* dan *dawamushaum*, *dawamussahr* dan *qiyamul lail* dan pengertian tentang *safar* sebagian terbesar para pimpinan keagamaan *tharekat* itu kurang didasari keilmuan". Akan tetapi terlepas dari kurangnya pemahaman sebagaimana dikemukakan di atas, telah menjadi suatu kenyataan bahwa faktor agama dalam kehidupan masyarakat di kedua desa tersebut merupakan pedoman utama dalam pola perilaku sosial. Besarnya peranan agama dalam pola kehidupan sosial

mereka mungkin sebagai suatu produk sejarah, dimana daerah Banten, selain Cirebon, pada masa lampau merupakan pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Seorang ahli sejarah, Benda (1963), melukiskan masyarakat Banten penganut paham Islam "orthodox dan fanatik". Ia melukiskan kefanatikan masyarakat Banten dengan ucapan ". . . terutama Banten merupakan daerah di mana tidak ada penjabat pemerintah Belanda ingin ditempatkan karena takut kepala mereka akan dipenggal."

Dalam mengembangkan aktivitas pengajian, tampaknya sangat besar peranan yang diberikan kepala desa sebagai unsur pimpinan formal, di samping peranan ulama itu sendiri. Hal ini tampak dari jawaban responden di kedua desa tersebut, atas pertanyaan tentang "kedudukan organisasi atau perkumpulan pengajian di desa." Sebagian besar responden di desa Pasanggrahan mengemukakan jawaban "di bawah bimbingan kepala desa (67%) dan ulama (33%)." Perhatian yang diberikan kepala desa memang sangat besar terhadap kegiatan kemasyarakatan yang dilatarbelakangi nilai-nilai keagamaan. Hal ini didasari benar oleh kepala desa karena cara demikian itu merupakan kebutuhan pokok rohani masyarakat yang membawa kemantapan dalam menempuh kehidupan sosial yang bersifat keduniawian. Demikian pula masyarakat desa Tanjungsari atas pertanyaan yang sama, mengemukakan jawaban "di bawah bimbingan kepala desa ada sekitar (53,20%) dan ulama sekitar (46,80%).

Biasanya pengajian itu dilakukan setelah sembahyang magrib dan kemudian dilanjutkan kembali setelah sembahyang isya. Adapun yang biasa dibaca dalam pengajian bersama itu adalah Surat Yasin. Pada setiap malam biasanya tiap orang membaca Surat Yasin dua atau tiga kali. Sedangkan pada tiap malam Selasa dan malam Jum'at mereka lipat gandakan sampai empat atau lima kali. "Pada saat menyongsong hari raya Islam atau hari raya nasional, seperti menjelang 17 Agustus 1983 yang lalu, pengajian diadakan semalam suntuk selama satu minggu untuk mendoakan keselamatan bangsa, negara dan para pemimpinnya," demikian kata Haji Machmud, seorang *kokolot* desa yang sangat terkenal di Tanjungsari. Biasanya setelah selesai membaca Surat Yasin dilakukan dzikir bersama. Kata salah seorang *kokolot* desa di Desa Pasanggrahan, fungsi dzikir itu adalah untuk memberikan keterangan lahir dan bathin pada orang-orang yang melakukannya.

Selain di langgar dan mesjid, pengajian bersama biasa pula dilakukan di rumah-rumah penduduk. Hal ini dilakukan biasanya apabila salah seorang warga kampung itu melakukan *kaul* karena usahanya cukup berhasil baik atau karena peristiwa lain yang membawa berkah bagi kehidupannya. Sekali-kali juga pengajian dilakukan di rumah kepala desa, sekedar untuk mengeratkan hubungan antara kepala desa sebagai pimpinan formal dengan masyarakat luas. Sedangkan apabila pengajian itu dilakukan di kecamatan biasanya apabila menghadapi atau menyongsong perayaan yang bersifat nasional. Tetapi secara rutin pengajian itu dilaksanakan masyarakat di langgar atau di mesjid.

Pada tiap hari Jum'at pengajian dilakukan pada pagi hingga siang hari, diikuti oleh segenap warga desa, baik laki-laki maupun perempuan serta anak-anak. Selesai pengajian kemudian dilakukan sembahyang Jum'at bersama, kecuali para wanita boleh meninggalkan mesjid atau langgar, kembali ke rumah masing-masing.

Pengajian bersama itu biasa dipimpin oleh seorang *kokolot* desa dan kepemimpinannya bukan berdasarkan pengangkatan, tetapi karena pengakuan masyarakat terhadap kualitas pengetahuannya dalam bidang keagamaan dan kepemimpinannya. Dan oleh karena itu maka biasanya para *kokolot* desa tersebut juga berkualifikasi sebagai seorang ulama.

Selanjutnya, masyarakat di kedua desa tersebut menganggapnya bahwa manfaat pengajian ini, selain membina dan mempertebal rasa iman, juga merupakan suatu upaya manusia memohon perlindungan Tuhan Yang Maha Esa dalam menghadapi berbagai macam percobaan hidup di dunia ini. Tampaknya umat Islam di Desa Pasanggrahan dan Tanjungsari amat taat dan percaya bahwa konsepsi mengenai doa dan ikhtiar itu merupakan panggilan keagamaannya. Seorang yang berhasil dalam kehidupannya dinyatakan sebagai diberkati Tuhan Yang Maha Esa, atau biasa pula diucapkan: berkat dari Tuhan. Usaha yang lebih kuat lagi diungkapkan dalam agama Islam dinyatakan dalam kata "ihtiar" (Abdullah, 1979: 150).

Dalam kegiatan pengajian bersama itu biasanya diisi dengan ceramah-ceramah keagamaan yang sangat bermanfaat dalam usaha menambah pengetahuan warga desa dalam bidang kemasyarakatan. Demikian pula pengajian bersama itu dapat pula mempererat hubungan persaudaraan di antara sesama warga desa, dan keadaan ini dapat membawa rasa kebersamaan dalam kehidupan sosial mereka di dunia.

Selain organisasi pengajian yang bersifat informal, masih ada sebuah organisasi yang bersifat formal yang bergerak dalam bidang keagamaan, yaitu SATKAR ULAMA.

Organisasi tersebut menurut Haji Machmud, salah seorang pendirinya, "bertujuan ingin menyatukan aspirasi ulama Banten dalam satu wadah, dalam usaha turut serta berpartisipasi dalam pembangunan nasional". SATKAR ULAMA menurut anggapan Haji Machmud, "tidak menganut salah satu paham ideologi", dan katanya, "oleh karena itu dalam Pemilu (Pemilihan Umum) 1971, 1977 dan 1983 memihak pada GOLKAR (Golongan Karya)." Sikap politik para *kokolot* desa dan ulama di kedua desa tersebut tentu saja melemahkan posisi partai politik yang ada pada tingkat kecamatan dan mempunyai pengaruh langsung pada para pengikutnya di desa-desa. Partai-partai politik itu adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berlandaskan keislaman dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang berazaskan nasionalisme. Khususnya bagi PPP, daerah Banten yang pada mulanya merupakan kantong utama dalam mengumpulkan suara dalam tiap pemilihan umum untuk keanggotaan DPR/MPR, kini suara itu banyak beralih pada GOLKAR.

Ilustrasi di atas jelas menunjukkan bagaimana pengaruh sikap *kokolot* desa dan ulama terhadap pola berpikir dan bertindak masyarakat di kedua desa tersebut. Hal itu memberikan gambaran pada kita bagaimana besarnya pengaruh yang mereka mainkan hingga sekarang. Para *kokolot* desa dan ulama di kedua desa tersebut memiliki "posisi kunci" dan merupakan "*central figure*" yang selalu harus diperhitungkan dalam menentukan kebijakan pembangunan masyarakat desa.

2. Sistem Kepemimpinan

Sistem kepemimpinan yang dibina dan dikembangkan di kedua desa tersebut, adalah suatu sistem kepemimpinan yang dilandasi dasar-dasar keagamaan yang kuat.

Dalam pola kehidupan masyarakat tersebut, peranan ulama, sebagai orang yang mengetahui dan menguasai masalah-masalah keagamaan, sangat menentukan dalam membina kehidupan umat di sekitarnya. Ucapan-ucapan para ulama, dinilai masyarakat sebagai suatu kebenaran yang harus ditaati. Hal ini dapat diamati dalam kehidupan sosial di kedua desa tersebut, dimana penduduknya beranggapan bahwa para ulama dan *kokolot* desa bukan saja sebagai

seorang pemimpin yang mereka segani, juga sebagai seorang "bapak" yang mampu melindungi keselamatan lahir dan bathin.

Biasanya sistem kepemimpinannya itu lebih ditentukan oleh pengakuan umat, karena bukti kualitas dirinya yang tinggi yang diakui dan dikagumi masyarakat. Suatu kenyataan pula yang dapat diamati, ialah keabsahan para ulama dan *kokolot* desa di kedua desa tersebut didasarkan pada faktor keturunan dan kekayaan. Biasanya para *kokolot* desa dan ulama yang sekarang memiliki pengaruh yang luas di kedua desa tersebut adalah anak atau cucu para ulama sebelumnya. Mereka sudah memiliki pengaruh luas di kalangan masyarakat desa. Biasanya juga mereka itu adalah orang-orang yang cukup memiliki kekayaan, dan kekayaan mereka itu diperoleh biasanya bekaitan erat dengan kekuasaan yang mereka miliki. Demikian para ulama dan *kokolot* desa itu sebagai elite desa. Di sini tampak bahwa faktor genealogis yang didukung oleh faktor kekayaan tetap memegang peranan utama dalam memupuk kekuasaan pada tingkat lokal (desa). Dengan kata lain, bobot kepemimpinan para ulama dan *kokolot* desa itu sangat dibantu oleh kebesaran ayah atau kakek mereka, yang juga memiliki status sosial yang tinggi pada masa lalu.

Bagaimana kadar efektivitas dan ruang lingkup kepemimpinan ulama dan *kokolot* desa di kedua desa tersebut? Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Taufik Abdullah (1982: 17), antara lain "... para ulama bebas yang kehadirannya lebih ditentukan oleh umat, sebagai kategori sosial, bukan saja lebih beragam dalam kadar efektivitas kepemimpinan mereka, tetapi juga dalam ruang lingkup daerah pengaruh. Tiada batas geografis yang pasti yang menentukan ruang lingkup pengaruh para ulama ini."

Suatu kenyataan yang ada di Desa Pasanggrahan maupun di Tanjungsari, dan di daerah Banten pada umumnya, ialah pada masa kolonial perlawanan sebagian besar petani terhadap pemerintah kolonial Belanda, dipimpin oleh para *jawara-ulama*.

Meskipun daerah pengaruh mereka yang cukup terbatas pada desa-desa tertentu, tetapi kadar efektivitas kepemimpinan para *jawara-ulama* itu cukup tinggi. Hal ini memberikan kemungkinan pada para *jawara-ulama* untuk melakukan gerakan peralwanan.

Pada masa kemerdekaan sekarang, kadar kepemimpinan para *jawara-ulama* itu tetap tinggi. Hal ini dapat diamati di kedua desa tersebut, di mana bobot kepemimpinan yang mereka miliki itu sesungguhnya dapat dimanfaatkan untuk mempercepat usaha-usaha pembangunan masyarakat desa. Melalui pendekatan dan diikutserta-

kannya dalam berbagai program dan perencanaan pembangunan desa, maka peranan dan wibawa yang dimiliki para ulama tersebut digunakan sebagai unsur penggerak yang sangat potensial dalam pembangunan bangsa di daerahnya.

3. Pengaruh dan Fungsi Kepemimpinan Bidang Agama Dalam Masyarakat.

Pengaruh kepemimpinan para *kokolot* desa dan para ulama dalam bidang keagamaan terhadap kehidupan masyarakat di kedua desa tersebut, sebagaimana telah dikemukakan terdahulu dalam berbagai uraian dalam tulisan ini, sangatlah dominan. Hal ini dapat diamati dalam semua gerak kehidupan di kedua desa tersebut yang tidak terlepas dari kontrol etika dan nilai-nilai keislaman yang melandasi gerak hidup masyarakat. Maka bagi masyarakat Desa Pasanggrahan dan Tanjungsari, dalam konteks kehidupan sebagaimana dikemukakan di atas, dapat dipahami apabila muncul dalam kehidupan sosial mereka: "Islam dipandang sebagai ideologi", dalam arti "Islam sebagai pedoman hidup", baik untuk mencapai hal-hal yang bersifat keduniawian maupun untuk mencapai tujuan akhir dari kehidupan di dunia ini.

Gairah hidup yang dilandasi etos keagamaan, sebagaimana dikemukakan di atas, tampak dalam berbagai gerak langkah kehidupan mereka sehari-hari, antara lain tercermin dalam kegiatan *royongan* maupun *patungan* serta pemberian zakat dari hasil usaha mereka, yang kesemuanya itu dilandasi oleh semangat kebersamaan yang tidak lepas dari etika dan nilai keagamaan. Dan semua hasil serta keuntungan dari kegiatan sosial tersebut di atas, dipergunakan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan kelancaran aktivitas keagamaan, yang membawa pengaruh positif terhadap aktivitas sosial mereka di desa. Seperti telah dikemukakan dalam bagian terdahulu, kegiatan pengajian bersama yang dilakukan masyarakat desa, selain meminta doa akan keselamatan pribadi dan warga desa dalam menunaikan tugas kehidupan sehari-hari, juga dapat meningkatkan hubungan di antara warga desa dalam kehidupan sosial mereka. Dengan demikian situasi itu akan mempertebal perasaan kebersamaan dalam suka dan duka di kalangan masyarakat desa. Selanjutnya, hasil untung dari kegiatan *royongan* dan *patungan* tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, atau mesjid. Hal itu pun

merupakan suatu tindakan yang dilandasi semangat kebersamaan dalam memelihara dan mengembangkan sarana keagamaan.

Ketaatan beribadah yang mereka lakukan sehari-hari ternyata dapat memelihara kestabilan jiwa dan kesegaran jasmani. Hal ini dapat terlihat dari adanya kestabilan dalam jumlah penduduk, dan mereka mampu mempertahankan hidup hingga rata-rata umur 70–80 tahun. Di Indonesia rata-rata umur meninggal adalah sekitar 55 tahun. Dampak lain dari kesegaran jasmani dan kestabilan jiwa adalah dapat mendorong mereka menjadi pekerja-pekerja yang ulet dan rajin.

Kerajinan dan keuletan bekerja di kedua desa tersebut, mungkin pula dilandasi oleh konsep "tawakal" dan "ihtiar" yang selalu mereka kemukakan sebagai salah satu landasan atau dorongan semangat yang ditanamkan oleh para ulama dan *kokolot* desa. Tawakal menurut keterangan Haji Hayat, salah seorang *kokolot* desa di Desa Tanjung-sari, adalah "menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa". Tetapi katanya, "bukan berarti bahwa kita hanya diam saja, dalam hidup ini, seperti menunggu datangnya hujan dari langit, tetapi kita harus giat bekerja untuk memperoleh apa yang kita inginkan. "Sembahyang dan bekerja adalah suatu hal yang selaku kami anjurkan kepada warga kampung ini." Ihtiar adalah usaha di jalan Allah," demikian kata Haji Satrai dari desa Pasanggrahan. "Mustahil nasib kitab dapat berubah tanpa usaha yang diridhoi Allah", demikian ia menambahkan keterangannya.

Dari berbagai uraian di atas, maka tampaknya semangat keagamaan yang ditanamkan sejak beratus-ratus tahun di kalangan masyarakat di kedua desa tersebut, telah membentuk semacam "kepribadian" masyarakat Islam Banten yang mampu mereka kembangkan terus hingga generasi sekarang. Meskipun ciri-ciri kebudayaan pra-Islam dalam kepribadian Islam Banten tersebut masih jelas tampak, seperti dalam irama upacara pertanian, kepercayaan terhadap *makam* yang dianggap suci dan tempat-tempat suci lainnya sebagai peninggalan kepercayaan jaman kerajaan Padjadjaran yang berorientasi kepada Hindu-Budha.

Dengan kepribadian tersebut masyarakat di kedua desa tersebut, dan masyarakat Banten pada umumnya, telah mampu turut serta dan aktif mengambil bagian dalam mengisi kemerdekaan bangsa, turut berpartisipasi dalam pembangunan. "Juga kepribadian itu merupakan alat yang ampuh dalam usaha mempertinggi ketahanan

nasional,” demikian kata Haji Machmud, salah seorang ulama Banten terkenal dalam menutup pembicaraannya di Desa Tanjungsari.

Kesemua pola perilaku masyarakat yang tercermin di kedua desa tersebut, khususnya dalam kehidupan keagamaan dan pengaruhnya terhadap pola kehidupan sosial lainnya, memberikan gambaran pada kita bagaimana peranan yang dimainkan para ulama dan *kokolot* desa dalam membentuk ”wajah” masyarakat, di mana dalam pola bertindak dan berlaku dilandasi dengan nilai-nilai keagamaan yang diakuinya sebagai ”kepribadian” masyarakat Banten.

BAB VII

POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DI BIDANG PENDIDIKAN

1. Organisasi Dalam Pendidikan

Pendidikan adalah merupakan faktor penting dalam kehidupan umat manusia. Latar belakang pendidikan akan berpengaruh terhadap pandangan hidup seseorang atau pun masyarakat. Secara ideal dapat dikemukakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar sebuah generasi untuk menyiapkan generasi berikutnya agar memiliki dan mampu mengembangkan ilmu serta kecakapan guna memberikan jawaban terhadap berbagai tantangan yang dihadapi seorang individu atau masyarakat dalam arena hidupnya. Tanpa usaha belajar dari pihak generasi muda dan usaha transformasi nilai-nilai dari generasi tua, manusia tidak dapat mempertahankan dan mengembangkan kualitas hidupnya ke tingkat yang lebih bermutu dan lebih mulia.

Situasi pendidikan di Desa Pasanggrahan dan Tanjungsari adalah sebagai berikut: Di Desa Pasanggrahan hanya terdapat sebuah SD (Sekolah Dasar) dengan jumlah murid sebanyak 305 orang, dibimbing oleh 5 orang guru. Adapun perincian murid dan guru di Desa Pasanggrahan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 9
Perincian Murid Di SD Pasanggrahan

No.	Kelas	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	1	49	30	79
2.	2	32	26	58
3.	3	29	23	52
4.	4	32	14	46
5.	5	28	20	48
6.	6	10	12	22
Jumlah :		380	125	305

Sumber: Kandep Depdikbud, Kecamatan Pabuaran, 1983

Sedangkan perincian guru di SD Pasanggrahan adalah sebagai berikut :

Tabel 10
Perincian Guru Di Pasanggrahan

No.	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Guru Umum	2	2	4
2	Guru Agama	—	1	1
Jumlah :		2	3	5

Sumber: Kandep Depdikbud, Kecamatan Pabuaran, 1983.

Pada umumnya tamatan SD Pasanggrahan melanjutkan pendidikannya di SMP (Sekolah Menengah Pertama) Pabuaran, yang terletak sekitar 1 Km dari Desa Pasanggrahan. Selain ada sebuah SD di Desa Pasanggrahan, masih ada lagi dua buah Madrasah Islam (MI) yang dapat menampung anak-anak dari Desa Pasanggrahan. Kedua madrasah tersebut terletak di Desa Kadubeureum, tidak begitu jauh dari Desa Pasanggrahan. Selain itu anak-anak dari desa Pasanggrahan juga banyak yang mengikuti pendidikan pesantren. Di Desa Kadubeureum hingga kini terdapat 4 buah pesantren yang masing-masing dipimpin oleh Haji Satrai, Haji Zakaria, Haji Amin, dan Haji Adung.

Di Desa Tanjungsari ada 3 buah SD, 2 di antaranya adalah SD Inpres. SD tersebut adalah SD Tanjungsari I terletak di kampung Parigi dan SD Tanjungsari II terletak di kampung Tanjung Kulon. Akan tetapi SD ini sejak tahun 1974 statusnya dirubah menjadi SD Inpres, karena bangunannya runtuh. Untuk membangun kembali SD tersebut dengan cepat, harus merubah statusnya menjadi SD Inpres. Bangunan SD Inpres lainnya yang ada di Desa Tanjungsari terletak di kampung Kadukacapi, didirikan sejak tahun 1977/1978 sebanyak 6 buah lokal. Sejak tahun 1979 SD tersebut mulai digunakan, dan sejak tahun 1983 semua lokal mulai terisi. Jumlah murid pada 3 buah SD tersebut ada sekitar 300 orang. Bagi murid-murid di Desa Tanjungsari yang ingin melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi, dapat melanjutkan sekolahnya di SMP

Pabuaran, yang juga terletak di wilayah desa Tanjungsari.

Baik di Desa Pasanggrahan maupun di Desa Tanjungsari perlengkapan SD dan SD Inpres dipenuhi oleh pemerintah pusat, berupa buku-buku perpustakaan, buku bacaan, buku pelajaran dan berbagai alat-alat tulis menulis yang biasanya dibagikan dalam jangka waktu 3 bulan sekali. Di Desa Tanjungsari murid-murid tidak dipungut SPP (Sumbangan Pembangunan Pendidikan) dan sumbangan-sumbangan lain. Hal ini sehubungan orang tua mereka berkeberatan, di samping kebijaksanaan pemerintah yang membebaskan SPP bagi murid-murid SD. Oleh karena itu pada setiap penerimaan murid baru, mereka tidak dikenakan pungutan apa-apa. Kalau terjadi kekurangan alat-alat tulis di salah satu SD, maka SD yang lain menyumbangannya alat-alat yang diperlukan SD yang bersangkutan, sehingga kegiatan pengajaran sehari-hari tidak terganggu kelancarannya. Dalam keadaan sarana serba terbatas dan juga kekurangan tenaga guru, SD Kadukan Kacapi, salah satu SD di Desa Tanjungsari, masih mampu menunjukkan prestasinya. Prestasi tersebut mereka peroleh sebagai juara kedua dalam Lomba Ketrampilan Pramuka Tingkat Kecamatan tahun 1982 dan 1983. Semua kegiatan kepramukaan dibimbing oleh guru-guru SD tersebut. Selanjutnya, dalam Pekan Olah Raga Antar SD Tingkat Kecamatan, SD Kadukacapi telah berhasil menjadi juara I, dan oleh karenanya menjadi utusan kecamatan dalam POR SD Tingkat Kabupaten di Serang pada tahun 1983. Dalam POR itu SD Kadukacapi tidak memperoleh apa-apa. Kemudian masih dalam tahun 1983 SD tersebut menjadi juara II dalam Lomba Kebersihan Tingkat Kabupaten dalam rangka Hari Kesehatan Nasional 1983, sedangkan di tingkat kecamatan dalam perlombaan tersebut menjadi juara I.

Di Desa Tanjungsari, selain ada 3 buah SD, juga masih terdapat 2 buah pesantren yang bernama Pesantren Hamidiyah, sebuah nama yang diambil dari nama orang tua Abah Machmud, seorang *kokolot* desa yang terkemuka di Kecamatan Pabuaran. Hingga kini di pesantren tersebut terdapat sekitar 40 orang santri. Kebanyakan di antara mereka berasal dari luar desa, bahkan dari luar kabupaten, seperti dari daerah di Jawa Barat, Lampung, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain.

Sehari-hari pesantren tersebut dibimbing oleh Haji Machmud dan Haji Hayat, adik kandung Haji Machmud.

Haji Machmud, selain membimbing dua buah pesantren, membimbing pula sebuah organisasi pendidikan swasta yang bernama

Lembaga Pendidikan Maulana Jusuf. Lembaga pendidikan ini di Desa Tanjungsari, mendirikan sebuah madrasah yang disebut Madrasah Islam Swasta (MIS), atau disebut pula Sekolah Dasar Islam (SDI). Lembaga pendidikan tersebut bernaung di bawah SATKAR ULAMA Banten. Dalam sekolah ini kurikulum pendidikan dibuat sedemikian rupa, sehingga antara alat dan bahan pelajaran mendapat bantuan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan semua guru dari Departemen Agama. Pendidikan tingkat SMTP masih dalam tahap persiapan, meskipun sekarang pendidikan dalam tingkat itu sudah berjalan dengan bantuan biaya dari SATKAR ULAMA.

Data tentang murid yang belajar di madrasah dan pesantren bila dibandingkan dengan murid-murid yang belajar di sekolah umum (SD), agaknya di Desa Pasanggrahan dan Tanjungsari lebih banyak anak-anak yang belajar di madrasah dan pesantren. Hal ini menunjukkan minat orang tua yang lebih besar terhadap pendidikan di madrasah dan pesantren daripada sekolah umum. Hal ini dapat kita amati di Desa Tanjungsari misalnya, di kampung Kadukacapi ada sekitar 190 orang murid dari kelas I–IV, dengan perincian 110 orang murid laki-laki dan 80 orang murid perempuan yang diasuh oleh 3 orang guru (2 orang guru laki-laki dan 1 orang guru perempuan). Sedangkan pada SDI di kampung yang sama memiliki sekitar 400 orang murid yang diasuh oleh 7 orang guru. Demikian pula keadaan di Desa Pasanggrahan, minat orang tua menyekolahkan anaknya pada madrasah cukup tinggi. Di Desa Pasanggrahan ada sebuah SD dengan murid sebanyak 305 orang. Sedangkan sebuah madrasah yang terletak di Desa Kadubeureum, tidak jauh dari Desa Pasanggrahan, mempunyai murid sebanyak 539 orang. Inilah suatu gambaran bagaimana minat orang tua di kedua desa tersebut dalam memilih bidang pendidikan bagi anak-anak mereka.

Menjawab pertanyaan "mengapa orang tua lebih berminat menyekolahkan anak-anak mereka pada MIS atau madrasah lainnya daripada SD atau SD Inpres," pada umumnya orang tua murid mengemukakan jawaban "sekolah MIS atau madrasah lainnya *kana agama bisa, kana umum bisa* (pada agama bisa dan juga masalah umum dapat dikuasai anak-anak)." Tampaknya, hal ini karena sesuai dengan kebutuhan nyata anak-anak di kedua desa tersebut dan sejalan pula dengan wawasan orang tua mereka tentang konsepsi hidupnya. Di madrasah lainnya dalam menyusun kurikulum sekolah berdasarkan perbandingan 50:50 antara agama dengan pengetahuan umum.

Menurut pendapat dan pengalaman Drs. E. Kusnadi, salah seorang tokoh pendidikan di Kabupaten Serang yang pernah menjabat Kepala Sekolah SMP Pabuaran, masyarakat di kedua desa tersebut beranggapan "banyak orang yang berhasil menjadi tokoh-tokoh desa ini tanpa melalui jenjang pendidikan formal." Oleh karena itu masyarakat kurang bergairah menyekolahkan anak-anak mereka ke SD yang ada di kedua desa tersebut. Mereka lebih berminat menyekolahkan anak-anaknya ke madrasah atau pesantren. Selanjutnya Drs. E. Kusnadi mengemukakan, "namun demikian, pengaruh luar yang intensitasnya cukup besar, pendapat masyarakat sebagaimana dikemukakan di atas lambat laun mulai berubah." Hal ini tampak dari kecenderungan orang tua sekarang banyak menyekolahkan anak-anaknya pada dua jenis pendidikan, yaitu sekolah umum dan pesantren. Mereka bersekolah pada pagi hari dan pada sore hari serta malam hari mereka mengikuti kegiatan di pesantren. Biasanya mereka lebih menekankan pada kegiatan mengaji pada tingkat dasar.

Agaknya, pendidikan di lembaga pesantren hingga kini tetap menarik di kalangan orang tua, tidak saja di desa-desa, tetapi juga di kota-kota. Di Desa Pasanggrahan dan Tanjungsari pesantren masih tetap memegang peranan penting dalam membina kader-kader pimpinan masyarakat dan pimpinan agama. Di kedua desa tersebut lembaga pendidikan pesantren bukan saja merupakan tempat belajar agama di kalangan para santri, tetapi juga merupakan pusat kegiatan kemasyarakatan. Di dalam pesantren berkembang berbagai bentuk kesenian, sastra, dan musik, termasuk "ilmu" bela diri (pencak silat), baik yang menggunakan "tenaga dalam", maupun "tenaga luar" (kekuatan fisik). Bahkan pada masa kolonial dulu, ketika kabupaten, kewedanaan, dan kelurahan telah menjadi alat kolonial, maka pesantren tampil sebagai pusat kegiatan anti kolonial (Rosidi, 1980). Di daerah Banten Selatan keadaan tersebut tampak dari berbagai bentuk pemberontakan rakyat yang pada masa lalu selalu berpusat di pesantren dan dipimpin oleh seorang atau beberapa orang ulama atau kiyai.

Tampaknya, di kedua desa tersebut pendidikan dalam pesantren lebih ditekankan pada penguasaan hukum agama dan peningkatan pengetahuan agama pada umumnya, di samping pemahaman dan pengembangan jiwa kepemimpinan dan ketrampilan lainnya. Hal ini dilakukan para kiyai. Para santri benar-benar dipersiapkan sebagai

calon-calon pemimpin umat di masa yang akan datang. Oleh karenanya para kiyai menggembleng para santri dengan disiplin yang keras dalam menanamkan ajarannya.

Hal tersebut dapat diamati dalam kehidupan para santri di pesantren Hamidiyah di kampung Kadukacapi. Dalam lingkungan pesantren ini, Abah Machmud menanamkan kebiasaan terhadap para santri untuk hidup sederhana dengan disiplin yang keras. Untuk itu tampaknya faktor kepatuhan santri kepada "guru" (kiyai) sangat diperhatikan. Hubungan antara kiyai dengan santri melebihi hubungan antara bapak dengan anak. Para santri sehari-hari memanggil "gurunya" dengan sebutan "Abah", suatu panggilan yang menunjukkan keakraban antara bapak dengan anak.

Salah satu disiplin yang ditanamkan Abah Machmud terhadap para santrinya adalah mengurangi waktu tidur. Semua santri yang ada dalam pesantren Hamidiyah hampir sebagian waktunya dihabiskan dalam mesjid. Mereka ada yang belajar mengaji dalam tingkat dasar, menengah, dan atas. Sistem belajar selalu dengan menggunakan sistem "tutor", artinya di kalangan para santri saling membantu mengajar, tingkat atas mengajar tingkat di bawahnya, dan seterusnya. Sedangkan "guru" hanya memeriksa secara umum saja. Sistem ini memang hanya mungkin dapat diikuti dengan disiplin yang cukup tinggi dengan kesadaran yang tinggi pula. Karena maju atau mundurnya pengetahuan para santri dalam bidang yang mereka pelajari, tergantung pada tanggung jawab santri itu sendiri. Abah Machmud mengetahui benar siapa santri yang belajar sungguh-sungguh dan siapa yang sekedar mencari nama saja. Sistem *reward* atau hadiah yang diberikan pada santri yang benar-benar menekuni ilmu agama adalah diberangkatkan ke Mekah tanpa bayar untuk menunaikan ibadah haji, apabila ia telah dianggap cukup mengikuti pendidikan di pesantren. Dalam sistem pendidikan pesantren tidak ada batas waktu kapan selesai. Hal tersebut tergantung pada kemandirian para santri itu sendiri.

Hal lain yang sangat menarik dari sistem pendidikan pesantren Hamidiyah adalah apabila masing-masing telah selesai membaca Al-Quran, mereka wajib mengikuti pembacaan Surat Yasin di mesjid hingga larut malam. Kegiatan ini dalam rangka doa selamat bagi negara dan bangsa serta para pemimpinnya. Selain itu, Abah Machmud menanamkan pula rasa kebersamaan hidup melalui berbagai

cara, seperti sembahyang bersama, makan bersama, mandi dan mencuci pakaian bersama, dan juga tidur dalam suatu ruangan besar secara bersama-sama. Waktu untuk melaksanakan sembahyang lima kali sangat diperhatikan. Sekitar pukul 04.00 para santri sudah dibangunkan, dengan aba-aba "siap" yang diteriakkan sangat keras oleh Abah Machmud, yang kemudian aba-aba tersebut disambut para pembantunya dengan teriakan yang sama ("siap"). Apabila para santri telah mendengar aba-aba semacam itu, mereka harus segera bangun membersihkan badan, wudhu untuk segera pergi ke mesjid melakukan doa, dan kemudian sembahyang subuh bersama-sama. Setelah sembahyang subuh mereka makan pagi bersama-sama yang telah dipersiapkan oleh Ibu Machmud dan para pembantunya yang terdiri dari para santri *senior*. Selanjutnya, mereka membersihkan tempat tidur, menyapu kamar dan halaman. Biasanya pada masa senggang di pagi dan siang hari, para santri tidak tinggal bersantaisantai, tetapi mereka bekerja di ladang, sawah, dan kebun para kiyai sekedar untuk membantu meringankan beban guru mereka dalam pengolahan tanah. Sedangkan bagi para santri kegiatan semacam itu selain sebagai pekerjaan ibadah, juga merupakan latihan keterampilan dan selingan kerja dari kejenuhan yang rutin menimba ilmu agama.

Demikianlah irama kehidupan pagi dan siang hari dalam sistem pendidikan pesantren di Pesantren Hamidiyah di kampung Kadukacapi, Desa Tanjungsari.

2. Sistem Kepemimpinan

Dalam bab-bab terdahulu telah diuraikan sistem kepemimpinan yang berkembang di kedua desa tersebut. Suatu sistem kepemimpinan yang dilandasi dengan dasar-dasar keagamaan yang kuat. Dalam sistem kepemimpinan seperti itu, ajaran agama yang bersifat fundamental dan yang bersifat praktis telah menjadi pedoman hidup masyarakat yang harus ditaati.

Dalam sistem kepemimpinan sebagaimana dikemukakan di atas, dunia pendidikan di kedua desa itu mencerminkan suatu sikap di kalangan murid-murid dan para santri suatu kepatuhan yang mutlak kepada guru mereka. Suasana ini sangat jelas terlihat dalam dunia pesantren. Berdasarkan pengamatan di Pesantren Hamidiyah di kampung Kadukacapi, para santri mengemukakan bahwa "hanya bila murid (santri) tunduk dengan sepenuh hati, maka ia akan memperoleh berkah (barokah) gurunya, dan usaha untuk memahami ke-

benaran akan tercapai.” Demikian mutlaknya kepatuhan murid kepada gurunya (kiyai) sehingga status sang guru harus diakui seumur hidup. Ungkapan di kalangan masyarakat di kedua desa tersebut ”*guru nu kudu digugu jeung ditiru*”, mengandung pengertian bahwa seorang guru (kiyai) mendapatkan tempat terhormat yang tidak dapat diganggu gugat. Kekuasaannya dapat dikatakan bersifat absolut, terutama dalam penguasaan ilmu dan pengetahuan keagamaan.

Dalam dunia pesantren berlaku sebagaimana yang dikemukakan oleh Dhofier dan Abdurachman Wahi (1978), bahwa seorang murid *thariqah* ”. . . tidak diperkenankan mengatakan bahwa kiyai A atau kiyai B adalah bekas gurunya. Seorang yang tidak lagi mau mengakui gurunya tetap sebagai guru sepanjang hidupnya, ia akan kehilangan *barokah* yang diperolehnya dari gurunya itu. Paham yang dikembangkan bahkan menganggap guru itu mempunyai kedudukan yang lebih utama daripada orang tuanya sendiri.”

Dalam usaha menanamkan sikap dan perilaku sosial sesuai dengan ajaran agama, anak-anak yang belajar di luar pesantren dan madrasah (sekolah-sekolah umum, seperti SD dan SMP) di kedua desa tersebut menganggap peranan mesjid dan langgar merupakan media penghubung. Melalui media mesjid dan langgar itulah pada tiap sore anak-anak dilatih untuk memahami ajaran-ajaran agama, sehingga mereka memiliki wawasan keagamaan yang relatif sama dengan para santri dan murid-murid yang bersekolah di madrasah-madrasah.

Usaha itu dilakukan oleh para ulama dan *kokolot* desa yang merupakan pimpinan masyarakat di kedua desa tersebut. Dengan wibawa dan pengaruhnya mereka tetap mampu, hingga kini, mengendalikan dan mengarahkan generasi muda dalam memahami nilai-nilai keagamaan, sehingga tetap berperilaku sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Bagi kalangan ulama dan *kokolot* desa keadaan ini dapat mengakibatkan tetap kokohnya kedudukan yang dimilikinya di kedua desa itu sehingga mereka tetap dianggap sebagai pimpinan masyarakat.

Dalam pendidikan pesantren tiga macam konsep hidup (*patokan hirup*) sebagaimana dijelaskan terdahulu, yaitu *jaga mal*, *jaga agama* dan *jaga darah* ditanamkan secara sungguh-sungguh di kalangan para santri oleh para ulama dan *kokolot* desa. Dalam lembaga pendidikan umum (SD dan SMP) di kedua desa tersebut, hingga sekarang, ben-

tuk pendidikan itu lebih menekankan pada memberikan pengetahuan (*transfer of knowlegde*) saja, sehingga tidak memberikan pengaruh yang dalam terhadap pembinaan watak di kalangan para murid. Oleh karenanya maka pembinaan watak dan pembentukan serta pengembangan pribadi anak-anak lebih banyak dilakukan di lingkungan keluarga dan di lingkungan mesjid atau langgar yang dibina oleh para ulama dan *kokolot* desa.

Dengan demikian maka pengaruh para ulama dan *kokolot* desa sebagaimana pimpinan masyarakat sangat berperan dalam membina dan mengarahkan anak-anak untuk berperilaku sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang mereka yakini. Di samping itu juga para guru pembina SD dan SMP yang ada di Kecamatan Pabuaran sebagian besar berasal dari luar desa dan tampaknya mereka lebih banyak menyesuaikan diri dengan pola kehidupan dan sistem sosial yang telah mapan (*established*) di kedua desa tersebut.

Tampaknya, berbagai usaha yang dilakukan para ulama dan *kokolot* desa di kedua desa itu disebabkan mereka sebagai kelompok elite desa menyadari bahwa mereka memiliki kepentingan yang lebih besar bila dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain. Itulah sebabnya, bila terjadi perubahan sosial, mereka berkepentingan untuk dapat mengendalikan perubahan-perubahan itu agar kepentingan mereka sebagai pimpinan masyarakat tidak sampai direbut oleh kelompok masyarakat lain.

Menurut pandangan Lenski (1961), agama dan pengelompokan masyarakat merupakan dua faktor yang paling berpengaruh dalam tingkah laku individu dan masyarakat. Itulah sebabnya para pimpinan masyarakat berusaha menguasai kedua aspek ini, yaitu dengan menjadikan kelompok elite, dan sekaligus pemuka agama. Gejala demikian itu tampak di kalangan masyarakat di Desa Pasanggrahan dan Tanjungsari, di mana terdapat perpaduan yang harmonis antara unsur-unsur ulama sebagai pemuka agama dengan unsur-unsur pemerintah (*umaroh*).

Maka sistem kepemimpinan yang tumbuh dan berkembang di kedua desa tersebut secara traditional muncul sebagai hasil interaksi dan perpaduan dari permainan antara unsur-unsur ulama, atau secara traditional biasa disebut *jawara*-ulama, dengan unsur-unsur *umaroh* sebagai jalur formal.

3. Pengaruh Dan Fungsi Kepemimpinan Bidang Pendidikan Dalam Masyarakat

Dalam uraian-uraian terdahulu telah dikemukakan bahwa pengaruh dan fungsi kepemimpinan para ulama sebagai *kokolot* desa dalam dunia pendidikan adalah membentuk dan mengembangkan tingkah laku umat sesuai dengan ajaran-ajaran agama agar dapat tercermin dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Pengaruh dari sistem kepemimpinan yang didominasi oleh para ulama dalam kehidupan masyarakat Desa Pasanggrahan dan Tanjungsari, antara lain dapat dilihat dari besarnya minat di kalangan orang tua murid dalam menyekolahkan anak-anak mereka ke lembaga pendidikan madrasah dan pesantren. Melalui kedua lembaga pendidikan tersebut dan digunakannya mesjid dan langgar sebagai media sarana pendidikan dan latihan dalam memahami nilai-nilai keagamaan di luar jalur madrasah dan pesantren, telah menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa ajaran agama, baik yang bersifat mendasar maupun ajaran yang bersifat praktis, digunakan masyarakat di kedua desa tersebut sebagai pedoman hidup dalam berbagai pola perilaku sosial sehari-hari.

Selanjutnya, pengaruh lain dari sistem kepemimpinan yang didominasi oleh para ulama adalah menjadikan masyarakat sangat tergantung pada restu para ulama yang merupakan "bapak" pelindung dunia dan akhiran. Hal ini telah menjadi keyakinan masyarakat itu sendiri. Di pihak lain mungkin karena masyarakat itu sendiri belum biasa untuk bertindak secara mandiri (*independent*), hingga mereka menyerahkan keputusan yang menyangkut hidup mereka pada orang lain yang mereka percayai dapat melindungi mereka lahir dan bathin.

Dalam menghadapi berbagai aktivitas sosial dan kepemudaan, di kalangan para santri selalu memegang peranan utama. Para santri selalu berdiri paling depan dalam memimpin berbagai aktivitas sosial, seperti kerja bakti, olah raga dan kesenian, seperti AMS, COPER dan GREES dipimpin oleh kalangan santri. Keadaan ini semua menggambarkan bagaimana pengaruh sistem kepemimpinan tersebut dalam kehidupan sosial masyarakat.

Di lain pihak harus diakui bahwa masyarakat Desa Pasanggrahan dan Tanjungsari tidak hidup dalam isolasi. Berbagai pengaruh luar masuk ke dalam kehidupan sosial desa, baik melalui program pembangunan yang diperkenalkan oleh kalangan *umaroh*, seperti dalam

program KB, cara-cara pengolahan tanah, sistem pemupukan, dan lain-lain, maupun melalui media massa, seperti Koran Masuk Desa (KMD), TV (khususnya di Desa Pasanggrahan) dan radio transistor. Demikian pula dalam struktur ekonomi, masyarakat desa tidak lagi menitikberatkan pada bidang pertanian semata-mata, meskipun pertanian tetap merupakan andalan utama dalam perekonomian mereka di kedua desa tersebut. Di antara mereka ada pula yang melakukan pekerjaan sebagai pedagang, tukang, pegawai negeri termasuk ABRI. Secara teoritis, keanekaragaman dari jenis pekerjaan itu tentu akan membawa pengaruh pula terhadap pola perilaku anggota masyarakat di kedua desa tersebut.

Dalam menghadapi suasana seperti yang dikemukakan di atas, maka fungsi pimpinan masyarakat adalah menyaring pengaruh-pengaruh yang datang dari luar itu. Para ulama dan *kokolot* desa di kedua desa tersebut akan mencoba memahami berbagai tekanan dari luar itu. Apabila diamati dengan cermat akan tampak bahwa di kedua desa tersebut para ulama dan *kokolot* desa itulah yang paling responsif terhadap perkembangan keadaan, lebih banyak memprakarsai perubahan sikap dan cara berpikir yang nantinya akan menentukan tingkah laku sosial masyarakat pedesaan.

Berbagai pengamatan selama melakukan penelitian di kedua desa tersebut menunjukkan bahwa para ulama dan *kokolot* desa ada usaha untuk mencoba menyesuaikan ajaran-ajarannya dengan masalah-masalah baru yang mulai mereka anut, khususnya terhadap program-program pembangunan yang diperkenalkan oleh kalangan *umaroh* (kepala desa dengan aparatnya) seperti program KB, PKK, dan lain-lain. Tentu saja mereka tidak menerima begitu saja semua perubahan yang datang dari luar. Para ulama dan *kokolot* desa, sebagai pimpinan masyarakat, akan selalu berusaha melakukan seleksi, di samping mereka berusaha yang dibawa dari luar itu sesuai dengan prinsip seleksi tadi. Hal-hal yang dianggap baik dan bermanfaat bagi mereka dan masyarakat akan mereka terima, sedangkan hal-hal yang dianggap merugikan dan bertentangan dengan ajaran-ajaran agama akan ditolaknya.

Demikianlah antara lain pengaruh dan fungsi kepemimpinan bidang pendidikan dalam masyarakat di Desa Pasanggrahan dan Tanjungsari.

BAB VIII

BEBERAPA ANALISA

1. Pengaruh Kebudayaan Terhadap Sistem Kepemimpinan Di Pedesaan

Kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Koentjaraningrat, 1979: 193) tentu akan memberikan pengaruh yang luas terhadap berbagai gejala kehidupan umat manusia.

Salah satu bentuk dari pengaruh kebudayaan masyarakat terhadap kehidupan sosial sebagaimana tampak di desa Pasanggrahan dan Tanjungsari terbukti dengan adanya hubungan yang erat antara unsur-unsur pimpinan formal dengan pimpinan informal. Adanya interaksi yang harmonis antara peranan yang dimainkan oleh unsur pimpinan formal dan unsur pimpinan informal melahirkan suatu sistem politik dan sistem kepemimpinan yang secara aktual memberikan corak tersendiri pada sistem kepemimpinan yang berlaku.

Hubungan yang erat terjalin antara unsur-unsur pimpinan formal (*umaroh*) dengan unsur-unsur pimpinan informal (*jawara* dan *ulama*), yang tampak di kedua desa itu, merupakan suatu produk "socio-historis", sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II dan III dalam tulisan ini. Produk tersebut sekarang telah memberikan warna pada sistem politik dan sistem kepemimpinan di kedua desa tersebut.

Adapun sistem politik dan sistem kepemimpinan yang berkembang sekarang dan dianut dalam kehidupan sosial masyarakat di sana adalah suatu sistem politik dan sistem kepemimpinan yang didominasi kalangan elite desa yang didukung oleh jaringan kekerabatan yang luas hingga ke luar batas desa dan penguasaan berbagai sumber daya ekonomi oleh kalangan elite desa itu.

Agaknya, dalam suatu bentuk kehidupan sosial yang masih bersifat tradisional, jaringan kekerabatan akan selalu memegang peranan yang amat penting dalam membentuk suatu sistem politik dan sistem kepemimpinan lokal (desa) maupun dalam tingkat nasional. Hal tersebut dapat diamati di Desa Pasanggrahan dan Tanjungsari dengan adanya hubungan kekeluargaan antara *kokolot* desa yang satu dengan *kokolot* desa yang lain, dan antara *kokolot* desa dengan kepala desa sebelumnya maupun dengan kepala desa yang masih aktif.

Gejala seperti yang dikemukakan di atas dalam ilmu-ilmu sosial biasa disebut dengan praktek nepotisme, yaitu mengangkat dan memberikan jabatan kepada sanak-saudara (keluarga) dengan memanfaatkan wewenang jabatan sebagai dasar kekuasaan. Sebagai konsekuensi praktek nepotisme tersebut, pejabat yang bertindak demikian dianggap sebagai "bapak" oleh para pegawai bawahannya yang tidak lain adalah keluarga sendiri (Wigna, 1979).

Praktek nepotisme yang terjadi di daerah Banten Selatan, khususnya yang dapat diamati di Desa Pasanggrahan dan Tanjungsari ialah hubungan kekerabatan yang dibina dan dikembangkan di kalangan elite desa itu lebih banyak dikendalikan oleh unsur-unsur *kokolot* desa yang kemudian bermuara pada diri seorang *kokolot* desa yang sangat disegani dan dihormati. Hubungan yang dibina dan dikembangkan di kedua desa itu, sebagaimana dikemukakan di atas, terjadi secara vertikal (dari generasi ke generasi) atau hubungan kekerabatan di antara *kokolot* desa dengan kepala desa dan anggota parentah desa lainnya, seperti carik, ulu-ulu, dan lain-lain. Di samping itu juga hubungan yang bersifat horizontal (dalam satu generasi) antar *kokolot* desa yang satu dengan *kokolot* desa lainnya, selain dengan kepala desa dan anggota *parentah* desa yang masih aktif.

Dalam menentukan kepala desa misalnya, peranan yang dimainkan para *kokolot* desa sangat menentukan seorang calon untuk menduduki jabatan kepala desa tersebut. Biasanya yang tampil dan memenangkan pemilihan kepala desa itu seorang yang memiliki hubungan keluarga dengan seorang *kokolot* desa yang berpengaruh, berwibawa, dan dominan di lingkungan desanya. Sebagai contoh dapat dikemukakan adalah figur Abah Machmud sebagai seorang *kokolot* desa yang memiliki wibawa dan pengaruh yang dominan di dalam kehidupan sosial masyarakat di Desa Tanjungsari. Ia memiliki dan membina jaringan pengaruh yang amat luas, baik dalam tingkat desa, kecamatan, kabupaten maupun dalam tingkat nasional. Ia adalah seorang "strategic elite" yang dihormati dan ditaati masyarakat di Kecamatan Pabuaran, yang mampu membawa gerak dan pemikiran para ulama dan umaroh dalam satu langkah dan bahasa, sehingga di antara mereka tercipta suatu hubungan harmonis. Baik kalangan ulama sebagai *kokolot* desa maupun kalangan *umaroh* selalu datang berkonsultasi pada Abah Machmud dalam menentukan berbagai kebijakan dalam pembangunan desa. Maka ia dipandang masyarakat dan kalangan *umaroh* di Kecamatan Pabuaran sebagai seorang "bapak" yang dihormati dan disegani.

Keadaan itu adalah suatu ciri utama dari praktek nepotisme yang tumbuh dan berkembang baik secara vertikal, maupun secara horizontal di daerah Banten Selatan, yakni seorang yang dianggap "bapak" oleh kalangan masyarakat luas dan kalangan *umaroh* adalah *kokolot* desa yang memiliki wibawa dan pengaruh luas. Di lihat dari sudut kehidupan masyarakat desa tersebut atau dengan kata lain, dilihat dari segi dinamika kehidupan sosial masyarakat itu sendiri, maka keadaan ini, sebagaimana yang dapat diamati di kedua desa itu, agaknya membawa akibat positif dari sistem kepemimpinan yang tumbuh dan dianut masyarakat di daerah tersebut. Unsur-unsur *kokolot* desa seringkali menjadi unsur kekuatan kontrol terhadap berbagai kebijaksanaan kepala desa. Dengan demikian maka selalu ada keseimbangan kekuatan yang bermain dalam struktur pemerintahan lokal (desa) dalam membina dan mengembangkan sistem politik dan sistem kepemimpinan yang dianut masyarakat.

Namun demikian, harus diakui bahwa konsep "patuh antara bapak (yang diemban oleh *kokolot* desa) dengan masyarakat (yang dipandang sebagai anak)," yang berkembang di kalangan para *kokolot* desa itu dapat mengakibatkan sistem "feodal" tumbuh dengan subur dalam kehidupan sosial masyarakat desa. Tetapi keadaan demikian tidak menghilangkan fungsi *kokolot* desa sebagai kekuatan kontrol atas tindakan kepala desa yang seringkali dilakukan semena-mena. Dalam keadaan demikian maka *kokolot* desa bertindak sebagai pelindung masyarakat, sebagaimana tampak dalam kehidupan sosial masyarakat di kedua desa itu.

Selanjutnya, dalam sistem politik dan kepemimpinan suatu masyarakat, sebagaimana dilukiskan di atas, akan selalu mempunyai hubungan timbal-balik, saling menentukan antara kekuasaan yang dimilikinya dengan keadaan dan penguasaan atas sumber daya ekonominya. Sistem kepemimpinan seseorang, sebagaimana yang diperankan oleh *kokolot* desa di Desa Pasanggrahan dan Tanjungsari, dapat memberikan warna kepada corak kehidupan masyarakat yang dilandasi dasar-dasar keagamaan yang kuat.

Baik buruknya praktek nepotisme itu tergantung ke arah mana praktek nepotisme itu akan dibawa oleh para *kokolot* desa di kedua desa tersebut. Dengan ikatan-ikatan keluarga yang kuat yang terwujud dalam bentuk nepotisme itu akan digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat atau digunakan untuk melindungi usaha-usaha penyelewengan dalam kehidupan sosial. Tampaknya

praktek nepotisme dalam sistem kepemimpinan sebagaimana tampak di kedua desa itu dapat dimanfaatkan sebagai jalan ke arah kemajuan dalam masa pembangunan sekarang.

2. Sistem Kepemimpinan Pedesaan Sehubungan Dengan Sistem Administrasi Politik Nasional

Keanekaragaman corak kebudayaan Indonesia (Geertz, 1967; Koentjaraningrat, 1967; Suparlan, 1978) agaknya mewarnai juga keanekaragaman corak dari sistem kepemimpinan, khususnya jelas tampak dalam masyarakat pedesaan Indonesia. Hal ini tercermin dalam keanekaragaman sistem sosial dan politik yang berlaku di masing-masing lingkungan masyarakat yang bersangkutan.

Namun demikian, sesungguhnya secara teoritis, keanekaragaman corak sistem politik dan sistem kepemimpinan sebagaimana dikehendaki di atas, secara sosial dan politik telah menjadi sederhana, karena pengaruh sistem administrasi politik nasional terhadap sistem kepemimpinan desa yang implementasinya diatur oleh Undang-Undang Pemerintahan Desa No. 5 Tahun 1979. Akan tetapi dalam kenyataan sosial sehari-hari keadaan sebagaimana dikemukakan di atas, bukanlah suatu masalah yang sederhana.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Desa Pasanggrahan dan Tanjungsari, agaknya, hingga kini, corak sistem kepemimpinan masyarakat yang tumbuh dan berkembang di kedua desa tersebut masih tetap memperlihatkan pola-pola yang bersifat tradisional. Hal ini tampak pada anggapan masyarakat di kedua desa tersebut terhadap para pemimpinnya, bahwa aspek keturunan, kekebalan (*ber-elm*) dan keberanian serta mampu bertindak sebagai "bapak" pelindung masyarakat lahir dan bathin, merupakan syarat utama yang diakui dan dihormati masyarakat sebagai pemimpin. Anggapan tersebut di atas, sekarang, dimiliki dan dimainkan para *kokolot* desa di kedua desa tersebut.

Dalam Bab III telah diuraikan bahwa berbagai peraturan dan perundang-undangan yang dibuat pemerintah kolonial dulu telah banyak mengubah kehidupan sosial desa. Akan tetapi pada hakekatnya berbagai peraturan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat desa itu, secara struktural tidak berhasil merubah sistem sosial masyarakat desa secara keseluruhan. Berbagai peraturan dan perundang-undangan itu bahkan berkecenderungan mengokohkan adat-istiadat yang dianut masyarakat, sejauh adat-istiadat itu tidak membahaya-

kan eksistensi kekuasaan kolonial dulu. Demikian pula pada masa kemerdekaan sekarang, sistem kepemimpinan yang dianut masyarakat di daerah pedesaan belum memperlihatkan perubahan yang fundamental. Hal ini tampak dari pengamatan yang dilakukan di kedua desa tersebut, sejak awal kemerdekaan hingga sekarang belum terdapat perubahan di dalam struktur sosial yang mereka anut. Hal ini ditandai dengan tidak adanya mobilitas sosial secara vertikal (ke atas), dan akibatnya dalam sistem sosial pedesaan yang telah mapan (*established*) itu tidak dimungkinkan lahirnya kelompok elite pedesaan baru. Agaknya, perkembangan sejarah, orientasi dan kekuatan politik yang sesungguhnya, serta besarnya pengaruh dan kekuatan adat kebiasaan masyarakat desa akan tetap memberikan warna dan pengaruh terhadap sistem kepemimpinan pedesaan, meskipun tentu sistem kepemimpinan tersebut tidak lepas dari penyesuaian-penyesuaian terhadap tekanan-tekanan sistem administrasi nasional yang berlaku. Namun demikian meskipun kita dapat mengatakan bahwa pengaruh sistem administrasi politik nasional sekarang makin hari semakin bertambah besar, namun hendaknya kita sadari adanya suatu kenyataan bahwa sistem administrasi politik nasional itu tidak mungkin mampu untuk melakukan pengawasan dan mengkoordinasikan semua gerak dan aktivitas sosial masyarakat desa secara keseluruhan karena kompleksnya masalah yang dihadapi.

Di lain pihak sistem administrasi politik nasional cenderung untuk mengokohkan sistem kepemimpinan yang dianut masyarakat desa, seperti tampak dari berbagai kebijaksanaannya selama ini, antara lain dapat diamati dari berbagai bantuan dan fasilitas sosial yang diberikan pemerintah pusat, dalam bentuk berbagai pinjaman, seperti kredit desa, bantuan KUD dan BUUD, Program BIMAS dan INMAS, dalam kenyataannya, hanya dapat dinikmati oleh kalangan elite desa saja. Dengan demikian maka berbagai bantuan dan fasilitas sosial itu hanya mengokohkan sistem kepemimpinan yang secara traditional dianut masyarakat.

3. Sistem Kepemimpinan Pedesaan Dalam Pembangunan Nasional

Dalam uraian terdahulu telah dikemukakan bahwa sistem kepemimpinan yang masih hidup dan berkembang di daerah pedesaan, sebagaimana yang berhasil diamati di Desa Pasanggrahan dan Tanjung Sari adalah masih bersifat nepotisme. Banyak orang berpendapat bahwa praktek nepotisme itu merugikan. Akan tetapi dari berbagai

pengamatan yang dilakukan di kedua desa tersebut, dapat dikemukakan bahwa praktek nepotisme yang telah membentuk sistem politik dan kepemimpinan desa, justru membawa hasil yang cukup positif, meskipun tentu tidak terlepas dari berbagai kelemahan, sebagaimana dikemukakan di atas, dalam kehidupan sosial masyarakat di kedua desa tersebut.

Melalui praktek nepotisme, seorang pemimpin akan memperoleh dukungan massa yang kuat, dan dengan demikian ia akan mampu menggerak partisipasi warga masyarakat dalam program pembangunan desa. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan masyarakat dalam program-program, seperti *royongan* yang digerakkan oleh para *kokolot* desa di kedua desa tersebut. Dengan ikatan kekeluargaan yang kokoh yang membentuk suatu kekuatan dalam suatu sistem sosial desa, para *kokolot* desa mampu membawa warga desa ke arah yang mereka cita-citakan, yaitu kebahagiaan hidup masyarakat lahir dan bathin yang dilandasi nilai-nilai keagamaan yang kuat.

Suatu kenyataan yang masih tetap memiliki pengaruh yang luas di daerah pedesaan Jawa Barat adalah unsur *kokolot* desa (di daerah Priangan biasa disebut *sesepeuh*). Tanpa mengikut sertakan dan restu mereka, mustahil usaha dan program pembangunan yang ditawarkan pada masyarakat desa akan berhasil. Peranan dan wibawa para *sesepeuh* tersebut di daerah Jawa Barat, sebagaimana dikemukakan oleh Jackson dan Moeliono (1973: 24), sebagai berikut :

"These elders (*sesepeuh*) were not officials; they would refuse jobs as civil servants. You know, these are the men who supervise the village, who come up with advice even when not asked for, but to whom you come and ask how something can be done."

Di Desa Pasanggrahan dan Tanjungsari, peranan sebagaimana dikemukakan di atas, dipegang oleh unsur-unsur *kokolot* desa dan para ulama (*jawara-ulama*) sebagai pimpinan informal dalam sistem kepemimpinan pedesaan. Sebagai mana telah diuraikan terdahulu, para *kokolot* desa di kedua desa tersebut telah melakukan peranan yang sangat penting dalam memadukan gerak dan langkah para *umaroh* sebagai unsur pimpinan formal dengan para ulama (*jawara-ulama*) sebagai unsur pimpinan informal ke arah satu penanggulangan yang dinamis terhadap program-program pembangunan pedesaan.

Di samping itu mereka juga, bila perlu, mampu bertindak sebagai alat kontrol terhadap kepala desa bila tindakannya dianggap masya-

rakat kurang bijaksana. Meskipun tidak dapat disangkal bahwa sistem kepemimpinan pedesaan sebagaimana dianut dan berkembang di kedua desa itu dapat mengakibatkan tumbuhnya dan berkembangnya sistem feodal dalam kehidupan sosial masyarakat desa. Akan tetapi baik buruknya suatu bentuk feodalisme itu tergantung pada ke arah mana akan dibawa oleh para pimpinannya. Apakah sistem feodal yang masih kokoh dianut di kalangan masyarakat desa itu akan dibawa oleh para pimpinan masyarakat tersebut untuk tujuan yang baik, atau justru digunakan untuk mendukung kegiatan dan usaha-usaha manipulasi dan korupsi?

Apakah tidak mungkin sistem feodal yang masih kuat dianut masyarakat di daerah pedesaan itu dimanfaatkan sebagai alat ke arah kemajuan dalam alam pembangunan masa kini. Sudah banyak contoh dalam lingkungan hidup kita sehari-hari, bila seorang pemimpin dipaksakan dari atas atau "dipilih" bukan atas kehendak rakyat banyak hanya akan menimbulkan keresahan saja di kalangan masyarakat luas.

KEPUSTAKAAN

Abdullah, Taufik,

- 1982 "Pola Kepemimpinan Islam Di Indonesia: Tinjauan Umum". Dalam *Prisma*, No. 6 Juni Tahun XI.

Adimihardja, Kusnaka.

- 1980 *Pertanian: Mata Pencapaian Hidup Masyarakat Sunda Di Jawa Barat*. Bandung: Jurusan Antropologi, Fakultas Sastra, Universitas Padjadjaran.

Alatas, Syeh Hussein,

- 1972 "The Weber Thesis and Southeast Asia". Ditejemahkan "Thesis Weber dan Asia Tenggara", dalam Taufik Abdullah (ed). 1979. *Agama, Etos Kerja Dan Perkembangan Ekonomi*. Jakarta: LP3ES.

Benda, J. Harry,

- 1963 "Continuity and Change in Indonesia" (terjemahan) dalam Taufik Abdullah (ed). 1974. *Islam di Indonesia*. Jakarta: Tintamas.

Beratha, I. Nyoman,

- 1982 *Desa: Masyarakat Desa Dan Pembangunan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Bintoro, R,

- 1968 *Beberapa Aspek Geografi*. Yogyakarta: Penerbit Karya.

Bouman, P. Z.

- 1971 *Sociologie Begripen en Problemen*. Terjemahan Sugito Sujitno, Yogyakarta: Yayasan Kanisius.

Djajadiningrat, A

- 1936 *Buku Kenang-Kenangan P.A.A. Djajadiningrat*. Batavia: Firma G. Kolff & Co.

Dhofier, Z. dan Abdurachman Wahid

- 1978 "Penafsiran Kembali Ajaran Agama", dalam *Prisma*, No. 3 April, Tahun VII.

Effendi, H.M. Joesoef,

- 1979 *Geger Cilegon*. Sumbangan Catatan pada Dalam Peringatan Geger Cilegon. Pesantren Al-Chariyah. Tanggal 7/7.

Geertz, H.

- 1967 "Indonesian Culture and Communities". Dalam McVey (ed). *Indonesia*. New Heaven: Yale University Press.

- Jackson, J.D. dan Moeliono,
 1973 "Participation in Rebellion: The Dar'ul Islam in West Java". Dalam R. William Liddle (ed), *Political Participation in Modern Indonesia*. New Heaven: Yale University Southeast Asian Studies.
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo,
 1965 *Desa*. Bandung: Penerbit Sumur Bandung.
- Koentjaraningrat,
 1979 *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
 1967 "The Village in Indonesia Today". Dalam Kuntjaraningrat (ed). *Villages in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Lenski, G.
 1961 *The Religion Factor: A Sociological Study of Religion's Impact on Politics, Economics, and Family Life*. Lihat dalam Dhofier dan Abdurachman Wahid. Dalam Prisma, No. 3 April 1978 Tahun VII.
- Napitupulu, A.S.
 1981 "Transmigrasi Kualitatif Dan Pembangunan Pola Desa Modern". Dalam *Berita Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*. Jakarta: Tahun ke 25 No. 3: LIPI.
- Onghokham,
 1982 "Kepemimpinan Dalam Sejarah Indonesia". Dalam *Prisma*. No. 6 Tahun XI. LP3 ES.
- Patji, A.K.
 1983 "Saling Ketergantungan Antara Desa dan Kota" Dalam *Basis*, September XXXII-9.
- Prasadja, Buddy
 1980 *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya*. Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial.
- Sudjana, D.
 1975 *Data-Data Hasil Survey Tharekat Di Jawa Barat*. Bandung: Departemen Agama Propinsi Jawa Barat.
- Suparlan, Parsudi,
 1978 "Ethnic Groups of Indonesia". Dalam *Indonesia Quarterly*, Vol. 7 No. 2 CSIS.

Suwondo, Nani,

1967 *Hukum Perdata Adat Jawa Barat* (terjemahan tulisan Prof. R. Soepomo, SH). Djakarta: Djambatan.

Tjondronegoro, M.P.

1982 "Gejala Organisasi Dan Pembangunan Berencana Dalam Masyarakat Pedesaan Di Jawa Barat". Dalam Kuntjara-ningrat (ed). *Masalah-Masalah Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.

Tim Penelitian/Penyusunan Istilah Sosiologi. Departemen Sosiologi, FIS-UI, 1978-1979.

Van Vollenhoven,

1931 *Het Adatrecht van Nederlenche Indie*. deel I (herdruk, 1925) en deel II. Tanpa Penerbit.

Wigna, Winarti,

1979 "Nepotisme Di Desa: Suatu Studi Kasus Di Jawa Barat". Dalam *Prisma*. No. 3 Maret, Tahun VIII. Lihat pula J.D. Zacharias, "Lurah dan Program Pembangunan". Dalam

LAMPIRAN I

Daftar Informan di Desa Pasanggrahan

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : Haji Muh. Sjafei |
| 2. Umur | : 41 tahun |
| 3. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 4. Alamat | : Kampung Kadubangban, Desa Pasanggrahan |
| 5. Suku bangsa | : Sunda |
| 6. Pekerjaan | : Kepala Desa Kadubeureum |
| 7. Agama/Kepercayaan | : Islam |
| 8. Pendidikan | : SD |
| 9. Status | : Kawin |
| 10. Jumlah anak | : 6 orang |
-
- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 1. Nama | : Haji T.A. Munawin |
| 2. Umur | : 52 tahun |
| 3. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 4. Alamat | : Kampung Baru, Desa Pasanggrahan |
| 5. Suku bangsa | : Sunda |
| 6. Pekerjaan | : Camat Pabuaran |
| 7. Agama/Kepercayaan | : Islam |
| 8. Pendidikan | : S.M.I. |
| 9. Status | : Kawin |
| 10. Jumlah anak | : 7 orang |
-
- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : Kiyai Jubaedi |
| 2. Umur | : 66 tahun |
| 3. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 4. Alamat | : Kampung Kadubangban, Desa Pasanggrahan |
| 5. Suku bangsa | : Sunda |
| 6. Pekerjaan | : Bekas Kepala Desa |
| 7. Agama/Kepercayaan | : Islam |
| 8. Pendidikan | : SD dan Pesantren |
| 9. Status | : Kawin |
| 10. Jumlah anak | : 12 orang |

1. Nama : Haji Jamra
2. Umur : 70 tahun
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Alamat : Desa Pasanggrahan
5. Suku bangsa : Sunda
6. Pekerjaan : Pensiunan TNI dan Anggota DPRD Kabupaten Serang
7. Agama/Kepercayaan : Islam
8. Pendidikan : SD dan Pesantren
9. Status : Kawin
10. Jumlah anak : 5 orang (semua sudah berkeluarga)

1. Nama : Haji Satrai
2. Umur : 69 tahun
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Alamat : Kampung Sampiran, Desa Pasanggrahan
5. Suku bangsa : Sunda
6. Pekerjaan : Alim Ulama
7. Agama/Kepercayaan : Islam
8. Pendidikan : Pesantren
9. Status : Kawin
10. Jumlah anak : 6 orang

Daftar Informan di Desa Tanjungsari

1. Nama : Haji Rasiman
 2. Umur : 45 tahun
 3. Jenis kelamin : Laki-laki
 4. Alamat : Kampung Pagedangan, Desa Tanjungsari
 5. Suku bangsa : Sunda
 6. Pekerjaan : Tani
 7. Agama/Kepercayaan : Islam
 8. Pendidikan : SD kelas II dan Pesantren
 9. Status : Kawin
 10. Jumlah anak : 4 orang
-
1. Nama : Haji Jana
 2. Umur : 87 tahun
 3. Jenis kelamin : Laki-laki

4. Alamat : Kampung Pagedangan, Desa Tanjungsari
5. Suku bangsa : Sunda
6. Pekerjaan : Tani
7. Agama/Kepercayaan : Islam
8. Pendidikan : SD 3 tahun
9. Status : kawin
10. Jumlah anak : 9 orang

1. Nama : Haji Idis
2. Umur : 60 tahun
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Alamat : Kampung Pagedangan, Desa Tanjungsari
5. Suku bangsa : Sunda
6. Pekerjaan : Tani
7. Agama/Kepercayaan : Islam
8. Pendidikan : SD 3 tahun
9. Status : Kawin
10. Jumlah anak : 5 orang

1. Nama : Haji Ahmad Hayat
2. Umur : 65 tahun
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Alamat : Kampung Kadukacapi, Desa Tanjungsari
5. Suku bangsa : Sunda
6. Pekerjaan : Tani
7. Agama/Kepercayaan : Islam
8. Pendidikan : Ibtidaiyah Kerawang
9. Status : Kawin
10. Jumlah anak : 8 orang

1. Nama : Mas Jawira
2. Umur : 60 tahun
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Alamat : Kampung Tanjung Kulon, Desa Tanjungsari
5. Suku bangsa : Sunda
6. Pekerjaan : Tani
7. Agama/Kepercayaan : Islam
8. Pendidikan : SD 3 tahun
9. Status : Kawin
10. Jumlah anak : 7 orang

LAMPIRAN II

Daftar Pembantu Lapangan Di Desa Pasanggrahan

1. Anna Supriatna
2. Ayi Rustana
3. Ohan Ruhiat
4. Djatmika
5. Salim Apandi

Daftar Pembantu Lapangan Di Desa Tanjungsari

1. Marchaemi
2. Humaedi
3. Abdul Hamid
4. M. Sukmawidjaja
5. Iwo Kartiwo

INDEKS

abah, 66, 65, 82, 128
abdurachman wahid, 121
adat, 2,5
afdeeling, 63
agus kamis, 63
aki, 26, 281
aksara, 9
amal, 95, 99
amil, 49, 53, 54
atributes, 90
azas domein, 93
baduy, 60
balaradja, 37, 39
bale desa, 13
bantahan, 64
banten girang, 45
banten hilir, 45
barak, 28
barokah, 38, 121
basing, 104
basudin, 46
batavia, 45, 47
bau, 93
bayar gawe, 55
bengkok, 15, 49
bidin, 63
bintaro, 44
birai, 54
birokratis, 92
bocokok, 47
boncel, 46
bouman, 44
bujang, 23
cagut, 35
cai wasiat, 38, 40
carik, 13, 19, 49, 52, 53, 56
caringin, 46

casava, 91
cemplang, 60
ciapit, 37
ciaseum, 54
cibanten, 6, 17, 40
cibatu, 54
cibirai, 17
cibodas, 60
ciberang, 16
cigewok, 17
ciherang, 15, 54
cikal bakal, 50
cikopeng, 17
cikukuk girang, 54
cikukuk landeuh, 54
cilegon, 47
ciomas, 6, 13, 30, 66, 86
cipetir, 66
cipeuteuy, 17
cisitu, 17, 37
cinangka, 42
citamiang, 38
citanggohgor, 16, 54
cipero, 43, 124
dawamussahr, 105
demang, 46
desa, 3,4
digugu, 121
dipardeokeun, 94
dhofier, 121
dokumentasi, 3, 12
draft, 11
dul jawad, 87
dusun dati, 45
elite desa, 109
elmu, 46, 130
elmuhideung, 62
elmurawayan, 62
establiment, 47

faker, 105
 feodalisme, 133
 formal, 4
 gadog, 54
 gamping, 45
 garu, 96
 geblogan, 93, 94
 geomorgologis, 15, 16
 gong si parayoga, 39, 40
 gotongroyong, 98
 grees, 80, 124
 gunung kancana, 46
 gunung sari, 13
 haji abidin, 80
 haji adung, 30, 82
 haji hayat, 66
 haji dul patah, 30
 haji dul rajak, 30
 haji hadil, 66, 82
 haji idis, 66
 haji jana, 29, 30
 haji juhra, 82
 haji rajik, 30, 31, 69
 haji sadik, 30, 31
 haji sarwan, 30
 haji satrai, 38
 haji zamra, 38, 66, 82
 hamidiyah, 82, 116, 118
 hansip, 77
 hanra, 77
 haram, 74
 hukum adat, 1
 hukum sara, 78
 huluna, 30
 huma, 58, 93, 94, 96
 jaga darah, 88, 122
 jaga mal, 87, 122
 jago, 46, 47, 65
 jagoan, 59
 jahat, 64

jakri, 39, 40
 jami, 94
 jamiahan, 104
 jarak, 84
 jaro, 25, 26, 30, 50
 jayasinga, 60
 jawara, 46, 47, 57, 60
 jawara ulama, 61, 109, 120
 jengkol, 32
 juara, 60
 juragan, 25
 kabayan, 49, 53
 kaduagung, 13
 kadubangban, 26, 88
 kadubeureum, 13, 19, 28, 117
 kadukacapi, 39, 54, 115, 116
 kapok, 92, 98
 kapuk, 40
 karag, 54
 kaul, 106
 kawin gantung, 24
 kebon, 24
 kejagoan, 71
 kep~~da~~ desa, 5
 ki bao, 37
 ki cengceng, 37
 ki damiah, 38
 ki emed, 67
 ki gaceng, 38
 ki ilham, 37
 ki imam, 37
 ki jata, 37
 ki jenggotraweng, 37
 ki mas jayanagara, 37
 ki misraya, 37
 ki nalir, 37
 kiyai, 5, 118, 119
 kokolot, 5, 10, 11, 25, 26
 kokonel anwar, 66
 kopero, 80

koramil, 78, 79
 kuburan, 37
 kupahandap, 54
 langgar, 24, 34, 74, 75, 97
 lebak, 37, 90
 lebakbudi, 54
 lebakgintang, 54
 lemburjero, 54
 leuweung, 94
 liliuran, 34, 48, 73, 76, 97
 lurah, 26
 luwuk, 13
 magis, 59
 maisah, 35
 makam, 6, 112
 malangbumi, 40
 malangnengah, 54
 mandiri, 124
 matang, 91
 maok, 78
 maro, 55
 melek, 41
 melinjau, 33
 menank, 37
 meunasah, 46
 minggon, 84
 monografi, 15, 17, 33
 multi crops, 17, 33
 nagari, 45
 naksabandiah, 104
 natanegara, 37
 nepotisme, 127, 129
 ngadar, 35
 ngajami, 94
 ngalagis, 34
 ngan ukur huluna, 85
 ngobrol, 10
 ngored, 35
 ngulonngetan, 40

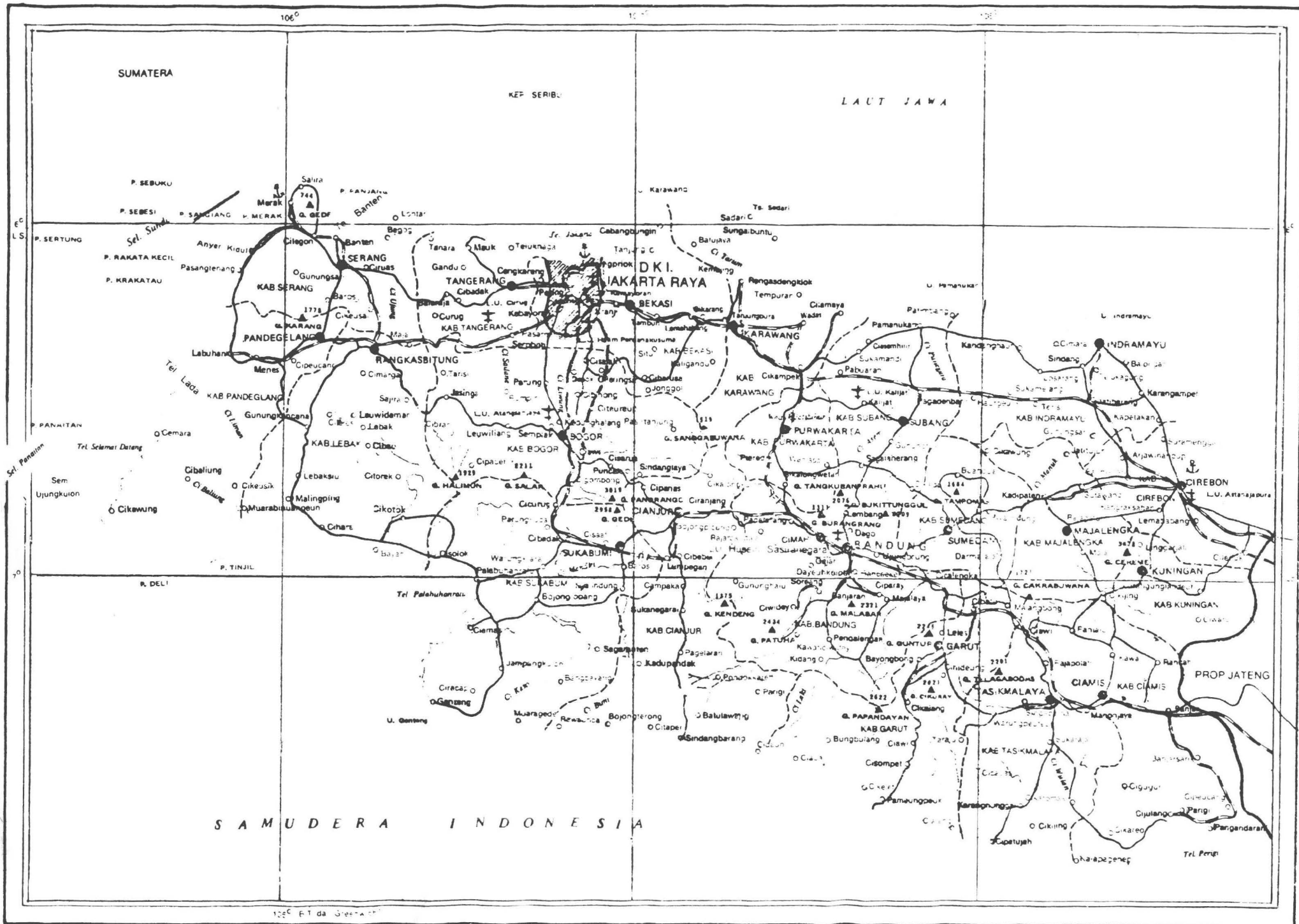
ngusumah, 37
 nomaden, 95
 nu ngatur, 78
 nusantara, 65
 nyasap, 35
 nyelang, 35
 nyepi, 37
 nyi mas gamparan bojong, 37, 39
 orthodox, 105
 pabuaran, 5, 8, 9, 3, 15
 padat karya, 77
 pegedangan, 37, 54
 pahuma, 93
 pajajaran, 45, 59, 112
 pala, 17
 palawija, 32
 palima, 42
 palka, 42
 pamali, 102
 panayagan, 39
 pancuran citamiang, 38
 panghulu, 54
 pangiwa, 49, 51
 pantangan, 40
 panyambut, 55
 parabot desa, 49, 51, 56, 71
 parahiang, 60
 parentah desa, 76, 127
 parigi, 54
 pasanggrahan, 19, 28, 54
 pasar simpang, 91
 pasir, 54
 pasrah, 100
 patokan hirup, 87, 122
 patungan, 97, 103, 111
 penggodogan, 27
 penghulu amil, 56
 perang wasid, 47
 peuyeum sampeu, 91
 posisi kunci, 67

pranata, 89, 90
prasurvey, 9
priangan, 12, 38
pribumi, 50
pucuk umum, 45, 60
pulosari, 60
qilatul akhli, 105
qiyamullail, 105
qodariah, 104
radikal, 65
rampog, 64
rawayan, 60
rebo wekasan, 40
reformis, 43, 80
regent, 46
reliabilitas, 11
responden, 9, 10, 19
reuma, 94
romusha, 28
ronda, 76
royongan, 34, 73, 75, 96
rukun kampung, 53
rukun tetangga, 53
safar, 105
sahab, 46
samemeh, 88
sampiran, 28, 54, 80
sanghiyang sirah, 60
satkar ulama, 86, 116
serang, 8, 13
sesepuh, 5, 10, 11, 40, 132
sindangmandi, 15
sindangsari, 13
sistem reward, 119
strategic elite, 127
sugihpelit, 85
suhunan, 40
sukalaba, 13
sukarena, 15

sunda, 65
tadah hujan, 17
tahlil, 36
tajarrud, 105
talag, 55
tanah suci, 92
tanjung kulon, 29, 114
tanjungsari, 8, 9, 13, 23, 125
tanjungwewetan, 29
tawakal, 100
tegalan, 15, 16
teritorial, 1
teu kauntupan, 88
tipologi, 6
tharekat, 105
thariqah, 121
traditional, 1, 5, 130
tukang tani, 87
turumbu, 59
uga, 38
ujung kulon, 60
ulama, 7, 57
ulu-ulu, 49, 53, 127
umaroh, 6, 57, 65, 71
undak usuk basa, 5
uyut latib, 39
uzalah, 105
validitas, 11
wani, 64, 65
warung, 97
wenang, 74
wet, 26
wibawa, 68
wiradidjaja, 46
wiridan, 36
wuluku, 96
zakat, 101
ziarah, 36, 84



PROPINSI JAWA BARAT



Tidak diperdagangkan untuk umum

